

PERANAN PEMIKIRAN ULAMA DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA

BUKU DUMMY

Mendapatkan Bantuan Dana dari DIPA/BOPTAN UIN SGD Bandung
Tahun Anggaran 2013



Penulis

Didin Komarudin, M.Ag
ID. 201605760103168

**Pusat Penelitian dan Penerbitan
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
2013**

ABSTRAK

Penelitian ini difokuskan pada keterlibatan ulama sebagai salah satu unsur pemimpin masyarakat penting dalam pembangunan masyarakat desa. Tujuannya untuk mengetahui peranan pemikiran mereka dalam pembangunan masyarakat desa di kecamatan Cikancung kabupaten Bandung, dan pengaruh pandangannya mengenai pembangunan terhadap peranan mereka dalam pembangunan masyarakat desa. Populasi sasaran, ulama yang ada di kecamatan tersebut. Penentuan satuan sampel dilakukan dengan cara informant's rating dan penarikan sampel dengan acak sederhana. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan diuji secara statistik dengan statistik uji "Ranking Spatial kendall": t xy.z

Hasil penelitian menunjukkan peranan pemikiran ulama cukup besar dan beragam, baik berupa pikiran, tenaga, maupun harta. Dilihat dari prinsip keterlibatan dalam proses pembangunan, pada jalur bawah mereka terlibat secara lengkap (penuh), sedangkan pada jalur atas terlibat secara partial, karena kurang mendapat kesempatan. Cakupan keterlibatan mereka tidak terbatas dalam kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di desa mereka saja, tapi juga terlibat dalam pembangunan di luar desanya terutama dalam pembangunan keagamaan.

Bagi ulama ajaran Islam merupakan psychological dynamics bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas Keduniawian yang bermakna, sumber aktivitas untuk berlangsungnya transformasi struktural, serta pemberi bentuk sistem prilaku yang berkaitan dengan fenomena pembangunan. Karena itu pembangunan bagi mereka merupakan pengamalan nilai-nilai dan norma-norma agama yang dijabarkan dalam berbagai aktivitas sehari-hari dalam kehidupan masyarakat secara utuh (kaffah). Pandangannya itu berpengaruh kuat terhadap peranan mereka dalam pembangunan masyarakat desa.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Ilahi Robbi Allah Swt, karena berkah rahmat dan karunia-Nya lah, proses penelitian dan laporannya dapat diselesaikan meski hasilnya masih jauh dari memuaskan.

Penulisan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dimana ada kewajiban dosen untuk melakukan penelitian sebagai bagian dari pengembangan ilmu dan bahan ajar. Selain landasan hukum berupa tugas utama Dosen tersebut, faktor lain yang menjadi alasan mengapa penelitian ini sangat penting adalah fakta bahwa pengembangan ilmu di kalangan umat Islam tidak bersambungan secara estafet dengan baik.

Kajian dan penulisan tentang perana ulama dari sudut pandang filosofis sangat lah kaya dan ragam. Sebagai objek material, peranan ulama di kalangan umat Islam utamanya memiliki sejumlah problem filosofis yang menarik dikaji dan diteliti.

Apalagi masih kuatnya pertarungan ideologis antara ulama satu dengan yang lainnya. Bagi sebagian kalangan, ulama hanya berperan pada bidang agama saja yang tidak perlu terjun pada bidang umum. Bahkan ada yang mengharamkannya. Di sisi lain, fakta bahwa umat Islam mengalami ketertinggalan dari sisi pembangunan fisik sarana dan prasarana. Plus dilema aksiologi peran dan fungsi ulama dalam dunia pembangunan dewasa ini. Sebagai jawabannya, Universitas Islam negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung kini mengembangkan paradigma wahyu memandu ilmu. Tentu saja, seluruh mata kuliah yang disajikan harus berdasarkan kepada paradigma wahyu memandu ilmu. Idealnya mata kuliah itu berbasis hasil riset. Disinilah pentingnya riset ini sebagai dasar awal, penyusunan pondasi kebijakan lebih lanjut.

Dalam kesempatan ini tak lupa pula untuk menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Deddy Ismatullah, SH., M.Hum. selaku rektor UIN Bandung, sebagai atasan penulis;
2. Bapak Dr. Deden Effendi, M.Ag. Sebagai ketua lembaga penelitian UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang telah memberi arahan untuk kegiatan penelitian ini;
3. Bapak Dr. Deni Miharja, M.Ag dan dosen jurusan Aqidah Filsafat.

Akhirnya penulis mengharapkan masukan dan kritikan dari pembaca sekalian untuk perbaikan hasil penelitian ini. Semoga laporan penelitian ini bermanfaat dan menjadi amal ibadah penulis dalam rangka pengembangan ilmu ke depannya.

Billahitaufiq wal hidayah

Bandung, Oktober 2013
Penulis,

Didin Komarudin, M.Ag
NIP. 197605162005011003

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Kegunaan Penelitian	10
1.5. Kerangka Penelitian	10
1.6. Hipotesis	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	45
2.1. Konsep Pembangunan Masyarakat Desa	24
2.2. Konsep Ulama	37
2.3. Peran dan Fungsi Ulama	40
BAB III KEADAAN UMUM KECAMATAN CIKANCUNG, KABUPATEN BANDUNG	50
3.1. Keadaan Wilayah Penelitian	50
3.1.1. Letak Wilayah dan Keadaan Giografis	50

3.1.2. Penduduk	52
3.2. Kepemimpinan Masyarakat	58
3.2.1. Satuan Sosial	58
3.2.2. Jenis Kepemimpinan	61
3.3. Kegiatan Pembangunan	65
3.3.1 Bidang dan Sektor Pembangunan	65
3.3.2. Jalur-jalur Pembangunan	72
3.3.3. Dana Pembangunan	76
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	79
4.1. Identitas Responden	79
4.1.1 Usia, Pendidikan dan Pekerjaan	79
4.1.2. Ulama Sebagai Pemimpin	85
4.2. Pemikiran Ulama Mengenai Pembangunan	91
4.3. Peranan Pemikiran Ulama dalam Pembangunan	101
BAB V PENUTUP	129
5.1. Kesimpulan	129
5.2. Saran	130
DAFTAR PUSTAKA	132
LAMPIRAN	139

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, ciri yang menonjol dalam kehidupan masyarakat berkembang ialah keterkaitan dan orientasi masyarakat terhadap dan terpusat pada pembangunan. Gejala ini jelas menonjol, karena masyarakat itu tidak lagi dipandang sebagai obyek pembangunan tetapi juga sebagai subyek pembangunan.

Ponsioen (1968) dan Goulet (1977) mengemukakan, bahwa pembangunan merupakan semacam bentuk perubahan sosial yang tidak hanya menyangkut pembangunan ekonomi saja, melainkan menyangkut segenap aspek kehidupan bangsa. Sedangkan Siagian (1974), menjelaskan bahwa pembangunan sebagai suatu rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembangunan bangsa (*nation building*). Sebagai upaya pembangunan bangsa, pembangunan meliputi segala kehidupan bangsa, ekonomi politik, sosial, kebudayaan, pertahanan atau keamanan, dan hubungan antar bangsa. Penjelasan Siagian itu sejalan dengan pandangan Christensen dan Robinson (1980), yang melihat pembangunan sebagai suatu proses perbaikan, pertumbuhan, dan perubahan. Dengan demikian pembangunan berarti usaha mewujudkan ideologi dalam bentuk perbuatan nyata untuk merubah susunan ekonomi dan pola-pola normatif suatu masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang dikehendaki (Adiwikarta, 1984).

Di lihat dari segi proses, pembangunan selain sebagai tujuan yang hendak dicapai (*terminal condition*), juga dapat dianggap sebagai prasyarat atau masukan pembangunan itu sendiri (Ndraha, 1986:7). Dalam hubungan ini, pembangunan berarti meningkatkan kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa depannya. Karena itu, pembangunan menyangkut tindakan (*doing*) dan kemampuan (*being*) (Bryant dan White, dalam Ndraha, 1986:28).

Pembangunan sebagai peningkatan kemampuan untuk mengendalikan masa depan, mengandung implikasi-implikasi akan kemampuan (*capacity*), kebersamaan (*equity*), kekuasaan (*empowerment*), kemandirian (*sustainability*), dan ketergantungan (*interdependence*) (Ndraha, 1986:29). Dengan demikian pembangunan berkaitan dengan sistem peranan yang diabstraksikan dari organisasi-organisasi yang nyata

dalam masyarakat (sistem sosial), dan perubahan struktur dan fungsi sistem sosial (perubahan sosial).

Dalam konteks dunia ketiga, pembangunan merupakan semacam bentuk perubahan sosial yang dikendalikan (induced social change), dengan harapan tidak hanya mencapai tingkat kelompok, melainkan juga bisa mencapai tingkat anggota masyarakat secara individual (Ponsioen, 1968). Pembangunan dipandang sebagai cara terbaik untuk mengatasi keterbelakangan, kemiskinan, dan kehancuran, baik sebagai akibat keadaan, penjajahan, maupun karena perang. Bagi Indonesia, pembangunan merupakan amanat konstitusi, sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan UUD 1945, bahwa tujuan pembangunan negara Indonesia adalah : "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,...". Pembangunan nasional dimaksud itu sampai dengan tahun 1949 belum sempat dilaksanakan, karena perhatian bangsa Indonesia masih terpusat pada perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

Pembangunan masyarakat desa, sebagai bagian dari pembangunan nasional telah mendapat perhatian sejak pemerintahan republik Indonesia kembali menjadi negara kesatuan (17 Agustus 1950). Dalam undang-undang nomor 85 tahun 1958 tentang pembangunan lima tahun 1956-1960 ditegaskan bahwa pembangunan masyarakat desa (PMD), merupakan salah satu diantara 19 bidang pembangunan yang harus dilaksanakan, walaupun secara bertahap dan ditetapkan secara selektif pada beberapa propinsi sebagai daerah kerja pembangunan masyarakat desa (DK PMD). Demikianlah pula pada masa pemerintahan setelah kembali ke UUD 1945 (5 Juli 1959). Dalam pola pembangunan nasional semesta berencana tahapan pertama 1960-1969 ditegaskan bahwa pembangunan masyarakat desa (PMD), walaupun tidak merupakan bidang tersendiri (masuk dalam bidang pemerintahan), merupakan bagian yang harus dilaksanakan dari 8 bidang pembangunan yang direncanakan.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, pembangunan masyarakat desa juga mendapat perhatian utama. Dalam repelita I ditetapkan bahwa pembangunan masyarakat desa diarahkan pada usaha-usaha perubahan sikap mental masyarakat desa, peningkatan bekal pengetahuan dan keterampilan mereka, dan peningkatan peranan lembaga lembaga desa¹.

¹ Mekanisme usaha tersebut diatur di dalam Bab IV bagian B Repelita I sebagai berikut: Pembangunan desa dilaksanakan dalam rangka imbalan kewajiban sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat desa. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana, memberikan bimbingan dan pengawasan, sedangkan selebihnya disandarkan pada kemampuan masyarakat desa itu sendiri (repelit I).

Semua itu dilakukan pada usaha meletakkan dasar bagi perkembangan maupun pertumbuhan ekonomi nasional yang sehat untuk masa yang akan datang.

Dalam pembangunan Lima Tahun II, sasaran utama pembangunan desa ialah tercapainya landasan yang kuat bagi masyarakat desa untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatannya sendiri. Sedangkan dalam pembangunan lima tahun III, secara eksplisit ditegaskan pentingnya partisipasi aktif yang semakin meluas dan merata disegala lapisan masyarakat, baik dalam memikul beban pembangunan maupun dalam pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan atau dalam menerima kembali hasil pembangunan (Bab III b angka 5 GBHN 1988). Hal tersebut, merupakan asas bagi usaha pemerataan pembangunan di seluruh pedesaan. Disamping itu, peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat juga merupakan sasaran utama pembangunan. Pembangunan desa mencakup keseluruhan aspek kehidupan masyarakat desa, terdiri atas berbagai sektor dan program yang saling berkaitan. Seperti pada pembangunan lima tahun III, sasaran utama pembangunan masyarakat desa pada pembangunan lima tahun IV ditekankan pada usaha meningkatkan prakarsa dan swadaya masyarakat desa serta memanfaatkan secara maksimal dana-dana yang langsung maupun tidak langsung bagi pembangunan pedesaan. Pada pembangunan lima tahun V, pembangunan masyarakat desa terus ditingkatkan terutama melalui pengembangan kemampuan sumberdaya masyarakat pedesaan (Bab IV B angka 12 f, GBHN).

Uraian tersebut memberikan gambaran bahwa pembangunan masyarakat desa di Indonesia diarahkan pada tiga sasaran atau hasil yang diharapkan, yaitu: (1) membaiknya kondisi dan meningkatnya taraf hidup masyarakat desa; (2) tergeraknya partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan; dan (3) tumbuhnya kemampuan desa untuk berkembang secara mandiri. Gambaran lain menunjukkan, bahwa pembangunan masyarakat desa merupakan perpaduan usaha-usaha masyarakat dan kewenangan pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang bersangkutan. Masyarakat berprakarsa, pemerintah memberikan bantuan dan bimbingan. Kenyataan ini menunjukkan bahwa pembangunan masyarakat desa seperti dijelaskan Tjokrowinoto (1977), disatu pihak menghendaki kesadaran dan keikutsertaan masyarakat di dalam proses masukan, sebagai altikulatur dari aspirasi-aspirasi yang tumbuh dan hidup di kalangan masyarakat dan ikut serta menentukan arah pembangunan, di lain pihak pemerintah berperan dalam menarik partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Prinsip imbalan kewajiban yang serasi antara pemerintah dan masyarakat ini, secara serentak akan menghasilkan interaksi sosial atau suatu hubungan timbal balik yang

saling mempengaruhi, mengubah atau memperbaiki kelakuan satu dengan yang lainnya (Soeparno, 1977: 54).

Dengan demikian penyelenggaraan pembangunan masyarakat desa dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur bawah dan jalur atas (Nordholt, 1987). Pembangunan jalur bawah berasal dari prakarsa masyarakat desa untuk mewujudkan pengembangan swadaya masyarakat itu sendiri. Pembangunan jalur atas berasal dari rencana pemerintah “atas desa” yaitu pemerintah pusat dan daerah, dalam usaha membentuk dan mengarahkan peningkatan taraf hidup masyarakat desa. Usaha tersebut mengacu pada rencana pembangunan secara makro, yaitu pembangunan nasional atau pembangunan daerah.

Walaupun pembangunan jalur bawah dan atas memiliki kesamaan tujuan yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat desa, namun arah kedua jalur itu, yang tercermin dalam pemilihan prioritas bidang pembangunan, tidak selalu berjalan seiring. Dari suatu studi dipedesaan yang dilakukan oleh Tim LPSP-IPB tahun 1973 (1973: IV-4), berdasarkan tyelaah atas pola pengeluaran pemerintah desa di sejumlah desa kasus di lapangan propinsi, ditarik kesimpulan bahwa pembangunan jalur bawah relatif di prioritaskan pada bidang sosial budaya terutama pembangunan keagamaan dan kesejahteraan, sedangkan pembangunan jalur atas, lebih diprioritaskan pada bidang ekonomi, terutama sektor pertanian. Hal serupa ditemukan oleh Tjondronegoro (1984: 223) di dua kecamatan di Jawa Barat dan Jawa Tengah, bahwa pembangunan jalur bawah dudaya, khususnya pembangunan keagamaan dan pendidikan.

Perbedaan penentuan prioritas bidang pembangunan itu ditandai oleh perbedaan alokasi dana dan partisipasi antara masyarakat dan pemerintah. Pengarahan dan partisipasi masyarakat desa lebih ditujukan untuk pembangunan bidang sosial budaya daripada untuk bidang ekonomi. Sebaliknya, bantuan dana yang diberikan pemerintah untuk pembanguan ekonomi lebih besar daripada untuk bidang sosial budaya. Perbedaan tersebut antara lain sebagai akibat perbedaan pandangan tentang pembangunan masyarakat desa antara pemimpin masyarakat dengan pemerintah (Tim LDS-IPB, 1973: VIII-1). Kebutuhan pemerintah tidak selalu dipandang dan dirasakan sebagai kebutuhan masyarakat desa, demikian pula sebaliknya (Raharjo, 1985: 78). Sehubungan dengan hal tersebut, Wiryanto dan Wehner (1973) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat terhadap berbagai kegiatan pembangunan akan mudah diwujudkan apabila masyarakat dapat merasakan adanya amnfaat dari hasil pembangunan itu bagi pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Ulama, sebagai pemimpin agama dan sebagai salah satu unsur pemimpin masyarakat desa, berpengaruh dan berperan dalam pembangunan masyarakat desa. Dukungan dan prakarsa mereka terhadap

pembangunan jalur bawah, terutama di Jawa Barat cukup menonjol (Tim LPSP-IPB, 1973: IV-1). Di daerah kabupaten Bekasi misalnya, terdapat Koperasi Unit Desa Bekasi jaya Unit V Majelis Ta'lim Arrohmah kelurahan Margahayu Bekasi yang diprakarsai ulama setempat yang mendapat status sebagai badan hukum, sejak berdirinya tahun 1980 terus berkembang sampai sekarang (Kuntowjyo, 1985: 5). Ulama Cipasung Kecamatan Singaparna, Kabupaten DT II Tasikmalaya telah memprakarsai serta membangun instalasi penjernihan air dan perlindungan mata air, sebagai kebutuhan seluruh warga Cipasung dan masyarakat desa setempat (Kenangan Peringatan haul KH. Ruchiyat, 1979: 15).

Dukungan dan peran serta ulama dalam pembangunan jalur atas juga cukup menonjol dan dibutuhkan. Pemerintah menjalin kerjasama dengan ulama agar pembangunan yang telah direncanakan berhasil dicapai (Kana, 1973: 77). Misalnya untuk memajukan koperasi di lingkungan pesantren dan lembaga keagamaan lainnya, tahun 1985 telah dikeluarkan surat keputusan bersama (SKB) Menteri Koperasi, Menteri Agama, dan Majelis Ulama Indonesia². Dalam kegiatan Keluarga Berencana (KB), mulailah dari priode perumusan program, priode perkembangan program, dan priode alih peran menuju "Keluarga berencana mandiri", Ulama dilibatkan dan telah memberikan kontribusinya pada keberhasilan Keluarga berencana. Misalnya pada tanggal 26-29 Mei 1972 Majelis Ulama Indonesia telah melakukan musyawarah di Jakarta yang menghasilkan keputusan sebagai fatwa, yang menjadi pedoman umat Islam dalam melaksanakan keluarga berencana.³

Berdasarkan hasil studi pendahuluan, Kecamatan Cikancung Kabupaten DT II Bandung, pada saat ini sedang giat-giatnya melakukan pembangunan. Ulama di kecamatan ini nampak dapat melaksanakan peranannya baik dalam pembangunan jalur bawah, maupun jalur atas. Mereka turut terlibat dalam berbagai sektor pembangunan masyarakat desa. Namun sejauh ini belum diketahui bidang atau sektor-sektor pembangunan masyarakat desa manakah yang menjadi sasaran spesipik atau prioritas program ulama dilokasi tersebut. Selain itu pula perlu diteliti sejauh mana keterlibatan peranan ulama dalam proses pembangunan masyarakat desa di kecamatan Cikancung, apakah setiap potensi yang mereka miliki dapat disalurkan atau tidak, seperti halnya berbagai peranan ulama yang seharusnya dilaksanakan.

Ulama, mempunyai potensi dalam mensukseskan keberhasilan pembangunan antara lain sebagai penasehat (Ali, 1978; 113), sebagai

² Majalah PIP Pusat Informasi Perkoperasian, Dewan Koperasi Indonesia, No. 72 Th. VII, Mei 1987.

³ Biro Penerangan dan Motivasi, Unit KB Departemen Agama, Mei 1976.

artikulator dan katalisator (Moeljarto, 1977), sebagai patron masyarakat (Horikosi, 1987: 244), sebagai mediator ataupun cultural brokers (Geertz 1960, Madelbaum 1960, Maher 1961, Press 1969, Ioffler 1971, Horikosi 1987). Sesuai dengan statusnya, peran mereka sebagai mediator atau cultural brokers misalnya, telah memperkenalkan butir-butir budaya maju pada masyarakat, dan menggerakkan perubahan. Teknologi pertanian, pemupukan dan penanaman bibit baru dan dapat diterima oleh masyarakat setelah ulama mencoba dan membuahkan hasil yang baik (Horikosi, 1987: 245). Ulama telah memberikan nilai-nilai kebersamaan dan cita-cita keutamaan, dan secara kejiwaan mengarahkan dan mengatur tingkah laku hidup masyarakatnya (Horikosi, 1987: 244). Karena ikatan tradisional dan banyak hubungan pribadi, ulama kuat terpadu dalam situasi sosial lingkungan, dan berpengaruh langsung terhadap pembentukan prakarsa pedesaan (Ziemiek, 1986: 191), juga dalam proses pengambilan keputusan desa dan mobilisasi masyarakat desa (Nasution, 1977: 44).

Status dan peranan dalam sosiologi dapat dijelaskan bahwa status menurut Laurence Ross (dalam Susanto, 1977: 44), adalah kedudukan seseorang yang dapat ditinjau terlepas dari individunya. Status di sini merupakan kedudukan obyektif yang memberi hak dan kewajiban kepada seseorang yang menempati suatu kedudukan. Peranan (role) dimaksudkan sebagai dinamika status, atau penggunaan hak dan kewajiban atau disebut pula sebagai status obyektif; karena, kepada seseorang. Sedangkan (Cohen 1983: 77) menjelaskan bahwa peranan adalah suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu. Lebih jauh Horton dan Hunt (1987: 118) menandakan, bahwa setiap orang mungkin mempunyai sejumlah status dan diharapkan mengisi peran yang sesuai dengan status tersebut. Dalam arti tertentu, status dan peran adalah dua aspek gejala yang sama. Status adalah perangkat hak dan kewajiban, peran adalah pemeranan dari perangkat kewajiban dan hak-hak tersebut.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, masalah yang diajukan adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana peranan pemikiran ulama di Kecamatan Cikancung Kabupaten DT II Bandung dalam pembangunan masyarakat desa, dan bidang pembangunan manakah yang diprioritaskan mereka.
- 2) Apakah peranan pemikiran ulama dalam pembangunan masyarakat desa di Kecamatan Cikancung Kabupaten DT II Bandung dipengaruhi oleh pemikirannya mengenai pembangunan..

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui peranan pemikiran ulama di Kecamatan Cikancung Kabupaten DT II Bandung dalam pembangunan masyarakat dan bidang pembangunan yang diprioritaskan mereka.
- 2) Untuk mengetahui apakah peranan pemikiran ulama di Kecamatan Cikancung Kabupaten DT II Bandung dalam pembangunan masyarakat desa di pengaruhi oleh pamikirannya mengenai pembangunan.

1.4. Kegunaan Penelitian

Bertolak dari masalah dan tujuan penelitian tersebut penelitian ini diharapkan dapat berguna:

- 1) Sebagai tambahan khasanah informasi, khususnya dalam pengkajian mengenai golongan masyarakat atau kelompok sosial di pedesaan yang merupakan salah satu sasaran kajian sosiologi.
- 2) Sebagai bahan masukan untuk pertimbangan pengambilan keputusan dalam upaya pembangunan peran serta masyarakat dalam pembangunan masyarakat desa secara berencana.
- 3) Sebagai bahan masukan untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama ataupun yang ada kaitannya dengan pembangunan masyarakat desa.

1.5. Kerangka Pemikiran

Seperti yang telah dijelaskan sebelum ini, pembangunan pada prinsipnya merupakan perubahan yang diusahakan secara berencana dalam rangka perbaikan dan pertumbuhan. Menurut Tjondronegoro (1978: 19), pembangunan itu mencakup perubahan kebudayaan material dan bentuk organisasi masyarakat. Perubahan yang terjadi, menurut Mc Iver dan Page (1949: 523)) berhubungan dengan diferensiasi dalam masyarakat, baik struktural maupun fungsional. Karena itu, pembangunan melahirkan lapisan-lapisan baru dan golongan-golongan fungsional baru dalam kehidupan masyarakat (Schoori, 1988: 104). Tentang perbaikan, pertumbuhan, dan perubahan, lebih jauh dijelaskan Adiwikarta (1984: 30):

..., "Perbaikan" adalah peningkatan keadilan dalam distribusi benda-benda sosial seperti fasilitas pendidikan, perumahan, pelayanan kesehatan, lapangan kerja, kesempatan untuk turut serta dalam pengambilan

keputusan politik dan lain-lain di antara warga masyarakat. “Pertumbuhan” berarti peningkatan taraf hidup atau kemakmuran masyarakat melalui alih teknologi dan perubahan sistem kehidupan ekonomi, misalnya dari ekonomi bersandar pada pertanian menjadi ekonomi industri. Dalam arti “Perubahan”, pembangunan merupakan salah satu tipe perubahan sosial, yaitu yang direncanakan dan diarahkan (*planned or directed*). Jadi pembangunan berarti usaha mewujudkan suatu ideologi dalam bentuk perbuatan nyata untuk mengubah susunan ekonomi dan pola-pola normatif suatu masyarakat dalam rangka mencapai tujuan...”.

Pembangunan masyarakat desa, yang di dalam literatur dikenal dengan istilah *Community Development* pada dasarnya merupakan suatu perubahan dalam arti usaha perbaikan kehidupan masyarakat desa (Hofstede, 1980: 120). United Nations (1963: 4), mendefinisikan pembangunan masyarakat desa sebagai usaha perbaikan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat, yang dilakukan oleh masyarakat yang bersangkutan, dan dibantu oleh pemerintah. Dengan demikian perubahan itu tidak semata dari luar. Oleh karenanya, dalam konteks kehidupan masyarakat-bangsa, pembangunan masyarakat desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. (*reprt of The Asean Consultative Meeting of Experts on Community Development, Jakarta, 1976; Chekki, 1979: 3*). Menurut Ismawan (1985), pembangunan masyarakat desa didasarkan atas dua masalah utama, yaitu kemiskinan dan keterbelakangan. Kenyataan itu mendorong perkembangan pendekatan baru yang disebut pembangunan masyarakat desa terpadu (*Integrated rural development*), karena kemiskinan tidak dapat diberantas hanya oleh dan dengan peningkatan produksi pertanian, dan perbaikan kehidupan ekonomi, kemiskinan itu bersifat struktural. Dengan demikian pembangunan masyarakat desa mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan bersifat komprehensif (Chekki, 1979: 18; Freadman, 1981: 233).

Menurut Sanders (dalam Ndraha, 1986: 328), pembangunan masyarakat desa dapat dipandang sebagai proses, sebagai metode, sebagai program, dan sebagai gerakan sosial.

Pembangunan masyarakat desa dilihat sebagai proses, merupakan proses perubahan yang bertahap menuju masyarakat mandiri yang mampu menentukan nasibnya sendiri dan menempuh berbagai upaya bersama untuk mencapainya. Dengan kata lain, merupakan serentetan perubahan dari sesuatu keadaan kearah keadaan berikutnya yang dilewati melalui pelbagai tahapan. Titik berat dari dimensi proses ini yaitu pada tujuan dan cara pembangunan. Karena itu yang dipentingkan adalah apa yang terjadi pada orang secara sosial dan psikologis.

Pembangunan masyarakat desa dilihat sebagai metode merupakan cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan, sehingga kehendak pemakai metode tersebut menjadi kenyataan. Titik berat dari dimensi metode ini adalah pada caranya mencapai tujuan.

Pembangunan masyarakat desa dilihat sebagai metode merupakan cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan, sehingga kehendak pemakai metode tersebut menjadi kenyataan. Titik berat dari dimensi metode ini adalah pada caranya mencapai tujuan.

Pembangunan masyarakat desa dilihat sebagai program, bahwa pembangunan itu merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, terdiri atas isi dan metode. Metode dirumuskan sebagai kumpulan prosedur, sedangkan isi program berupa daftar kegiatan. Titik berat pada dimensi ini adalah pada pencapaian tujuan organisasi dalam bentuk kegiatan-kegiatan.

Pembangunan masyarakat desa sebagai gerakan sosial, merupakan upaya untuk mewujudkan suatu ideologi (bagi Indonesia Pancasila). Titik berat dari dimensi ini adalah pada tujuan dan cara mewujudkan suatu cita-cita yang kehendak dicapai oleh suatu bangsa.

Berdasarkan gambaran serta masalah utama yang dihadapi dalam pembangunan masyarakat desa, Ismawan (1985:4) menjelaskan terdapat beberapa teori dan pendekatan dalam pembangunan itu, antara lain teori perembesan ke bawah (the trickle down theory), pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach), dan pembangunan dari dalam (development from within). "Teori perembesan ke bawah", dititikberatkan pada percepatan pembangunan melalui program-program pembangunan yang berpusat pada pertumbuhan ekonomi. Hasilnya selain dinikmati oleh mereka yang secara langsung terkena sasaran program tersebut, juga diharapkan dapat merembes kepada masyarakat yang lebih luas. "Pendekatan kebutuhan pokok", didasari oleh suatu paket kebijaksanaan yang mengusahakan laju pertumbuhan, pemerataan pendapatan, dan pengaturan kembali pola-pola produksi dan konsumsi. Pendekatan itu meliputi usaha penanggulangan masalah sandang, pangan, kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Hal ini dilakukan antara lain melalui penyediaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan program keluarga berencana. Adapun "pembangunan dari dalam" merupakan upaya pengembangan kepercayaan dan kemampuan masyarakat itu sendiri untuk mengorganisasikan diri dan membangun, sesuai dengan tujuan yang mereka kehendaki. Usaha ini dilakukan dalam kelompok swadaya, yang hidup sedemikian rupa sehingga interaksi di antara individu merupakan proses pendidikan untuk bertindak (education for action process) (Nelson dan Ramsey, 1960). Melalui proses tersebut diharapkan anggota

komunitas memperoleh kemampuan untuk berotonomi lokal.

Dengan demikian sasaran pembangunan masyarakat desa diarahkan pada tiga hasil yang diharapkan yaitu: (1) membaiknya kondisi dan meningkatnya taraf hidup masyarakat desa; (2) tergeraknya partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan; (3) tumbuhnya kemampuan desa untuk berkembang secara mandiri (Ndraha, 1986: 4.12). Ketiga sasaran pembangunan itu tidak berdiri sendiri melainkan terpadu sebagai sebuah paket usaha. Kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri berkolerasi positif dengan kemampuannya untuk berpartisipasi dan dengan kemampuannya untuk meningkatkan taraf hidupnya sendiri (Mubyarto, 1984: 36).

Teori dan pendekatan tersebut sejalan dengan model yang diajukan para pengikut "teori sistem". Model teori sistem, dilandasi asumsi bahwa aspek-aspek kehidupan mempunyai hubungan fungsional yang sistemik. Karenanya perubahan pada satu aspek akan menimbulkan guncangan pada keseimbangan sistem. Persoalan yang dihadapi adalah bagaimana cara menciptakan dan memelihara keseimbangan dinamis itu. Untuk itu, pendekatan yang disarankan adalah pembangunan terpadu (integrated development), dimana setiap proyek atau peristiwa pembangunan dilaksanakan terintegrasi dalam pembangunan wilayah secara komprehensif.

Telah dijelaskan di muka bahwa pembangunan masyarakat desa dapat dipandang sebagai program, yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dengan titik berat pada pencapaian tujuan organisasi dalam bentuk kegiatan-kegiatan atau peristiwa-peristiwa sosial. Dengan demikian merupakan perwujudan interaksi antara masyarakat desa dengan penguasa negara-bangsa (pemerintah). Kegiatan-kegiatan atau peristiwa-peristiwa sosial itu secara operasional berupa program-program yang terorganisasi, yang dirinci menjadi proyek-proyek atau peristiwa-peristiwa pembangunan dengan tujuan yang spesifik, dan dibatasi oleh ruang dan waktu tertentu. Menurut Tjokroamidjojo (1974: 196), ciri umum suatu proyek pembangunan antara lain: (1) proyek lebih menekankan kepada tujuan yang lebih dekat dalam periode yang relatif lebih singkat dan berorientasi pada kegiatan (action oriented); (2) kegiatan usaha untuk mencapai tujuan proyek tidak berlaku terus menerus (non repetative) dan tidak dapat dilakukan melalui kegiatan rutin.

Sebagai kegiatan dari suatu usaha pembangunan yang berencana dan menyeluruh, proyek pembangunan itu didukung oleh unsur manusia dan unsur bukan manusia (Baratha, 1982: 92). Unsur-unsur manusia meliputi: pemrakarsa pembangunan, pengelola pembangunan dan partisipan pembangunan.

Sedangkan unsur bukan manusia meliputi: ruang lingkup pembangunan, bidang-bidang pembangunan, manfaat pembangunan, biaya pembangunan, jangka waktu pembangunan, dan lokasi pembangunan.

Dalam pembangunan masyarakat desa di Indonesia, pemerintah dengan kebijaksanaan dan program-programnya memegang kunci dan peranan yang sangat menentukan (Mubyarto, Soetrisno, Dove, 1984: 9). Oleh karena itu prakarsa pembangunan pertama-tama datang dari pemerintah, dari atas ke bawah (top down) atau jalur atas. Untuk mengatasi berbagai akses dan akibat negatif yang ditimbulkannya, Friedman (1981), menyarankan agar pembangunan desa harus dibimbing secara sentral tapi berlandaskan pada kondisi setempat. Bimbingan dari atas bisa efektif jika di desa ada “kelompok” yang mampu menerima, menyerap, menterjemahkan, dan menanggapi bimbingan tersebut. “Kelompok” tersebut juga harus mampu berbicara untuk dan atas nama masyarakat setempat. Dengan demikian “kelompok” itu berada pada posisi yang mewakili masyarakat.

Pemrakarsa pembangunan masyarakat desa juga bisa datang dari masyarakat setempat (bottom up). Melalui mekanisme dari bawah ke atas ini (jalur bawah), masyarakat sebagai potensi desa setempat dapat mengemukakan dan menyalurkan aspirasi, menumbuhkan rasa tanggung jawab serta rasa wajib untuk mengusahakan kepentingan bersama.

Titik temu prakarsa pembangunan dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas itu (top down and bottom up strategis), akan menyebabkan terjadinya tawar menawar, permufakatan, atau kompromi (Bryant dan White, 1982: 210) antara pemerintah dengan masyarakat dalam bentuk proyek atau peristiwa pembangunan yang akan dilaksanakan. Dengan demikian bentuk proyek atau peristiwa pembangunan yang dilaksanakan selain: (1) yang dilaksanakan oleh aparat pemerintah dan; (2) yang dilaksanakan atas prakarsa masyarakat sendiri (swadaya murni), juga ada; (3) proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah atas “usulan” masyarakat; dan (4) proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat dengan mendapat bantuan dari pemerintah (swadaya inpres).

Pengelolaan keempat “model” pembangunan itu, baik pada tingkat desa maupun pada satuan masyarakat yang lebih kecil dari desa, di samping pada yang dilakukan oleh pemerintah juga dilakukan oleh lembaga atau masyarakat setempat sebagai satuan pengelola pembangunan, seperti lembaga ketahanan masyarakat desa (LKMD), Dewan Keluarga Masjid (DKM), Pesantren, ataupun oleh kepanitiaan yang sengaja dibentuk. Hasil penelitian Mubyarto (1984: 49) di beberapa daerah pedesaan menunjukkan bahwa pengelolaan pembangunan yang dilakukan melalui organisasi yang sudah dikenal atau

yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat, akan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat bersangkutan, dan terjaminnya adanya kontrol yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Blau (dalam Johnson, 1986: 77) menjelaskan bahwa, semakin banyak manfaat yang diduga akan diperoleh suatu pihak dari pihak lain melalui kegiatan tertentu, semakin kuat pihak itu akan terlibat dalam kegiatan itu. Pada gilirannya keterlibatan masyarakat sebagai masukan pembangunan dapat meningkatkan usaha perbaikan kondisi dan taraf hidup masyarakat desa yang bersangkutan.

Kemampuan masyarakat untuk berkembang mandiri berkorelasi positif dengan kemampuan untuk berpartisipasi (Mubyarto, 1984: 36). Dari pernyataan itu jelas bahwa partisipasi merupakan salah satu unsur pokok (basic element) dalam pelaksanaan program pembangunan masyarakat desa. Karena pada dasarnya pembangunan masyarakat desa itu menciptakan kondisi yang memungkinkan terwujudnya partisipasi masyarakat untuk membangun lingkungan mereka (Yakub 1985: 19).

Partisipasi, menurut White (dalam Sastropetro, 1986: 32) adalah keterlibatan komunitas setempat secara aktif dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan proyek-proyek pembangunan. Sedangkan menurut Mubyarto (1984: 35), sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Di lain pihak Davis (1979: 40) mengartikan partisipasi sebagai keterlibatan mental dan emosi orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk memberikan sumbangan usaha pencapaian tujuan kelompok dan bersama-sama bertanggung jawab terhadapnya.

Dari beberapa definisi itu dapat disimpulkan bahwa partisipasi sebagai unsur pokok (basic element) dari pelaksanaan pembangunan mengandung tiga gagasan pokok yakni: (1) peran serta tidak semata-mata keterlibatan jasmaniah saja, melainkan lebih menitikberatkan pada keterlibatan mental dan emosi; (2) tergeraknya kesediaan untuk memberikan kontribusi kepada usaha pencapaian tujuan pembangunan tanpa mengorbankan diri sendiri; dan (3) bangkitnya kesediaan untuk turut bertanggung jawab sebagai anggota kelompok. Dalam ketiga gagasan pokok itu, terkandung unsur-unsur; (1) Peserta partisipasi atau pelaku partisipasi; (2) keterlibatannya dalam proses pembangunan; dan (3) tingkat kesukrelaannya untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Tentang partisipan pembangunan menunjuk kepada siapa peserta atau pelaku partisipasi. Menurut Cohen dan Uphoff (dalam Ndraha, 1986:4.27) partisipasi pembangunan meliputi berbagai golongan dan lapisan masyarakat setempat, pejabat pemerintahan, wakil-wakil masyarakat yang dipilih, dan bahkan orang luar. Partisipan dari

masyarakat setempat antara lain para ulama. Selaku pemuka agama, mereka adalah salah satu golongan pemimpin di lingkungan masyarakat desa, di samping aparat pemerintahan desa dan tokoh-tokoh desa lainnya. Pemimpin, di dalam struktur sosial berfungsi menguasai, mengatur, dan mengawasi agar tujuan kolektif dapat dicapai (Kartodirdjo, 1986 : VI). Fungsi itu di samping ditentukan oleh struktur sosialnya, juga ditentukan oleh situasi dan tugas-tugas kelompok tersebut. Karena itu, pemimpin memegang peranan penting dalam membentuk tujuan, ideologi, struktur dan aktivitas kelompok (Krech, 1962 :133).

Ulama, karena wibawa dan kemampuannya menjadi penggerak, memiliki karakteristik dan keunggulannya tertentu serta disegani dan dituruti, sering dikatakan sebagai pemimpin informal (Riberu, 1978 : 6).

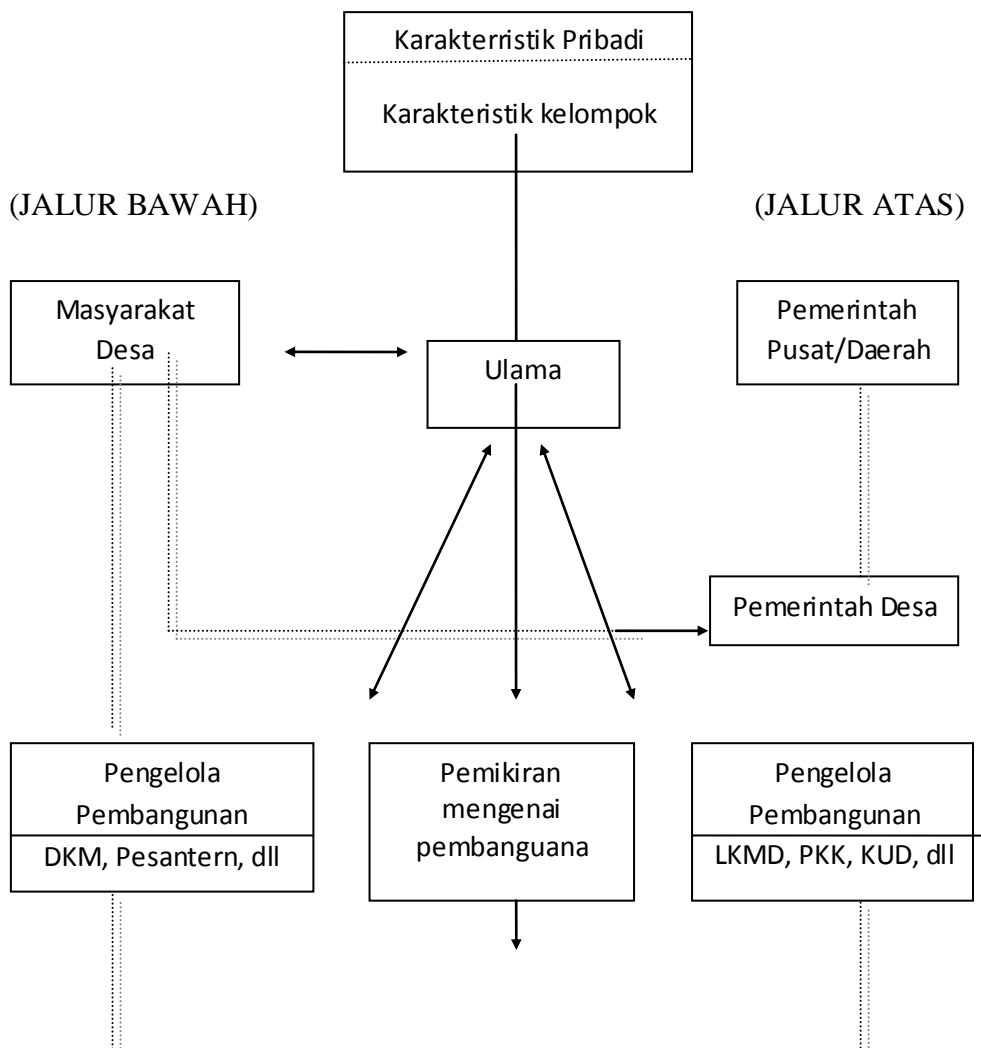
Karakteristik pemimpin dan tipe kepemimpinan yang ditampilkannya, merefleksikan berbagai tujuan dan norma kelompok serta kepribadiannya sendiri (Krech, 1962; 138). Dengan kata lain, karakteristik pribadi pemimpin berhubungan erat dengan prilakunya di dalam kelompok. Haplin dan Winer (1987), mengemukakan bahwa pada pokoknya perilaku pemimpin dapat dibedakan ke dalam dua dimensi, yakni: (1) konsiderasi (consideration) yang bercirikan pemimpin yang memotivasi, memelihara keselarasan internal dan kepuasan anggota kelompok; (2) memulai dan mengarahkan (initiating and directing).

Karakteristik pribadi yang berpengaruh dalam kelompok adalah persepsi dan sikapnya, posisinya dalam kelompok dan lamanya dalam posisi itu (Morris dan Seeman, 1957: 513). Adapun karakteristik kelompok yang mempengaruhi perilaku pemimpin adalah, sifat kekuasaan yang diterapkan, orientasi tujuan dan kegiatan utama kelompok, sistem komunikasi yang diterapkan, dan situasi kelompok berkenaan dengan faktor intern dan ekstern. Oleh karena itu, keefektifan suatu kelompok sebagian ditentukan oleh hakekat interaksi antara para anggota masyarakat, gaya kepemimpinan, saling ketergantungan, motivasi, dan hubungan persahabatan (Krech, 1962: 153).

Mengacu pada pendapat-pendapat tersebut, maka peranan pemikiran ulama dalam pembangunan masyarakat desa, berhubungan dengan karakteristik pribadi mereka, dan berhubungan dengan pandangan mereka di dalam struktur masyarakat. Kaitan hubungan antara karakteristik ulama dengan peranan pemikiran mereka dalam pembangunan masyarakat desa, dan dengan pemrakarsa serta pengelola pembangunan, diperagakan dalam gambar 1.

Pemikiran ulama mengenai pembangunan berpedoman pada patokan penilaian yang dianutnya, berupa nilai-nilai sosial dan norma-norma sosial yang bersumber dari ajaran agama Islam. Patokan penilaian itu merupakan

tata kelakuan sebagai wujud ideal dari kebudayaan, yang mengatur, mengendalikan, dan mengarahkan kelakuan dan perbuatan manusia di dalam masyarakat (Koentjaraningrat, 1974). Dalam pengertian yang luas nilai-nilai itu merupakan suatu standar yang mengatur sistem perilaku, merupakan keutamaan (preference) yaitu suatu hal yang lebih disenangi (Klckhon, dalam Jing Chew Peh, 1985: 84) dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan norma-norma yang berhubungan dengan adat istiadat merupakan standar tingkah laku atau cara-cara bertindak yang dianggap wajar di dalam masyarakat (Jing Chew Peh, 1985: 86). Dengan kata lain, nilai-nilai maupun norma-norma yang bersumber dari ajaran agama Islam itu dimaksudkan sebagai pedoman yang mengharuskan “menyuruh kepada kebaikan dan mencegah pada kejelekan (amar ma’ruf nahi munkar), yang dijabarkan dalam berbagai aktivitas sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai ukuran normatif dalam melakukan penilaian dan pemilahan bidang-bidang pembangunan. Bidang pembangunan yang dianggap *ma’ruf* akan dipilih dan didukung, sedangkan bidang pembangunan yang dianggap *munkar* akan diabaikan bahkan ditentang.



Proyek/Pristiwa Pembangunan
Bidang politik, ekonomi, sosial –budya,
politik dan keamanan

Keterangan

-→ Jalur Pembangunan (Atas dan Bawah)
- Jalur peranan pemikiran Ulama dalam pembangunan
- ←———— Intraksi/Hubungan timbal balik Ulama dengan masyarakat, dan dengan pengelola pembangunan.

Gambar 1: Jalur pembangunan dan peranan pemikiran ulama dalam pembangunan masyarakat desa.

Adapun kedudukan ulama di dalam masyarakat, menempati kedudukan yang tinggi, karena memiliki keunggulan dalam hal ilmu agama, keluhuran akhlak dan kepemimpinan. Karena keunggulan itu ulama disegani dan dituruti oleh masyarakat. Mereka merupakan pewaris nabi (*warasat al-anbiya*), penyampai ajaran agama dalam kehidupan masyarakat, yang dengan berbagai seginya menampilkan aspek-aspek dinamis dari statusnya itu. Sebagai pemilik ilmu⁴, mereka merupakan pemegang otoritas keilmuan di tengah-tengah kehidupan manusia (Subhi, 1970: 758). Mereka juga pelaku *amar ma'ruf nahi munkar* yang berusaha mewujudkan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat (Wahid, 1981: 11). Dan menurut pandangan Girtz (1981: 173), mereka adalah kelompok elite kaum santri yang mengutamakan penerapan doktrin Islam dalam kehidupan masyarakat (Ali, 1974: 108).

Di samping itu, ulama merupakan cultural brokers, perantara budaya (Wolf, 1956), karena merekalah yang menjadi penjaga simpang yang sulit yang menghubungkan sistem lokal yang bercorak pedesaan dengan sistem yang lebih luas (Shiddiqi, 1984: 97). Sebagai cultural brokers, mereka telah memperkenalkan butir-butir budaya maju kepada masyarakatnya (Horikoshi, 1987: 245). Oleh karena itu bagi masyarakatnya, ulama

⁴ Pendapat ulama mufasir mengenai ilmu dan kaitannya dengan identitas ulama sebagai pemilik ilmu, yang dimaksud dengan ilmu didini adalah ilmu dalam arti yang komprehensif dan umum, yang pada tingkat kegunaannya harus membawa pemilikinya kepada kerendahan diri dihadapan-Nya, ketaatan kepada-Nya serta mengagungkan-Nya merupakan bukti keilmuan ulama. Oleh karena itu pada tingkat lapangan, ia akan menampilkan "keutamaan" ilmu yang harus diberlakukan dalam kehidupan individual maupu komunal (shiddiqi, 1984: 97).

(dalam kedudukannya sebagai pemimpin) dipandang: (1) sebagai one of us, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat, seorang diantara kita; (2) sebagai the most us, sebagai teladan dalam masyarakat; (3) sebagai the best of us, sebagai orang terbaik di antara masyarakat; dan (4) merupakan harapan masyarakat karena mampu berperilaku berdasarkan fungsi-fungsi yang diembannya (Krech, 1962: 140).

Karena kedudukannya itu, ulama memiliki peluang untuk berperanan dalam pembangunan masyarakat desa baik pada jalur bawah maupun atas. Menurut Hariri (1974: 92), ada empat konsep peranan sehubungan dengan fungsi-fungsi seseorang sesuai dengan kedudukannya, yaitu: (1) Role prescription, rumusan peranan tertulis yang harus dilakukan seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dalam sistem sosialnya; (2) Role perception, pandangan seseorang terhadap peranan yang harus dilakukan berdasarkan peranan yang telah dirumuskan dalam kedudukannya; (3) Role performance, peranan yang dapat diperagakan seseorang sehubungan dengan kedudukannya, yang didasari oleh persepsinya terhadap peranan yang telah dirumuskan dan kemampuan melaksanakannya; (4) Role exception, peranan seseorang sesuai dengan kedudukannya, yang diharapkan pihak lain dapat dilakukan untuk kepentingan mereka.

Berdasarkan pemaparan teoritik tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Pembangunan pada dasarnya adalah perubahan sosial yang diusahakan secara berencana dalam rangka perbaikan dan pertumbuhan, mencakup semua aspek kehidupan masyarakat-bangsa.
2. Pembangunan masyarakat desa sebagai bagian integral dari pembangunan Nasional pada dasarnya merupakan usaha perbaikan kehidupan ekonomi, sosial, maupun budaya masyarakat, dilakukan secara terpadu dan komprehensif dalam wujud kegiatan-kegiatan yang secara operasional berupa program-program yang dirinci menjadi proyek-proyek dengan tujuan yang spesifik dalam ruang dan waktu tertentu.
3. Pemrakarsa pembangunan bisa dari pemerintah (top down) berupa kebijaksanaan dan program-program, bisa datang dari masyarakat setempat (bottom-up) sebagai jalur penyaluran pendapat dan aspirasi dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab serta rasa wajib untuk mengusahakan kepentingan bersama.
4. Sebagai salah satu golongan pemimpin masyarakat yang cukup berpengaruh karena kelebihannya, ulama merupakan partisipan pembangunan yang memiliki peluang untuk berperan, baik jalur atas maupun jalur bawah.

5. Peranan pemikiran yang dilakukan ulama selain dipengaruhi oleh karakteristik kelompok juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadinya yang meliputi pemikiran, sikap, kedudukan, dan lamanya menempati posisi tersebut dalam masyarakat yang berpedoman pada patokan penilaian yang bersumber pada ajaran Islam.

1.6. Hipotesis

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas di ajukan hipotesis sebagai berikut:

Peranan ulama dan penentuan prioritas pembangunan masyarakat desa dipengaruhi oleh pemikirannya (mereka) mengenai pembangunan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Pembangunan Masyarakat Desa

Ada beberapa istilah yang mengandung persamaan dengan pembangunan seperti modernisasi (*modernization*), pertumbuhan (*growth*), perubahan sosial (*social change*), bahkan juga rekonstruksi (*reconstruction*), pembangunan nasional (*national building*) dan pembebasan (*liberation*). Dalam literatur yang luas istilah yang sering digunakan untuk pembangunan adalah *development*.

Tentang modernisasi (*modernization*) menurut Belling dan Totten (1970), adalah salah satu bentuk perubahan sosial yang berasal dari revolusi industri di Inggris (1830-1970) dan revolusi politik di Prancis (1794-1986). Aspek yang paling menonjol dalam proses modernisasi ini adalah perubahan teknik industri, dari cara-cara tradisional ke modern yang didukung oleh penemuan-penemuan baru di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan. Karena itu, Schoorl (1988) memberi definisi, modernisasi sebagai penerapan pengetahuan ilmiah yang ada pada semua aktivitas, semua bidang kehidupan atau semua aspek-aspek kemasyarakatan. Oleh sebab itu, proses modernisasi terjadi baik di negara-negara maju, maupun di negara-negara berkembang.

Konsep pertumbuhan (*growth*), sering digunakan untuk menunjukkan pertumbuhan ekonomi. Menurut Weiner (1981: X), para ahli ekonomi memikirkan modernisasi terutama dalam pengertian “penerapan teknologi” oleh manusia untuk menguasai sumber-sumber alam, demi menciptakan peningkatan nyata dalam pertumbuhan hasil penduduk tiap kapita.

Dalam bidang ekonomi, juga dikenal istilah rekonstruksi (*reconstruction*). Konsep ini tidak ditujukan pada upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam arti luas, melainkan lebih dititikberatkan pada masa pemulihan ekonomi. Konsep ini dikenakan pada negara-negara yang terlibat dalam perang dunia II, terutama yang kalah perang seperti Jerman, Italia dan Jepang. Salah satu program yang terkenal di bidang rekonstruksi adalah “Rencana Marshall”, yang merupakan upaya untuk menegakan kembali Eropa dari kehancuran akibat perang dunia II (Owens Shaw, dalam Ndraha, 1986: 1,4).

Gambaran itu menunjukkan bahwa antara modernisasi dengan pertumbuhan ekonomi mempunyai kaitan dan hubungan yang jelas. Ini berarti faktor sosial-politik juga berperan dalam proses modernisasi. Hal

itulah tampaknya yang menjadi dasar bagi Pensioen (1986), maupun Goulet (1977) untuk mengatakan bahwa pembangunan itu merupakan semacam bentuk perubahan sosial (social change). Dalam arti perubahan sistem dan perilaku sosial, perubahan nilai-nilai, dan perubahan sikap hidup (Esman, dalam Eaton, 1972: 24). Rogers (dalam Nasution, 1988: 36-37), menyatakan bahwa pembangunan sebagai suatu proses perubahan sosial, bersifat partisipatori secara luas untuk memajukan keadaan sosial dan kebendaan, termasuk keadilan yang lebih besar terhadap lingkungannya. Dengan demikian pembangunan sebagai perubahan sosial (social change) tidak hanya menyangkut pembangunan ekonomi, tetapi menyangkut segenap aspek kehidupan bangsa.

Pemikiran lain, ialah pembangunan dilihat dari pendekatan politik yang diartikan sebagai usaha yang berencana, dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, dalam rangka pembinaan kehidupan bangsa (national building), meliputi segi-segi ekonomi, politik, sosial, budaya, ketahanan atau keamanan, serta hubungan antar bangsa (Siagian, 1974). Model pembangunan ini, dikaitkan pada negara yang baru memperoleh kemerdekaan dan melepaskan diri dari cengkraman penjajah.

Pemikiran berikut dikemukakan mazhab Prancis (Franch School) yang dikenal juga sebagai aliran pembebasan (liberation). Aliran ini mengajarkan pembangunan sebagai usaha menilai kembali keadaan setiap kelompok masyarakat dan mengadakan perbaikan kualitatif, baik dalam pengertian kelompok maupun individu. Pembangunan menurut aliran ini bukanlah sebagai tujuan, tetapi alat untuk memanusiaawikan manusia (Ndraha, 1986: 15). Bagi aliran ini keberhasilan pembangunan tidak diukur oleh jumlah keuntungan yang dicapai, melainkan pada kuantitas sendiri. Faham ini lebih tertarik pada model pembangunan yang dikembangkan di Cuba, Tanzania, dan republik Rakyat Cina (RRC), yang dianggap telah berhasil membebaskan rakyatnya dari kelaparan massal, dan menghapuskan sistem feodal. Faham ini berorientasi pada rakyat jelata. Model pembangunan yang dikembangkan merupakan model yang melakukan pendekatan ekonomi-politik, berkembang dan banyak diterapkan di negara-negara Amerika Latin.

Gambaran lain tentang pembangunan dilukiskan sebagai “proses belajar”, yaitu sebagai suatu proses peralihan pengetahuan dan informasi keterampilan-keterampilan baru, yang di samping merupakan alat, juga sebagai hasil dari proses pembangunan. Karena itu pembangunan tidak semata-mata sebagai usaha peningkatan kehidupan material saja, melainkan juga bidang non-material kehidupan manusia (Soedjatmoko, 1986).

Selanjutnya Soedjatmoko berpendapat, bahwa yang harus diperjuangkan adalah kemampuan untuk berkembang secara sosial,

ekonomi maupun secara politik, di semua tingkat dan dalam semua komponen masyarakat, sehingga memungkinkan bangsa yang bersangkutan mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan, sehingga *survive* dan berkembang kearah yang lebih baik. Pembangunan harus dilihat tidak sebagai “yang kita perbuat”, melainkan sebagai “yang kita belajar”, usaha peningkatan kemampuan masyarakat baik secara individual maupun kolektif, untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dan mengarahkan perubahan ini sesuai dengan tujuan. Pembangunan bukan proses yang membujur lurus, melainkan sebagai jaringan perubahan-perubahan yang erat hubungannya satu sama lain.

Lebih jauh Soedjatmoko melihat ada dua perangkat kebutuhan belajar: (1) harus menoleh kebelakang; dan (2) harus memandang kedepan. Kedua kebutuhan ini, apabila dikuasai dapat membuka jalan untuk melepaskan diri dari ancaman kegagalan di masa lalu, dan kekhawatiran terhadap tantangan masa depan. Perangkat pertama, membuat kita belajar dari sukses dan kegagalan dalam pembangunan setelah perang dunia ke II. Dari perangkat yang satu lagi, kita belajar sambil mempersiapkan diri, dan sambil menjawab proses transformasi kehidupan yang kini sedang berkembang.

Pada perkembangan berikutnya muncul pemikiran baru yang dikenal dengan sebutan “Pembangunan yang lain” (Another Development”, yang ingin menyelesaikan konsep-konsep pembangunan yang telah ada (Nasution, 1988). Berbeda dengan pemikiran-pemikiran sebelumnya yang lebih berorientasi pada politik dan ekonomi, ide sentral dari model ini, bahwa tidak ada suatu jalur tunggal yang universal dalam melaksanakan pembangunan (Bennet dan Galtung, dalam Nasution, 1988: 28). Menurut konsep ini pembangunan harus dipahami sebagai suatu proses yang integral, multi dimensional, dan dialektik, yang dapat berbeda antara negara yang satu dengan negara yang lain. Jadi pembangunan meliputi berbagai segi kehidupan bangsa, tidak hanya sebagai proses, melainkan juga sebagai tujuan yang hendak dicapai terminal condition. Pendekatan yang dilakukan oleh model ini adalah pendekatan elektik komprehensif, artinya mengambil unsur-unsur yang dipandang baik dari setiap konsep yang ada. “Pembangunan yang lain” ini mencoba merenungkan kembali masalah kemerdekaan dan keadilan, dalam hubungannya antara manusia dengan masyarakat, dan antara batas pertumbuhan dengan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan berarti pembebasan manusia dari kemiskinan dan perbudakan, penindasan dan ketidakadilan. Pembangunan berarti peningkatan harga diri dan kemampuan untuk menghargai masa depan.

Todaro (dalam Ndraha, 1986) menyatakan, pembangunan mengandung tiga makna hakiki: (1) kemampuan untuk memenuhi

kebutuhan dasar (life sustenance); (2) kemampuan untuk menjadi manusiawi (life sustenance); (3) kemampuan untuk memiliki (freedom from servitude). Unsur-unsur inti dari konsep ini, seperti dijelaskan Nasution (1988), adalah: (1) Berorientasi pada kebutuhan, baik kebendaan maupun non-kebendaan; (2) endogenous, bertolak dari masyarakat yang menentukan masa depannya sendiri; (3) mengandalkan kemampuan sendiri (self-reliant); (4) pemanfaatan sumber-sumber daya secara rasional dan bertanggung jawab; dan (5) bersandar pada transformasi struktural untuk merealisasi kondisi swa-kelola (self management) dan partisipasi dalam pembuatan berbagai keputusan.

Demikianlah ‘Another Development’, yang oleh Lerner (1977) disebut *Development*, merupakan suatu ideologi internasional, sebagai suatu kegiatan nyata dan berencana yang dianggap sebagai suatu cara untuk mengatasi keterbelakangan, memulihkan martabat kemanusiaan, dan membebaskan manusia dari kemiskinan dan kebodohan. Karena itu menurut Tjodronegoro (1978: 19), development pada prinsipnya merupakan perubahan yang diusahakan secara berencana, mencakup perubahan kebudayaan material dan bentuk organisasi masyarakat secara menyeluruh.

Pembangunan masyarakat desa, yang dikenal dengan istilah Community Development pada dasarnya merupakan suatu perubahan dalam arti usaha perbaikan kehidupan masyarakat desa (Hofstede, 1980: 20). Dipihak lain Ndraha (1986: 2, 15) menyatakan bahwa pembangunan masyarakat desa dapat dipandang dari sudut arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, pembangunan masyarakat desa berarti perubahan sosial berencana, dengan sasaran perbaikan dan peningkatan bidang ekonomi, teknologi, bahkan sosial dan politik. Dalam arti sempit pembangunan masyarakat desa berarti perubahan sosial berencana di lokasi tertentu seperti kampung, desa atau lokasi yang lebih luas dari desa. Pembangunan masyarakat dalam arti sempit ini dikaitkan dengan berbagai proyek atau program yang langsung berhubungan dengan upaya pemenuhan kebutuhan dan pengurusan kepentingan masyarakat setempat, dan sepanjang mampu dikelola oleh masyarakat itu sendiri. Dunham (dalam Kurtz, 1960) memikirkan pembangunan masyarakat desa sebagai usaha yang terorganisasi untuk memperbaiki kondisi kehidupan komunitas, kemampuan integrasi, dan kemampuan untuk berkembang secara sendiri. Sedangkan United Nations (1963: 4) mendefinisikan pembangunan masyarakat desa sebagai usaha perbaikan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat, yang dilakukan oleh masyarakat yang bersangkutan dan dibantu oleh pemerintah. Hal itu sejalan dengan pemikiran Esman (dalam Ndraha, 1982: 13) yang menjelaskan bahwa pembangunan masyarakat desa bukan hanya dikonsepsikan sebagai usaha pemerintah, tetapi juga

tergantung dari *innerwill*, proses emansipasi diri, dan dukungan masyarakat sendiri (*autonomous energies*).

Berdasarkan definisi tersebut, pembangunan masyarakat desa bisa diartikan sebagai ikhtiar masyarakat yang bersangkutan (prakarsa sendiri), maupun kegiatan pemerintah, dalam rangka memperbaiki kondisi mereka. Karena itu menurut Dunham (1960) ada empat unsur yang mendasari pembangunan masyarakat desa: (1) program berencana; (2) pembangkitan tekad masyarakat untuk menolong diri sendiri dan tidak selalu bergantung pada pihak lain; (3) bantuan teknis (dari pihak lain), personal, peralatan dan dana; (4) pemanduan berbagai keahlian untuk membantu masyarakat yang sedang membangun. Menurut Chekki (1979) perubahan yang terjadi dalam pembangunan masyarakat desa digerakan oleh kekuatan dari dua arah, yaitu kekuatan struktural dari luar dan kekuatan mental yang tumbuh dari diri manusia. Dengan demikian perubahan itu tidak semata-mata terjadi karena dinamika dari dalam, tetapi mendapat dorongan aktif dari luar. Lebih jauh dijelaskan oleh Krammer dan Specht (dalam Ndraha, 1986: 331) bahwa pembangunan masyarakat desa adalah upaya menggerakkan masyarakat, mengorganisasi, dan mempersiapkan mereka melakukan tindakan bersama, dengan tujuan: (1) memperkuat ikatan dan kerukunan sosial antar organisasi komunitas; (2) agar setiap orang mampu atau bis dan Specht (dalam Ndraha, 1986: 331) bahwa pembangunan masyarakat desa adalah upaya menggerakkan masyarakat, mengorganisasi, dan mempersiapkan mereka melakukan tindakan bersama, dengan tujuan: (1) memperkuat ikatan dan kerukunan sosial antar organisasi komunitas; (2) agar setiap orang mampu atau bisa memegang peranan dalam tindakan bersama; dan (3) meningkatkan komunikasi dengan komunitas lainnya, karena subyek pembangunan bukan individu melainkan komunitas.

Menurut Biddle (1968) masyarakat komunitas adalah masyarakat masa depan, karena pembangunan masyarakat merupakan usaha untuk membentuk karakteristik komunitas yang penuh solidaritas, kebersamaan, gotong royong dan kekeluargaan. Oleh Etzioni (1968: 4) masyarakat seperti itu disebut masyarakat aktif yaitu masyarakat yang mampu menguasai dirinya sendiri, dan mampu mengorganisasi energinya menjadi suatu gerakan (*movement*) yang efektif untuk mengendalikan atau mempengaruhi masa depannya sendiri. Masyarakat aktif, menurut Friedman (1982), adalah yang mampu memperjuangkan kepentingan melalui proses politik; masyarakat yang kemampuannya untuk memilih dan memberi respons terhadap perubahan yang semakin meningkat, sehingga berkuasa untuk mengendalikan masa depannya sendiri. Dengan demikian masyarakat yang dicita-citakan adalah masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri (masyarakat mandiri). Karena itu dalam konteks kehidupan masyarakat-bangsa, pembangunan masyarakat desa

bersifat komprehensif (Mubyarto, 1984: 5), dan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional (Chekki, 1979: 3). Jadi pembangunan masyarakat desa harus dilihat secara dinamis, sebagai kegiatan usaha tanpa akhir, dan bergerak maju atas kekuatan sendiri (*self sustaining process*) menuju kearah membaiknya kondisi dan meningkatnya taraf hidup masyarakat yang bersangkutan (Tjojroamidjojo, 1988: 2).

Menurut Sanders (dalam Hofstede, 1980: 122-123), pembangunan masyarakat desa itu dapat dipandang sebagai proses, sebagai metode, sebagai program, dan sebagai gerakan sosial.

Pembangunan masyarakat desa sebagai proses ialah proses perubahan yang bertahap menuju suatu masyarakat mandiri yang mampu menentukan nasibnya sendiri dan menempuh berbagai upaya bersama untuk mencapainya. Melalui proses tersebut anggota komunitas diharapkan memperoleh kemampuan untuk berotonomi lokal. Pendidikan merupakan inti pembangunan masyarakat desa sebagai proses. Karena itu yang diutamakan adalah perubahan yang konstruktif secara sosial dan secara psikologis.

Pembangunan masyarakat desa sebagai metode, dititikberatkan pada caranya untuk mencapai tujuan, yang bekerja pada dua cara yaitu: (1) partisipasi masyarakat; dan (2) pengorganisasian masyarakat, sehingga kehendak pemakai metode tersebut mencapai kenyataan.

Sebagai program, pembangunan masyarakat desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Titik berat pembangunan masyarakat desa sebagai program adalah pada pencapaian tujuan organisasi. Di antara sejumlah program nasional ada yang langsung menyangkut kepentingan komunitas. Program inilah yang diidentifikasi sebagai program pembangunan masyarakat desa. Pembangunan masyarakat desa sebagai program dalam beberapa hal berlawanan dengan pembangunan masyarakat desa sebagai metode. Sebagai program, pembangunan masyarakat desa bisa saja dilakukan oleh pemerintah atau lembaga di luar desa, tanpa partisipasi masyarakat yang bersangkutan.

Sebagai gerakan sosial, pembangunan masyarakat desa merupakan upaya untuk mewujudkan suatu ideologi (bagi Indonesia: Pancasila). Ideologi adalah gambaran sistematis suatu cita-cita yang hendak dicapai oleh suatu bangsa. Ideologi merupakan pandangan hidup tentang dunia dan cara mewujudkannya, berfungsi mengikat, mempersatukan dan menghidupkan bangsa yang bersangkutan. Efektifitas suatu ideologi itu melahirkan gerakan untuk mewujudkannya.

Ada beberapa kecenderungan dalam pemikiran tentang pembangunan masyarakat desa, di antaranya adalah konsep-konsep pembangunan : (1) *people centered development*; (2) *institution development*; (3) *self reliant*; (4) *sustainability*; dan (5) *value oriented*

development (Kuntowijoyo, 19870).

Konsep *people contered development* diperkenalkan oleh Korten dan Klauss (1984) sebagai pendekatan yang mementingkan inisiatif kreatif dari masyarakat sebagai sumber utama pembangunan dan menekankan kesejahteraan matrial dan spritual masyarakat sebagai tujuan dari proses pembangunan. Mereka membedakan pendekatan itu dengan apa yang disebut sebagai *production-contered development*, yang berusaha semata-mata mengejar keluaran produksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena itu pendekatan *people contered* meletakkan manusia dan lingkungan sebagai variabel yang utama, tempat perencanaan pembangunan berangkat. Pada sisi lain apa yang disebutnya sebagai *people centered* dengan pendekatan dengan *human ecology*, yang melihat institusi-institusi yang ada ditengah-tengah masyarakat (seperti pesantren dan majlis ta'lim) adalah unit sosio-kultural untuk melkukan pembangunan "*people centered*" sekaligus sebagai kelompok sasaran dan agen dari pembangunan desa.

Konsep *instituion development* (pembangunan lembaga) dengan penekanan pada pembangunan kelembagaan sosial. Konsep ini juga beranjak dari pemikiran Konten dan klauss 91984) yang membagi model pembangunan kepada tiga jenis, yaitu model pertumbuhan, model kesejahteraan, dan model swadaya. Model swadaya inilah yang disebut Korten dan Klauss sebagai pembangunan yang berfokus pada kelembagaan sosial. Dalam "pembangunan lembaga", pesantren misalnya, sebagai lembaga pendidikan dan lembaga sosial, yang banyak tersebar di pedesaan tampaknya mempunyai posisi yang strategis, mengingat daerah cakupannya berada di masyarakat akar-bawah. Pesantren selalu "memilki" lingkungan, juga "milik" lingkungannya, yang bisa menularkan kreativitas pada masyarakat luas.

Konsep *colective selfreliance* (kebersamaan dalam kemandirian), diartikan sebagai potensi untuk mengorganisasi dirinya sendiri, merealisasi sumber daya lokal; dan rakyat sebagai pelaku utama dan pengambil manfaat terbesar dalam usaha-usaha pembangunan. Dalam hal ini kemandirian juga diartikan sebagai kemandirian bersama atau kebersamaan dalam kemandirian, dengan maksud menekankan pentingnya saling ketergantungan anggota masyarakat. Dengan cara yang sama, kemandirian dapat dikembangkan menjadi *local self reliance*. Institusi-institusi yang ada di desa seperti pesantren dan majlis ta'lim, sebagai lembaga yang menjalin hubungan struktural maupun fungsional dengan masyarakat tentu mempunyai kapasitas mengembangkan kemandirian, bagi lembaganya sendiri dan bagi masyarakat.

Konsep *Sustainability* (kelestarian pembangunan) ditandai dengan adanya kemampuan untuk mempertahankan kelangsungan pembangunan.

Tjokrowinoto 1987) menyebutkan bahwa indikator dari kelestarian pembangunan masyarakat desa ialah: (1) berlangsung terus menerus (*revolving rate*); (2) keanggotaannya yang stabil (*stability of membership*); (3) keterlibatannya yang kontinu (*continuity of commitment*); dan (4) mobilisasi sumber yang ada (*resource mobilization*). Dari semua indikator itu, institusi keagamaan seperti pesantren sebagai lembaga swadaya yang ada di pedesaan misalnya, disamping mempunyai *sustainable* yang tinggi juga mempunyai *revolving rate* yang tinggi. Untuk itu banyak bukti yang menunjukkan bahwa lulusan pesantren mempunyai dorongan moral untuk mendirikan pesantren di desanya sendiri dan sekaligus pada gilirannya menjadi agen pembangunan.

Konsep *value-oriented development*, konsep ini mirip dengan pikiran Weberian yang menekankan perlunya sebuah etika. Menurut konsep ini, pembangunan merupakan aktivitas-aktivitas yang lahir atas dorongan nilai-nilai atau yang mendapat pembenaran dari khasanah nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dengan kata lain, nilai-nilai agama merupakan sumber konsepsi dan motivasi pembangunan. Pembangunan yang mempertimbangkan nilai-nilai agama akan lebih berakar dalam masyarakat yang menganut cita-cita keagamaan. Kesadaran perlunya etika atau legitimasi ini selalu ditekankan terutama oleh pemuka agama (Islam) dalam setiap kesempatan. Dakwah *billisan* adalah pasangan dari dakwah *bilhal*, da'wah dengan perkataan sebagai imbangan dari dakwah dengan perbuatan nyata.

Di pihak lain Ismawan (1985) menjelaskan, mengingat pembangunan masyarakat desa didasarkan atas dua masalah utama yaitu kemiskinan dan keterbelakangan, maka teori perembesan ke bawah (the trickle down theory) dengan pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach) dan pembangunan dari dalam (development from within) merupakan panduan metode yang paling tepat untuk saat ini, sebab pada dasarnya masyarakat merupakan subyek pembangunan yang memiliki kemampuan yang memadai. Titik berat dari teori "perembesan ke bawah" adalah pada percepatan pembangunan melalui program-program yang berpusat pada pertumbuhan ekonomi. Dengan harapan, hasilnya dinikmati oleh mereka yang secara langsung terkena sasaran program tersebut, juga dapat merembes pada masyarakat yang lebih luas. Usaha itu dilakukan melalui "pendekatan kebutuhan dasar" berupa paket kebijaksanaan yang mengusahakan laju pertumbuhan, pemerataan pendapatan dan pengaturan kembali pola-pola produksi dan konsumsi. Pendekatan itu melalui penyediaan peluang kerja, meningkatkan pendapatan, dan program keluarga berencana. Pendekatan akan "kebutuhan pokok" itu, dibarengi dengan usaha "pendekatan dari dalam" yakni upaya pengembangan kepercayaan dan kemampuan masyarakat itu sendiri untuk

mengorganisasikan diri dan membangun, sesuai dengan tujuan yang mereka kehendaki. Usaha itu dilakukan dalam kelompok swadaya sedemikian rupa sehingga interaksi diantara individu merupakan proses pendidikan untuk bertindak (education for action process) (Nelson dan Ramsey, 1960); merupakan proses pendidikan silih asah, silih asuh, silih asih. Dengan demikian, manusia dipandang sebagai sumber daya yang mampu mengembangkan dirinya, sekaligus mencari alternatif pemecahan masalahnya dengan segala potensi yang dimilikinya. Kehadiran pihak luar terbatas sebagai fasilitator, motivator, dan katalisator, yang bertugas memberikan kemudahan dan merangsang gerakan pembangunan yang dilaksanakan masyarakat sendiri. Melalui proses tersebut diharapkan anggota komunitas memperoleh kemampuan untuk berotonomi.

Dengan demikian pembangunan masyarakat desa merupakan perpaduan usaha masyarakat dan kewenangan pemerintah (sebagai pihak luar) untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang bersangkutan. Hal itu berkaitan dengan usaha pengintegrasian masyarakat ke dalam kehidupan bangsa, sehingga dapat memberikan sumbangan untuk kemajuan bangsa itu (United Nations, 1963: 4). Karena itu pembangunan masyarakat desa dilakukan melalui dua jalur yaitu ‘jalur bawah’ (swadaya masyarakat) dan ‘jalur atas’ (pemerintah pusat dan daerah), dengan sasaran utama diarahkan pada tiga hasil yaitu: (1) membaiknya kondisi dan meningkatnya taraf hidup masyarakat desa; (2) tergeraknya partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan; dan (3) tumbuhnya kemampuan desa untuk berkembang secara mandiri (Ndraha, 1966: 4,12). Ketiga sasaran pembangunan itu tidak berdiri sendiri melainkan terpadu sebagai sebuah paket usaha, karena kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri berkorelasi positif dengan kemampuannya untuk berpartisipasi dan dengan kemampuannya untuk meningkatkan taraf hidupnya sendiri (Mubyarto, 1984). Karena itu berhasil tidaknya pembangunan itu pada umumnya bergantung pada beberapa faktor seperti: tenaga terlatih, biaya, informasi, peralatan, partisipasi, dan kewenangan yang syah. Kendatipun demikian, di negara-negara sedang berkembang (seperti Indonesia) faktor pemerintahlah yang terpenting, karena berperan menggali, menggerakkan, dan mengkombinasikan faktor-faktor tersebut (Katz, 1969: 100). Pemerintah memegang peranan sentral dalam pembangunan nasionalnya (Ponsioen, 1968: 130) yaitu dalam menetapkan kebijakan umum (policy) dan proses pelaksanaannya. Hal itu dilatarbelakangi pula oleh sistem nilai dalam masyarakat yang memungkinkan tumbuhnya apa yang disebut sikap paternalistis pemerintah berdasarkan anggapan bahwa pemerintahlah yang paling mengetahui, berwenang, dan mampu mencapai apa yang terbaik bagi masyarakatnya (Hanson, dalam Mubyarto, 1984).

Perwujudan operasional pembangunan itu berupa program-program, sebagai bentuk kegiatan sosial yang diorganisasikan dengan suatu tujuan yang spesifik, terbatas pada suatu ruang dan waktu (Tjokroamidjojo, 1974: 195). Program-program itu kemudian dirinci dalam proyek-proyek. Menurut Tjokroamidjojo (1974: 196) ciri umum proyek pembangunan itu antara lain: (1) menekankan pada tujuan yang lebih dekat dan berorientasi pada kegiatan (action oriented); dan (2) kegiatan-kegiatan itu tidak berlaku terus menerus (non repetitif) dan tidak dapat dilakukan melalui kegiatan rutin.

2.2. Konsep Ulama

Ada dua kunci dasar mengenai konsep ulama . Pertama, konsep ulama menurut isyarat al-Qur'an, dan kedua konsep ulama menurut al-Hadis. Terma ulama' atau ulama dalam al-Qur'an dikemukakan dalam bentuk (shighat) ulama'u (orang-orang berilmu) ditemukan pada dua ayat yang berbeda yaitu, (1) ayat 28, surat al Faathir (Pencipta): "Sesungguhnya yang takut kepada Allah diantara hamba-hambaNya hanyalah ulama"; (2) ayat 157, surat Asy Syu'araa (Para penyair): "Dan apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka bahwa para ulama Bani Israil mengetahuinya?"

Kedua ayat itu menunjuk (ma'rifat) kepada ulama yang berbeda (tertentu) yaitu (1) ulama hamba Allah, dan (2) ulama Bani Israil. Ulama hamba Allah menurut redaksi ayat itu (Faathir: 28) dimaksudkan sebagai orang-orang yang berilmu, yang mengetahui kebenaran dan kekuasaan Allah dan hanya takut kepadaNya. Sedangkan ulama Bani Israil, seperti tersurat dalam surat Asy Syu'araa, ayat 157 itu, dimaksudkan sebagai orang-orang yang berilmu, akan tetapi mereka tidak menerima al-Qur'an sebagai satu kebenaran (Thabathabai, 1983).

Dari isyarat al-Qur'an itu dapat ditarik kesimpulan bahwa ada dua tipe ulama yaitu; (1) ulama yang mengetahui kebenaran dan kekuasaan Allah (berilmu), serta takut kepadaNya; dan (2) ulama yang berilmu, tetapi tidak takut kepada Allah, bahkan tidak mau menerima al-Qur'an sebagai suatu kebenaran.

Terma ulama dalam al-Hadis dapat ditemukan, (1) pada hadis nabi yang diterima dari Abi Darda'i: "...dan sesungguhnya ulama itu pewaris nabi (warasat al-anbiya), dan para nabi itu tidak mewariskan sesuatu dalam bentuk harta benda (dinar atau dirham), yang mereka wariskan adalah ilmu (al- ilm)...” (riwayat Abu Daud dan Turmudzi, dalam Shalih, 1970: 757); (2) pada hadis yang diterima dari Abdillah Bin Amn Bin Al-Ash: "sesungguhnya Allah tidak mengambil (melenyapkan) ilmu dari manusia dengan seketika, melainkan dengan cara mematikan ulama, sehingga apabila tidak tersisa seorang yang berilmupemimpin; dalam saat

yang sama, orang-orang bodoh ini dimintai fatwa dan mereka memberi fatwa dengan tanpa ilmu, orang-orang sesat dan menyesatkan”, (*muttafaq’alaih*) (Shalih, 1970: 758).

Dengan isyarat al-Qur’an dan al-Hadis itu isue terpenting yang terkait dengan ulama adalah ilmu.

Dari segi bahasa (*etimologi*) kata ulama merupakan bentuk jamak dari kata *alim*, artinya orang yang berilmu. Kata alim itu berasal dari kata kerja (*fi’alima*) yang bentuk kata bedanya adalah ilm atau ilmu, sebagaimana yang digunakan dalam indonesia, bahwa ilmu adalah pengetahuan yang telah teruji kebenaran yang berfungsi sebagai alat pembantu manusia dalam menanggulangi masalah-masalah yang dihadapinya sehari-hari (suriasumantri, 1984 : 69). Dari sini dapat diketahui bahwa ulama berarti orang-orang yang berilmu.

Kata atau lafazh ‘ilm atau al’lim atau ilmu dalam al-Qur’an terulang sebanyak ± 104 kali, yang tersebar di berbagai ayat. Mengandung arti atau makna khusus dan umum, artinya ada ilmu yang terkait dengan masalah-masalah ke tuhanan, metafisika (*mughayabat*), dan masalah yang empirik, seperti nama-nama benda sebagaimana diajarkan Allah kepada Adam,⁵ “dan yang lainnya. Dalam al-Hadist kata ilmu juga bisa bermakna khusus dan umum, hal itu bisa dilihat dari bentuk-bentuk kata (*lafazh*) ilmu yang ditemukan. Lafazh ilmu yang menggunakan *alif lam* berarti ilmu tertentu, sedangkan lafazh yang tidak menggunakan *alif lam* berarti bermakna umum.

Dalam dua hadis dan dua ayat yang telah dikemukakan dimuka, lafazh yang digunakan bermakna khusus, namun kekhususannya tidak dibataskan pada keragaman atau jenis ilmu, akan tetapi terletak pada aspek aksiologi, yaitu sejauhmana ilmu-ilmu tersebut membawa guna dan manfaat bagi manusia untuk bisa mengagungkan Allah dan takut kepada-Nya (Shalih, 1970: 758).

Para mufasir dalam memahami surat Faathir; 28, mengemukakan bahwa kata ulama dalam ayat itu adalah mereka yang memiliki pengetahuan yang sempurna tentang nama-nama, sifat-sifat dan perbuatannya, teguh hatinya dan tidak ada keraguan; terlihat dalam seluruh perbuatannya, sebagai bukti kebenarannya (Thabathaba’i, 1983: 43). Karena itu kadar khasyyat (takut) dalam ayat itu merupakan ukuran dari tingkat pengenalan (*ma’rifat*) dan pengetahuan (ilmu) ulama terhadap Allah. *Al-Khassyyat* (takut) dalam ayat tersebut tidak berkonotasi pada

⁵ Surat al-baqarah (sapi Betina) ayat 31: “dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda0 seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu berfirman: sebutkanlah kepada-ku benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar”.

kekhawatiran akan siksa Allah, tetapi menunjukkan kondisi di dalam hati dan terasa bersifat khusyu, yang berubah ketika tergambar dan terasa oleh hati tersebut sifat keagungannya (al-Qasimy, dalam Shalih, 1970: 983).

Dari pendapat para ahli mengenai ilmu dalam kaitannya dengan identitas ulama sebagai pemilik ilmu itu, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan ilmu disini adalah ilmu dalam arti yang komprehensif dan umum, yang pada tingkat kegunaannya harus membawa pemiliknya kepada kerendahan diri dihadapan-Nya, ketaatan kepada-Nya serta mengagungkan-Nya. Kerendahan diri, ketaatan, dan pengagungan terhadap Allah dari seorang ulama merupakan bukti keilmuannya. Karenanya bagi ulama, ditingkat lapangan, ia akan menampilkan "kekuatan" ilmu dan segisegi lainnya. Dan ketaatan sebagai salah satunya, bisa dilihat dalam penekunan seluruh aturan Allah yang harus diberlakukan dalam kehidupan individual dan komunal seorang ulama. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa terma ulama atau keulamaan merupakan komulasi dari ilmu dan ketaatan.

Dalam perkembangan selanjutnya, sejalan dengan perjalanan kehidupan umat islam, terma ulama sering dipakai untuk menunjuk kepada keahlian pada satu cabang ilmu agama saja, misalnya "Ulama Fiqih", "Ulama Kalam", "Ulma Hadis" dan sebagainya, dan "gelar" tersebut terutama diberikan oleh murid-murid dari masing-masing ulama.

Dalam kapasitasnya sebagai pemilik ilmu ('alim) atau orang berilmu, ulama adalah guru atau bahkan pendidik. Al-Sunnat menuturkan bahwa jika seorang berilmu tidak mentransfer (ta'lim) ilmunya, ia diancam dengan sanksi yang tidak ringan. Seperti disebutkan dalam salah sat hadis; "Siapa saja orang berilmu tidak mentransfer (ta'lim) atau bahkan menyembunyikan ilmunya, maka ia akan dicambuk dengan cambuk dari api neraka" (Hadis dari Abu daud dan Turmudzi). Karenanya ulama sering berkiprah sebagai guru atau "penyampai ajaran agama saja". Dengan status itu diasumsikan ulama sudah menyandang gelar *warasat al-anbiya* (penyampai ajaran nabi). Akan tetapi dengan status itu tidak berarti ulama lepas interaksinya dari lingkungan-lingkungan yang mengitarinya, sebab keilmuannya, dengan kadarnya, mempunyai implikasi dalam berbagai segi kehidupan (Al-Mu;in dalam Shahih, 1970: 984). Apa yang dilakukan ulama itu merujuk kepada sabda nabi Muhammad SAW bahwa "seorang mukmin yang abik adalah dia yang terlibat aktif dalam kehidupan manusia, dan shabar terhadap berbagai problema yang muncul ditengah-tengah kehdupan itu". (Hadis dari Abu Daud dan Turmudzi).

Dalam perspektip perkembangan sosial politik umat Islam, pada masa awal setelah wafat nabi Muhammad SAW, seorang *khalifah* adalah seorang mujtahid. Seorang imam atau pemimpin harus memiliki kemampuan berijtihad atau sebagai 'ulama. Pada perkembangan

selanjutnya (menjelang kejatuhan Bagdad) seorang imam atau pemimpin (dengan berbagai sebutannya), tidak lagi harus seorang mujahid atau ulama. Dengan demikian terjadi pemisahan yang tajam antara ulama atau keulamaan disatu pihak dengan umaro atau imarat di pihak lain. Status masing-masing menjadi jelas, ulama pemegang otoritas keilmuan agama, dan umaro adalah ulil amri (yang punya urusan atau pemegang pemerintahan). Dari sini berkembang asumsi bahwa, jika ulama terlibat dalam bidang garapan umaro (“keluar” dari statusnya), maka ulama telah menampilkan aspek-aspek dinamisnya, kemudian sering dikatakan sebagai “peran ulama”. Karena kedudukannya itu, keberadaan ulama dilingkungan masyarakat (khususnya di Indonesia), dikenal sebagai pemimpin informal (*informal leaders*) (Riberu, 1976: 6), yang memiliki peluang untuk berperan serta aktif dalam pembangunan masyarakat desa.

Mengenai status dan peranan, dijelaskan oleh Ross (dalam Susanto, 1977: 94): Status adalah kedudukan seorang yang dapat ditinjau terlepas dari individunya. Status merupakan kedudukan obyektif yang memberi hak dan kewajiban kepada seseorang yang menempati suatu kedudukan. Sedangkan peranan (*role*) merupakan dinamika dari status, atau penggunaan hak dan kewajiban sesuai dengan statusnya. Status dan peranan saling kait-mengkait, yang memberikan hak dan kewajiban kepada seseorang. Lebih jauh dijelaskan oleh Cohen (1983: 77) bahwa peranan adalah suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu. Di pihak lain Horton dan Hunt (1987: 118) menandakan, bahwa setiap orang mukmin mempunyai sejumlah status dan diharapkan mengisi peran yang sesuai dengan statusnya. Status atau kedudukan, adalah suatu peringkat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok, atau posisi suatu kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lainnya. Peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang atau kelompok yang mempunyai suatu status. Status dan peranan adalah dua aspek dari gejala yang sama. Status adalah perangkat hak dan kewajiban, peran adalah pameran dari hak dan kewajiban tersebut.

Dalam konteks pembangunan masyarakat desa, “peran ulama” itu dimaksudkan sebagai aspek dinamis suatu institusi, atau seperti yang dikatakan Berger dan Luckman (1972: 92), peranan mewakili tata institusional (*institutional order*) suatu institusi (dalam hal ini ulama sebagai institusi). Semua peranan mewakili suatu institusi secara menyeluruh, tetapi ada beberapa di antaranya yang secara simbolis dapat dianggap mewakili institusi yang bersangkutan secara total. Peranan seperti ini mempunyai peranan strategis di dalam masyarakat, sebab peranan tersebut tidak saja mewakili institusinya sendiri melainkan juga merupakan faktor integratif seluruh individu dari institusi tersebut (Berger

dan Luckman, 1972: 93). Keterlibatan ulama secara penuh maupun sebagian dalam penetapan kebijakan umum dan penyusunan rencana pelaksanaan pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah, dapat dianggap sebagai peranan strategis (Ndraha, 1986: 53). Peranan strategis itu disebut Cohen dan Uphoff (1977: 76) sebagai peranan dasar (*basic roles*). Peranan dasar atau peranan strategis yang menghasilkan wujud kebijakan umum itu, selanjutnya diperinci berupa program-program pembangunan yang dilaksanakan sebagai suatu kegiatan sosial. Perincian dan pelaksanaan peranan dasar itu oleh Cohen dan Uphoff (1977) dan Simpas (dalam Ndraha, 1986: 54) disebut sebagai peranan administratif (*administrative roles*), yaitu pola perilaku yang diharapkan dari, atau yang telah ditetapkan sehubungan dengan fungsi-tugas seseorang sesuai dengan kedudukannya. Peranan administratif itu dalam wujudnya berupa “kemampuan administratif”, yaitu kemampuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui dan dengan dukungan sistem-sistem pendukung pembangunan (Katz, 1969: 112). Sistem-sistem tersebut adalah berupa pelaksanaan tugas (*performance*), struktur (*structure*), dan hubungan dengan lingkungan (*environmental linkages*). Dengan perkataan lain, kemampuan administratif adalah kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan tugas, didukung oleh struktur organisasi dan lingkungan. Dalam kemampuan itu termasuk kemampuan menggali, menggerakkan, dan mengkombinasikan masukan-masukan dari lingkungan, dan menyiapkannya bagi sistem pelaksanaan tugas (Tjokroamidjojo, 1980). Antara ketiga sistem itu (pelaksanaan tugas, struktur, dan hubungan dengan lingkungan) ada kaitan yang timbal balik. Hubungan antara struktur (organisasi) dengan lingkungannya dapat diterangkan melalui kemampuannya menyesuaikan diri, struktur mendukung lingkungan. Sebaliknya melalui sumber daya yang ada padanya, lingkungan mendukung struktur. Bahkan permintaan (*demand*) dari lingkungan merupakan masukan bagi struktur. Hubungan timbal balik antara pelaksanaan tugas dengan lingkungan ialah pelaksanaan tugas menghasilkan keluaran bagi lingkungan, sementara lingkungan menyediakan dukungan bagi pelaksanaan tugas (Tjokroamidjojo, 1980).

Sehubungan dengan peranan administratif itu (*administrative roles*), hariri membagi konsep peranan ke dalam empat konsep: (1) *Role prescription*, rumusan peranan tertulis yang harus dilakukan seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dalam sistem sosialnya; (2) *Role perception*, pemikiran seseorang terhadap peranan yang harus dilakukan berdasarkan peranan yang telah dirumuskan dalam kedudukannya; (3) *Role performance*, peranan yang dapat diperagakan seseorang sehubungan dengan kedudukannya, yang didasari oleh persepsinya terhadap peranan yang telah dirumuskan dan kemampuan melaksanakannya; (4) *Role*

exception, peranan seseorang sesuai dengan kedudukannya, yang diharapkan pihak lain dapat dilakukan untuk kepentingan mereka.

2.3. Peran dan Fungsi Ulama

Ulama mengemban tugas mulia menunaikan *amar ma'ruf nahi munkar* sebagaimana para nabi. Mereka harus aktif menegakan tauhid dan mengajarkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Jumu'ah ayat 2 sebagai berikut:

“Dialah yang mengutuk kepada kaum yang buta huruf seoran rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, menyucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah (As-Sunnah). Sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata”.⁶

Sabda nabi Muhammad SAW.

“Ulama adalah penerang dunia, khalifah segenap para nabi, ahli waris (ajaranku) dan ahli waris seluruh nabi”.⁷

Ulama merupakan pengalih fungsi kenabian. Setiap ulama harus mampu mengemban misi para nabi kepada seluruh masyarakat, dalam keadaan sangat sulit sekalipun. Amanat menegakan Islam pada setiap sisi kehidupan menuntut peran aktif dengan perjuangan, kesabaran, keikhlasan dan sikap tawakal. Dengan demikian, umat islam dapat mengamalkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari.⁸

Menurut al-Qur'an, ulama harus menjadi hamba Allah yang berpikir dan berdzikir. Ia harus menjadi pengajar tauhid, pemberi penjelasan, pejuang kebenaran, dan sekaligus pemimpin umat yang memplopori *amar ma'ruf nahi munkar*.⁹

Tanggung jawab ulama yang dilaksanakan dengan baik akan berdampak positif bagi kehidupan umat. Akan tumbuh semangat pembelaan terhadap Islam disamping kesadaran pengamalan ajarannya.

Kemudian apabila dihubungkan dengan firman Allah SWT., dalam al-Qur'an surat al-baqrah ayat 213, yang berkesimpulan bahwa, Tuhan mengutus para nabi dan memberikan putusan atau pemecahan terhadap apa-apa yang diperselisihkan atau dipersoalkan dalam masyarakat mereka. Berangkat dari rangkaian kedua ayat di atas juga diungkapkan para ulama adalah pewaris para nabi, dapat dipahami bahwa para ulama melalui pemaparan-pemaparan kitab dan pengalamannya, bertugas memberikan bimbingan dan petunjuk guna mengatasi perselisihan-perselisihan

⁶ Lihat Qur'an Surat Al-Jumu'ah: 2.

⁷ Lihat Hadis Riwayat Ibnu Adi dari Ali.

⁸ Badruddin Hsubky, Op. Cit., halaman 65.

⁹ Hadis yang sama maksudnya, Lihat Shahih Bukhori, bab Ilmu, Juz I, halaman 25, Darul Fikr, Beirut Libanon.

pendapat serta problem-problem sosial yang ada dan berkembang pada masyarakat.¹⁰

Peran dan fungsi ulama tidak hanya menyebarkan dakwah Islam saja tetapi juga berjuang melawan penjajah Belanda. Perjuangan ulama melawan penjajah Belanda di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga periode. Pertama, periode perintis dihitung dari permulaan abad XVI, ketika bangsa asing mulai berkuasa di Indonesia. Sebagai contoh perjuangan Sultan Hasanudin Raja Goa XVI (1613-1670) walaupun bukan seorang ulama dalam artian khusus, tetapi jelas motivasi perlawanan yang beliau gerakan berdasarkan ajaran agama Islam yang menentang kedzaliman, kemudian Belanda memberikan julukan "De Jonge han van Oustan". Artinya ayam jantan dari Timur.¹¹

Tengku Tjik Ditiro ulama terkenal dari serambi mekah, markas perlawanan beliau dipusatkan di kampung Tiro dekat kota Bakti (kota Pidie). Sesudah meninggal dunia kemudian diteruskan oleh saudara-saudaranya. Zent Graap dalam bukunya aceh menyebutkan, satu keistimewaan ulama-ulama Tiro adalah semua menakhiri perjuangannya sebagai syahid (meninggal di medan pertempuran). Di wilayah Sumatera Barat, perang Paderi juga dipimpin oleh seorang ulama yaitu Tengku Imam Bonjol, beliau bukan saja pamong yang adil di samping panglima perang yang cakap, berani, cerdik dan arif. Pihak Belanda mengakui di pelbagai tanah air ini, Imam Bonjol ini termasuk musuh yang paling ulung.¹² Semua perjuangan pada periode ini banyak dijiwai oleh semangat jihad Islam dan sebagian besar dipimpin oleh para ulama.

Kedua, periode perintis mulai abad XX, ketika kekuasaan Belanda semakin mencekap di Indonesia yang ditopang oleh kekuatan senjata, birokrasi pemerintah dan politik penjajahan sampai proklamasi kemerdekaan. Perjuangan pada awal abad ini dititik beratkan kepada kekuatan pikiran melawan klonial politik Belanda, dengan menggembelng semangat rakyat, menggalang kekuatan massa, mendidik generasi-generasi yang akan meneruskan perjuangan secara berkesinambungan dan usaha-usaha lainnya yang bersifat konsolidasi. Pada saat itulah tahun 1909 berdiri Serikat dagang Islam (SDI), yang dipimpin oleh Tiro Adisuryo, H. Samanhudi dan lain-lain, pada mulanya reaksi atau jawaban dari monopoli. Setelah SDI bertukar menjadi Serikat Islam (SI) dipimpin oleh H>O.S. Tjokroaminoto mulailah kelihatan pertukaran warna dan corak yang lebih berat kepada tujuan yang mengandung aspirasi ulama. Gerakan Serikat Islam (SI), yang bangkit bersamaan dengan gerakan nasional Budi

¹⁰ Quraish Shihab, membumikan al-Qur'an, Bandung: Mizan, 1997, halaman 375.

¹¹ AG. Pringgogidgo, Ensiklopedi Umum, tp.: t.pn. halaman 399.

¹² Ibid, halaman 444.

Utomo (BU), gerakan-gerakan pemuda seperti Young Java, Young Sumatra dan young Minahasa. Lambat laun gerakan ini menjadi suatu kekuatan politik yang diperhitungkan penguasa Belanda. Kemajuan serikat Islam kemudian bertukar menjadi suatu kekuatan politik yang diperhitungkan penguasa Belanda. Kemajuan serikat Islam kemudian bertukar menjadi partai Serikat Islam Indonesia (PSII), mendapat sokongan semangat dengan bangkitnya pula gerakan pembaharuan yang dipimpin oleh seorang ulama yaitu K.H. Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah (1912). Semangat gerakan yang digerakan Jamaludin al-afghani, Syeikh Muhammad Abduh, Rasyid ridha dan lain-lain dari Mesir. Bukan saja mengalir ke pulau Jawa tetapi ke pulau-pulau lain seperti Sumatera dan Kalimantan.

Di Sumatera para ulama terjun ke dalam kancah perjuangan politik dengan gerakan Persatuan Muslimin Indonesia (PERMI) yang dipimpin oleh K.H. Jalaluddin Taib, kemudian diperkuat dengan tenaga-tenaga pemuda keluaran Universitas al-Azhar seperti K.H. Muhtar Lutfi, K.H. Ya'qub dan lain-lain.

Dalam masa kurang lebih lima dasawarsa (40 tahun) pergerakan kemerdekaan ini, pada permulaan abad ke XIX peranan dan fungsi ulama dan intelegensia muslim tidak kecil, artinya berjuang bahu membahu dengan gerakan kaum nasional yang masuk dalam barisan perintis sampai kepada saat kemerdekaan, negara Indonesia di proklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno Hatta atas nama seluruh bangsa Indonesia.

Sedangkan periode ketiga, dinamakan periode pencetus adalah kalimat dari perjuangan Indonesia merdeka. Apabila ditelusuri peranan ulama dalam kancah revolusi kemerdekaan bangsa Indonesia, dapatlah disimpulkan bahwa pada umumnya, para ulama itu mendorong menggerakkan dan menjiwai perjuangan kemerdekaan. Sehingga kemerdekaan Indonesia menjadi suatu kenyataan.¹³

Menurut H.M. Nasution mengutip A. Yusuf Ali dari tafsir "The Holy Qur'an" merinci 5 peranan dan fungsi ulama sesuai dengan Qur'an Surat al-Ahzab ayat 45-46 sebagai berikut:

1. Sebagai saksi bagi semua umat manusia tentang kebenaran yang hakiki, perintis jalan dari kebodohan, kemusyrikan serta saling sengketa.
2. Pembawa kabar berita gembira (optimisme) tentang karunia Allah, walaupun sejauh manusia tersesat, tetapi berkat keimanannya dia selalu mempunyai pengharapan dan berusaha supaya dapat menempuh dan menghayati kehidupan yang lebih baik.

¹³ H.M. Yunan Nasution, Peranan Ulama dalam Kancah Perjuangan Republik Indonesia, t.t.: Panji masyarakat N. 237, halaman 30.

3. Memberi peringatan kepada manusia bahwa kehidupan yang sekarang bukanlah kehidupan tetapi masih ada lagi kehidupan yang akan datang (future life) yang lebih penting.
4. Menjadi penyeru kepada jalan kebenaran serta menunjukkan jalan-jalan untuk memperoleh karunia ampunan illahi. Sebagai obor yang menerangi seluruh alam, sebab Islam yang dikembangkan adalah satu agama yang sifatnya universal serta memancarkan cahaya ke seluruh jagat raya.

Sebenarnya sejarah telah mengukir, bahwa sejak zaman Walisongo sampai masa-masa perjuangan kemerdekaan serta revolusi fisik Indonesia, para ulama telah memperlihatkan kiprahnya secara nyata dalam membimbing dan mengayomi umat. Mereka telah menampilkan diri mereka sebagai batu nisan yang sangat berarti dalam masyarakat, dengan bertindak sebagai pelopor, pemimpin dan penggerak hati nurani masyarakat dalam menegakkan kebenaran serta menumpas kebathilan.

Pada awal-awal kemerdekaan masih banyak ulama yang kukuh dalam pendiriannya, mereka tidak hanya tinggal di surau-surau, masjid-masjid, podok pesantren dan sejumlah institusi keagamaan yang semenjak kolonial Belanda disalah tafsirkan sebagai tempat-tempat yang berpandangan picik, keterbelakangan dan sebagainya. Pada masa itu, bahkan para ulama berkiprah di bidang politik.

Pada saat sekarang ini, perubahan sosial yang dihembuskan oleh proses modernisasi banyak menimbulkan perubahan nilai dari masyarakat, sementara itu tradisi yang ada di masyarakat belum bisa menjawab permasalahan yang timbul akibat dari perubahan tadi. Oleh karena itu ulama dituntut untuk memberikan penafsiran-penafsiran baru. Dalam hal ini ada dua hal segi yang harus diperankan ulama dalam hal ini ada hal segi yang harus diperankan ulama dalam masyarakat. Pertama, membimbing masyarakat ke arah perubahan-perubahan baru supaya tidak melampaui batas-batas keagamaan. Kedua, ulama harus memodernisasikan masyarakat, fungsi agama dan tugas ulama dalam hal ini harus berada di depan di dalam menghadapi perubahan itu secara langsung karena agama adalah nilai panutan masyarakat dalam menghadapi perubahan-perubahan.

Ada beberapa kewajiban ulama yang perlu dikembangkan secara sinambung meliputi:

A. Menegakan dakwah dan Membentuk Kader Ulama:

1. Menanamkan aqidah Islam dan membebaskan semua manusia dari segala macam kemusyrikan.

2. Mengatur dan melaksanakan dakwah islam, baik terhadap umat ijabah maupun umat dakwah, termasuk suku-suku terasing di seluruh pelosok pedesaan.
3. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran Islam secara menyeluruh.
4. Membentuk kader-kader penerus ulama demi eksistensi perjuangan dakwah Islam.

B. Mengkaji dan Mengembangkan Islam:

1. Menggali nilai-nilai Islam yang bersumber dari al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma dan Qiyas.
2. Mencari gagasan baru yang Islami untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

C. Melindungi Islam dan Umatnya;

1. Memperjuangkan segala hal yang ada relevansinya dengan kepentingan umat Islam.
2. Melindungi kesucian umat Islam dari setiap rongrongan musuh Islam.
3. Memupuk rasa persatuan di antara umat Islam bila timbul perbedaan di antara mereka, apalagi perbedaan yang mengarah kepada perpecahan.¹⁴

Dengan demikian, hendaknya ulama giat mengatasi berbagai permasalahan sosial yang timbul. Misalnya, dengan memberantas kebodohan, kemiskinan dan kemusyrikan.

¹⁴ Badruddin Hsubkki, Op. Cit., halaman 66.

BAB III

KEADAAN UMUM KECAMATAN CIKANCUNG

3.1. Keadaan Wilayah Penelitian

3.1.1 Letak Wilayah dan Keadaan Geografis

Kecamatan Cikancung merupakan salah satu dari 37 kecamatan yang ada dibawah pemerintahan kabupaten DT. II Bandung. Secara geografis terletak diantara 7° LS – $7^{\circ} 46'30''$ LS dan $0^{\circ} 30'$ BT- $1^{\circ} 20'$ BT (Busur $0^{\circ} 0'0''$ adalah ibu kota negara, Jakarta). Secara fisik ibukota ini memanjang dari arah Barat ke Timur seperti bentuk kepala anak panah, landai, sesuai dengan keadaan alamnya yang berada dikaki gunung. Bentuk wilayah kecamatan ini 25% datar sampai berombak, 75% berombak sampai berbukit (Monografi Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, 2013). Secara umum Kecamatan Cikancung beriklim sedang, dengan suhu rata-rata antara 18° C- 23° dan curah hujan rata-rata 2.676 mm/tahun.

Luas wilayah Kecamatan Cikancung adalah 7.997.081 ha, terdiri atas 2.645 ha tanah pesawahan, 3.515 ha tanah kering, 82.081 ha tanah basah, 1.472 ha tanah hutan, 62 ha tanah keperluan fasilitas umum, dan 276 ha tanah tandus dan tanah pasir (Monografi Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, 2013). Tanah pesawahan meliputi 931 ha irigasi teknis, 45 ha irigasi setengah teknis, dan 1.669 ha irigasi sederhana. Tanah kering meliputi 461 ha pemukiman penduduk dan pekarangan, dan 5.054 ha tegal dan kebun rakyat. Sedangkan tanah basah seluruhnya 823 ha berupa kolam dan empang rakyat. Ketinggian kecamatan itu berkisar antara 900-1000 meter di atas permukaan laut. Topografinya yang landai, dari Barat ke Timur dan tersedianya sumber air yang memadai, memungkinkan para petani mengerjakan sawah yang dapat ditanami sepanjang tahun. Disamping itu para petani bisa mengembangkan usaha perikanan darat, baik di kolam yang tersedia maupun pesawahan yang pada umumnya dikerjakan pada saat sesudah musim tanam menjelang pada berisi (pare reuneuh). Wilayah Kecamatan Cikancung di sebuah utara berbatasan dengan Kecamatan Rancaekek. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Cicalengka, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Paseh. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten DT II Bandung. Pusat pemerintahan kecamatan berada di sebelah Timur pada jarak 39 km dari ibu kota kabupaten. Dilewati jalan raya beraspal yang menghubungkan kecamatan Nagreg dan kecamatan

Cicalengka dengan ibukota kabupaten. Kecamatan Cikancung meliputi 9 desa yang terdiri dari 20 lingkungan atau Dusun, 76 Rukun Warga (RW), dan 229 Rukun Tetangga (RT). Dari 9 Desa itu 5 desa berstatus Desa Swasembada dan 1 desa berstatus Desa Swakarsa. Desa yang terjauh berjarak 9 km dari ibukota kecamatan. Walaupun medan wilayah kecamatan Cikancung 75% berombak dan berbukit, namun sarana transportasi seperti jalan dan jembatan cukup baik dan terpelihara, bahkan dari seluruh jalan yang ada ((81 km) sekitar 60% telah diaspal dan diperkeras, sehingga hubungan antar ibukota kecamatan dengan desa-desa, dan di antara desa dengan desa yang ada di wilayah Kecamatan Cikancung sudah cukup lancar. Sarana umum yang digunakan disamping kendaraan beroda empat, juga digunakan sepeda motor (ojek) dan delman.

3.1.2 Penduduk

1) Keadaan Penduduk

Penduduk Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung pada tahun 2013 seluruhnya berjumlah 20.595 Kepala Keluarga (KK), meliputi 84.553 orang, terdiri dari 40.150 (47, 49%) laki-laki dan 44.403 (52,51%) perempuan. Hal ini menunjukkan rasio jenis kelamin (sex ratio) penduduk Kecamatan Cikancung adalah $40.150/44.403 \times 100 = 90,42$, dan tiap umpi rata-rata dihuni oleh 4,11 orang. Penyebaran penduduk tergolong merata, yang tampak dari perbandingan jumlah penduduk antara desa yang terdapat penduduknya yaitu desa Cikancung dengan desa yang paling sedikit penduduknya yaitu desa Mandalasari yakni 5.588: 2.816 orang kepadatan Kecamatan Cikancung cukup tinggi, yaitu 1.150 orang setiap kilometer persegi. Angka itu lebih tinggi dari kepadatan penduduk Kabupaten Daerah TK II Bandung dan Pulau Jawa, yang pada tahun 2011 sebanyak 565 orang dan 814 orang tiap kilometer persegi 9Biro Statistik Kabupaten daerah Tingkat II Bandung, 2013.

Adapun komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin tertera pada tabel 1 berikut:

Tabel 1: Komposisi Penduduk Kecamatan Cikancung, Bandung Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Tahun 2012/2013

No.	Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0 – 4	6.678	6.986	13.664
2	5 – 9	7.200	7.240	14.440
3	10 – 14	6.198	6.252	12.450
4	15 -19	3.150	3.699	6.849
5	20 – 24	2.854	3.499	6.353
6	25 – 29	2.577	3.033	5.610
7	30 – 34	2.368	2.872	5.240
8	35 – 39	2.242	2.703	4.945
9	40 – 44	2.031	2.372	4.403
10	45 – 49	1.721	2.023	3.753
11	50 – 54	1.365	1.612	2.987
12	55 – 59	834	1.007	1.841
13	60 – 64	506	593	1.099
14	65	424	502	926
Jumlah		40.150	44.403	84.553

Sumber: Kantor Kecamatan Cikancung, Bandung, 2012

Dari Tabel 1 tersebut dapat diketahui bahwa rasio beban tanggungan (dependency ratio) penduduk Kecamatan Cikancung adalah $41.480/43.080 \times 100 = 96,29$. Penduduk usia 5-9 tahun lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia 0-4 tahun, hal ini berarti bahwa di Kecamatan Cikancung pada tahun 2013 telah terjadi penurunan tingkat kelahiran cukup besar yang diikuti tingkat kematian cukup rendah. Hal ini dimungkinkan, mengingat masyarakat sudah melaksanakan program keluarga berencana, disamping sudah tumbuhnya kesadaran akan pentingnya pemeliharaan kesehatan serta adanya peningkatan pengetahuan masyarakat pada umumnya.

2) Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk yang pokok di bidang pertanian. Sesuai dengan keadaan alamnya yang landai dan pada umumnya bergelombang serta berbukit, usaha pertanian terutama dilakukan di tanah pertanian kering (3.515 ha) dengan tanaman utama sayur mayur, dan lain-lain, sedangkan usaha pertanian sawah menempati urutan kedua (2.645 ha) (Monografi Kecamatan Cikancung, 2012). Dari jumlah petani sebanyak 29.330 orang, petani pemilik tanah berjumlah 4.270 orang dengan rata-rata memiliki tanah hanya 0,4 ha, sedangkan sisanya 8.560 orang merupakan petani penggarap, dan 16.500 orang atau 56,27% dari seluruh petani yang ada di kecamatan ini merupakan buruh tani. Usaha

perternakan sebagai mata pencaharian, menempati urutan ke tiga dengan jumlah peternak sebanyak 7.664 orang. Perternakan domba pada umumnya dilakukan turuntemurun, dan perternakan ayam merupakan usaha perternakan paling banyak dilakukan. Dari jumlah peternak sebanyak 7.664 orang itu, sebanyak 6.472 orang atau 84,44% merupakan peternak domba dan ayam. Disamping itu, sebanyak 5.260 orang bermata pencaharian sebagai pedagang, terutama pedagang hasil bumi, baik dalam skala besar maupun dalam skala kecil. (Monografi Kecamatan Cikancung, 2012). Selain itu, jasa angkutan, pengrajin, buruh (baik sebagai buruh industri, bangunan, pertambangan maupun perkebunan), Pegawai Negeri Sipil dan Swasta, dan TNI/POLRI merupakan mata pencaharian lain disamping pertanian, perternakan dan perdagangan. Jumlah mereka seluruhnya meliputi 2.870 orang.

Untuk lebih jelasnya, komposisi penduduk menurut mata pencaharian dapat dilihat pada tabel 2 berikut.

Tabel 2: Komposisi Penduduk Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung Menurut Mata Pencaharian, Tahun 2012/2013

No.	Mata Pencaharian	Banyaknya (Orang)	Persentase
1	Petani	29.330	64,62
2	Peternak	7.664	16,88
3	Pedagang	5.260	11,59
4	Buruh (Di luar Pertanian)	1.181	2,60
5	Pengrajin/Industri Kecil	553	1,22
6	Jasa Angkutan	369	0,81
7	PNS/Swasta	732	1,61
8	TNI/POLRI	35	0,08
9	Pensiunan	267	0,59
Jumlah		45.391	100,00

Sumber: Kantor Kecamatan Cikancung, Bandung, 2012

3) Pendidikan

Lembaga pendidikan yang tersedia di Kecamatan Cikancung yang ada dibawah naungan Kementrian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) maupun Kementrian Agama (Kemenag), termasuk kategori lengkap untuk ukuran sebuah kecamatan. Di kecamatan itu tersedia Taman kanak-kanak (TK), Sekolah dasar (SD), Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP), dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA), juga tersedia *Raudatul Athfal* (RA), Madrasah Diniyah (MD), Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah.

Rincian keadaan lembaga pendidikan dimaksud dapat dilihat pada

Tabel 3 dan Tabel 4.

Disamping lembaga pendidikan tersebut terdapat pula 31 pesantren tersebar di 8 desa dari 9 desa yang ada di Kecamatan Cikancung dengan jumlah santri sebanyak 3.668 orang, dan 385 *Majlis Ta'lim* yang menyelenggarakan pengajian rutin. Pengajian ini pada umumnya diselenggarakan sesudah sholat Zhuhur (antara jam 13.00 – 15.00) dan shalat Isya (antara jam 19.00 – 21.00). Tersebarnya pelbagai lembaga pendidikan agama itu antara lain berpengaruh terhadap kecenderungan pemilihan jenis sekolah, yang biasanya “hampir” seimbang antara mereka yang memilih sekoalh umum dengan sekolah agama. Keadaan itu menunjukkan betapa kuatnya agama di lingkungan masyarakat kecamatan itu.

Tabel 3: Komposisi Lembaga Pendidikan (Dibawah Kemdiknas) Kecamatan Cikancung, Bandung, Tahun 2011/R: Kantor Kemdinas Kecamatan Cikancung, Bandung, 2012.

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Bangunan	Banyaknya	
			Murid	Persentase
1	Taman Kanak-Kanak (TK)	3	75	0,45
2	Sekolah Dasar (SD)	64	15.420	92,51
3	SMTP: Negeri	1	780	4,68
	Swasta	2	333	1,20
4	SMA swasta	1	40	0,24
Jumlah		71	16.668	100,00

Sumber: Kantor Kecamatan Cikancung, Bandung, 2012

Tabel 4: Komposisi Lembaga pendidikan (Di Bawah Kemenag) Kecamatan Cikancung, Bandung, Tahun 2011/2012

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Bangunan	Banyaknya	
			Murid	Persentase
1	Raudathul Athfal (RA)	1	30	0,27
2	Madrasah Diniyah (MD)	97	9.992	88,54
3	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	4	675	5,98
4	Madrasah Tsanawiyah	3	402	3,56
5	Madrasah Aliyah	2	186	1,65
Jumlah		71	11.285	100,00

Sumber: Kantor Penilik Pendidikan Agama Islam Kecamatan Cikancung, Bandung, 2012

Adapun tingkat pendidikan yang dicapai oleh rata-rata penduduk Kecamatan Cikancung tertera pada tabel 5 berikut.

Tabel 5: Komposisi Penduduk Kecamatan Cikancung, Bandung Menurut Pendidikan, Tahun 2011/2012

No.	Jenis Pendidikan	Banyaknya		Jumlah	Persentase
		Laki-laki	Perempuan		
1	Belum Sekolah	9.984	10.013	19.441	35,70
2	Tidak Tamat Sekolah	1.475	978	2.453	4,50
3	Tamat SD/Sederajat	12.930	10.685	23.615	43,36
4	Tamat SLTP/Sederajat	3.408	1.947	5.355	9,83
5	Tamat SLTA/Sederajat	1.605	1.301	2.906	5,33
6	Tamat	51	18	69	0,13
7	Akademik/Sederajat	53	13	66	0,12
8	Tamat Perguruan Tinggi Program PLS	-	-	-	-
Jumlah		29.506	24.955	54.461	100,00

Sumber: Kantor kecamatan Cikancung, Bandung, 2012

Merka yang tidak tamat sekolah (putus sekolah) masih cukup tinggi (4,50%) namun kalau dibandingkan dengan sebelum tahun 2011/2012 cenderung ada penurunan cukup tajam. Penduduk yang buta huruf (latin) tercatat ada 1012 orang, rata-rata berumur di atas 50 tahun, sedangkan jumlah pencari kerja tetap tercatat sebanyak 12.080 orang, terdiri dari 9.748 laki-laki dan 2.332 perempuan atau sebanyak 22,18% dari jumlah penduduk Kecamatan Cikancung.

4) Agama

Penduduk kecamatan Cikancung adalah suku sunda yang umumnya beragama Islam. Data monografi kecamatan menunjukkan bahwa mereka yang beragama Islam sebanyak 84.225 orang (99,61%), sedangkan sisanya sebanyak 328 orang (0,39%) tercatat sebagai penganut aliran Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Monografi kecamatan Cikancung, 2012). Mereka terdiri dari satu keluarga pensiunan polisi kecamatan, satu keluarga sopir angkutan umum, satu keluarga pedagang, dan yang lainnya merupakan keluarga petani penggarap dan buruh tani.

Kegiatan keagamaan umumnya dipusatkan di mesjid, langgar ataupun musholla. Di kecamatan Cikancung tercatat ada 549 sarana peribadatan, terdiri dari 224 mesjid jami dan 324 langgar atau musholla (Kantor KUA Kecamatan Cikancung, 2012).

3.2. Kepemimpinan Masyarakat

3.2.1 Satuan Sosial

Di wilayah kecamatan Cikancung, terdapat dua tipe satuan sosial yang mempunyai ciri tersendiri, tetapi dalam pelbagai hal memiliki kesamaan. Satuan sosial yang pertama didasarkan atas prinsip teritorial atau kesamaan tempat tinggal yang dibatasi oleh satuan wilayah tertentu. Satuan wilayah itu tersusun secara hirarki mulai dari kecamatan, desa, lingkungan (dusun), Rukun warga (RW), dan Rukun Tetangga (RT). Kesatuan wilayah itu merupakan wilayah administratif (penyelenggara pemerintahan) yang dipimpin seorang camat sebagai kepala wilayah. Kepala wilayah sebagai wakil pemerintah merupakan penguasa tunggal di bidang pemerintahan dalam wilayahnya untuk mengkoordinasikan pembangunan dan membina kehidupan masyarakat di segala bidang (Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan). Kedua, satuan jama'ah yang terbentuk atas dasar afiliasi dan kegiatan keagamaan, yaitu jama'ah masjid dan jama'ah musholla atau jama'ah surau (langgar). Satuan jama'ah itu dapat dikategorikan sebagai sebagai satuan sosial yang didasarkan atas prinsip kepentingan dan kegiatan khusus. Krech (1962: 105); Cohen dan Uphoff, (dalam Ndraha 1986: 5.20) mengemukakan bahwa tipe satuan sosial ini ini merupakan organisasi lokal (local organization). Menurut Esman (1982: IX), organisasi lokal sebagai organisasi yang tumbuh dari bawah (grassroots organization) dapat: (1) membantu mengembangkan komunikasi timbal balik antar berbagai pihak; (2) dijadikan sarana untuk menggerakkan dan mendorong perubahan perilaku; dan (3) memudahkan pemberian fasilitas dan pelayanan administratif kepada masyarakat. Dengan demikian keberadaan kedua tipe satuan sosial itu berhubungan erat dengan kepemimpinan masyarakat, peranan, dan cakupan pembangunan.

Pembangunan wilayah Desa, Lingkungan (dusun), Rukun Warga (RW), dan Rukun Tetangga (RT) di kecamatan itu dilaksanakan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk atau jumlah umpi (kepala keluarga) dalam suatu lokasi pemukiman, dan keadaan lingkungan fisiknya. Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, tiap RT maksimal terdiri atas 30 umpi dan tiap RW maksimal terdiri dari lima RT. Karena itu dalam pembagian wilayah tersebut sering terjadi penggabungan satuan sosial "leumbur" yang terlalu kecil, atau pemecahan

satuan sosial “leumbur” yang dianggap terlalu besar. Pembagian itu tidak didasarkan atas aspek identitas hubungan sosial, tetapi lebih mengutamakan aspek kuantitas satuan masyarakat.

Pembagian wilayah itu, diikuti dengan pengangkatan kepala wilayah yang merupakan penyelenggara dan penanggung jawab dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan desa. Karena itu satuan wilayah dapat dipandang sebagai satuan administratif yang menjadi wahana penyampaian informasi dan intruksi pemerintah dalam kegiatan pembangunan jalur atas. Sebaliknya dapat juga dijadikan wahana untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan jalur bawah. Kepala wilayah mempunyai posisi ganda yang strategis yaitu sebagai pemimpin dan bagian integral dari masyarakatnya, dan sebagai nagian dari pemerintah. Namun demikian pada kenyataannya sering tidak dapat berjalan, karena pemimpin wilayah itu tidak memiliki tenaga dan media yang memadai untuk melaksanakan fungsinya.

Satuan jama'ah diikat oleh ajaran agama Islam yang diwujudkan dalam kegiatan upacara peribadatan sosial keagamaan. Satuan jama'ah itu tidak memiliki batasan sosial jelas, walaupun identik dengan satuan wilayah tertentu, misalnya, satuan jama'ah musholla disebut jama'ah musholla Rt tertentu. Ketidakjelasan “batas fisik” satuan jama'ah itu, karena pada dasarnya satuan tersebut adalah “komunitas spiritual” yang anti struktur.

Dalam pembentukan dan pengembangan satuan jama'ah itu mesjid menempati posisi pusat kegiatan keagamaan bagi anggotanya di kampung tempat mesjid berada dan kampung-kampung sekitarnya, sedangkan musholla sebaga subordinasi pusat kegiatan itu. Pengorganisasian kegiatan keagamaan pada masing-masing mesjid ditangani oleh Dewan Keluarga mesjid (DKM), sedangkan di lingkungan musholla ditangani oleh panitia tetap yang dibentuk secara sederhana. Di dalam DKM duduk tokoh-tokoh pelbagai golongan masyarakat, seperti ajengan, tokoh pemuda, aparat pemerintahan desa, ornga kaya dan tokoh wanita.

Dewan Keluarga mesjid dan pengurus tetap musholla menyelenggarakan kegiatan keagamaan secara rutin, memelihara mesjid sebagai tempat ibadah dan juga mengadakan hubungan antar jama'ah dalam kegiatan tertentu. Disamping itu mereka melakukan pembangunan fisik dan atau merehabilisasi komplek mesjid atau musholla secara bertahap, dan menyelenggarakan kegiatan rintisan. Dengan demikian satuan jama'ah mesjid dan musholla dapat dilihat sebagai satuan pembangunan, yaitu khas pembangunan jalur bawah yang terletak pada cakupan jama'ah.

Dua tipe satuan sosial, satuan wilayah dan jama'ah itu mempunyai

ciri yang berbeda, yang pada kenyataannya saling melengkapi dan menunjang. Kegiatan yang dilakukan dalam satuan wilayah itu membutuhkan dukungan pemimpin dan fasilitas yang dimiliki satuan jama'ah. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam satuan jama'ah biasanya memanfaatkan wewenang kepala satuan wilayah; misalnya ketua RK atau RT biasanya menjadi salah satu unsur pelaksana dalam kegiatan yang dikordinasi pengurus Dewan keluarga mesjid.

3.2.2. Jenis pemimpin Masyarakat

Ada dua jenis kepemimpinan dalam kehidupan masyarakat, dalam arti orang yang mampu mempengaruhi aktifitas kelompok, yaitu (1) pemimpin formal, yaitu pemimpin yang tampil atau penunjukkan atau pengangkatan atasan dalam suatu hirarki birokrasi (pemegang kekuasaan) untuk jangka waktu tertentu; (2) pemimpin informal, yaitu pemimpin yang tumbuh dan lahir dari anggota masyarakat sendiri. Perbedaan keduanya antara lain kepemimpinan informal didasarkan atas pengakuan masyarakat, cakupan pengaruhnya tidak dibatasi wilayah administratif dan jangka waktu tertentu. Tipe pemimpin tersebut ditemukan di setiap desa yang ada di wilayah kecamatan Cikancung. Perbedaan lain antara pemimpin formal dan informal adalah terletak pada jalur komunikasinya. Pemimpin formal mempunyai jalur vertikal, sedangkan jalur horisontal hampir-hampir tidak ada walaupun dalam konsepsi yang lazim, dikatakan bahwa desa adalah kelompok primer. Di lihat dari sudut komunikasinya, kelompok primer mempunyai hubungan timbal balik (Sastrodihardjo, 1987; 57).

Pemimpin formal terdiri dari aparat pemerintahan kecamatan, desa, dan pemimpin satuan kerja tertentu (instansi vertikal dan dinas daerah). Aparatur pemerintahan kecamatan terdiri atas Camat sebagai kepala wilayah, Sekwilmat, Mantri Polisi Kecamatan, dan Kepala-kepala Urusan. Sedangkan aparat pemerintahan desa terdiri atas perangkat desa (Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, dan Kepala Dusun), ketua Rukun Warga (RW), dan ketua Rukun Tetangga (RT). Kepala desa dan perangkatnya sebagai aparat pemerintahan desa, ditetapkan dengan surat keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung; sedangkan Ketua RW dan RT dipilih oleh masyarakat yang kemudian dikukuhkan oleh masing-masing kepala desa.

Camat yang mewakili pemerintahan selaku kepala wilayah adalah penguasa tunggal dibidang pemerintahan di wilayahnya dalam arti memimpin pemerintahan, mengkoordinasi pembangunan dan membina kehidupan masyarakat di segala bidang. Jadi camat selaku administrator (penguasa tunggal) sangat menentukan keberhasilan pembangunan di wilayahnya, karena perencanaan dan pengendalian pembangunan desa ada

dibawah pimpinannya.

Dalam posisinya sebagai penanggung jawab administrasi pemerintahan desa, kepala desa mempunyai fungsi ganda, di satu pihak sebagai alat pemerintah dan pihak lain mewakili masyarakat. Dengan komunikasi yang semakin intensif dengan dunia luar, fungsi ganda kepala desa atau lurah berkembang menjadi inter mediator yang berperan penting. Saluran kepemimpinannya selain melalui satuan pemerintahan desa, juga mulai organisasi yang dibentuk pada tingkat desa seperti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), dan melalui satuan-satuan wilayah dibawah desa yaitu lingkungan (Dusun), RW, dan RT. Melalui aliran kepemimpinan itu interaksi dengan masyarakat dilakukan dalam kegiatan rutin pemerintahan, dalam kegiatan pembangunan, dan kegiatan kemasyarakatan, baik pada jalur bawah maupun jalur atas.

Kepala lingkungan (Dusun), Ketua RW dan RT, seperti Kepala Desa, secara ideal berfungsi ganda. Di satu pihak mereka adalah aparat pemerintahan desa yang menunaikan tugas pemerintahan di wilayah kerja masing-masing, di lain pihak mereka adalah pemimpin masyarakat di wilayahnya, yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang dipimpinya. Fungsi pertama lebih menonjol daripada fungsi kedua, terutama dalam kegiatan pembangunan jalur atas, seperti pembinaan generasi muda melalui Karang Taruna dan pembinaan Keluarga Berencana. Hal itu berlangsung karena pengambil prakarsa untuk menyelenggarakan pembangunan adalah pemerintah (sesuai dengan surat Kemendagri kepada Gubernur seluruh Indonesia, 9 September 1983 No. 414.3/2814 bahwa perencanaan dan pengendalian pembangunan desa berada di bawah pimpinan Camat). Karena itu, dalam banyak hal mereka lebih menonjol sebagai "perpanjangan tangan pemerintah" atau sebagai saluran untuk bertindak (*line of action*) dari pada sebagai pemimpin masyarakat setempat.

Pemimpin informal, yang lebih dikenal sebagai tokoh atau pemuka masyarakat, di kecamatan Cikancung cukup beragam. Di antara mereka, yang cukup menonjol pengaruh dan paling banyak jumlahnya, adalah pemimpin agama. Mereka adalah ulama yang di kecamatan itu lebih dikenal dengan *ajengan*. Mereka memiliki saluran kepemimpinan yang jelas dan mapan, yaitu melalui saluran jama'ah (mesjid, musholla dan majlis ta'lim), pesantren, dan madrasah. Di samping itu, media selamatan terutama yang berhubungan dengan peristiwa penting dalam daur hidup manusia, seperti kelahiran, perkawinan, dan kematian juga adalah saluran yang boleh dikatakan menjadi "hak monopoli" mereka.

Kepemimpinan ulama dalam satuan jama'ah itu tidak melalui proses pengangkatan, tetapi muncul melalui "proses penyaringan" secara terbuka tanpa mengalami hambatan struktural, seperti faktor keturunan, kekayaan,

dan atau karir jabatan (formal). Kepemimpinan itu lahir karena di dukung oleh wibawa, karakteristik pribadi dan proses interaksi yang kontinu dan mendalam. Karakteristik pribadi mereka yang menonjol antara lain, adalah: (1) dominan dan menguasai ilmu agama yang memadai; (2) mampu mengamalkan ilmunya dalam memimpin pelbagai kegiatan keagamaan; dan (3) memiliki kepekaan yang tinggi serta bertingkah laku yang dapat dicontoh oleh masyarakat banyak. Interaksi mereka dengan para pengikut dilakukan melalui kegiatan jama'ah, mesjid, pesantren, dan pelbagai upacara (seperti dalam satuan keluarga) yang selalu diwarnai unsur-unsur keagamaan. Karena itu cakupan kepemimpinan mereka, di lingkungan kecamatan atau desa berbeda. Ada ajengan "tingkat" musholla, ada ajengan "tingkat" mesjid, dan seterusnya. Dari kenyataan itu dapat diketahui pula siapa *ajengan* yang jangkauan pengaruhnya lebih luas dan menempati posisi yang penting di kalangan mereka, ataupun masyarakat.

Saluran kepemimpinan informal lainnya tidak begitu spesifik. Di kecamatan itu, tidak ditemukan satuan sosial atau pranata kemasyarakatan (diluar keluarga) yang cukup mapan dan memiliki daya ikat yang cukup kuat. Satuan ekonomi seperti arisan kurang terlihat, sedangkan usaha simpan pinjam (fasilitas perkereditan) walaupun ada, seperti Bimas, Inmas atau Insus tidak meluas. Di seluruh kecamatan hanya 141 orang saja yang memanfaatkannya, sedangkan kelompok tani seperti "kelompecapir" nampak kurang berkembang dan bergairah walaupun dikatakan mengalami kemacetan. Hal itu berhubungan dengan "pemikiran" bahwa kegiatan ekonomi, terutama kegiatan pertanian merupakan "kewajiban perseorangan", karena itu tidak mendapatkan prioritas sebagai usaha bersama, hal itu tampaknya berhubungan pula dengan pola pemilikan lahan pertanian yang makin fragmentaris, sehingga para petani "bebas" menentukan masa tanam dan jenis tanaman yang dikehendaknya. Di dalam kegiatan pertanian ini, ditemukan hubungan "*dunungan pangebong*" di kalangan petani kaya yang menyewa tanah kehutanan untuk menanam sayur mayur seperti kentang, juga hubungan "*dunungan panyawah*", meskipun cenderung berkurang karena lahan pertanian semakin menyempit sedangkan pemilikinya makin bertambah dan beragam. Saluran lainnya, seperti organisasi politik, sebagai akibat kebijaksanaan massa mengambang (*floating mass*) (berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1975, tentang Partai Politik dan Golongan Karya), tidak tampak, karena organisasi politik terjun ke pedesaan hanya dalam masa kegiatan kampanye menjelang pemilihan umum saja. Hal itu terjadi karena kepengurusan organisasi politik hanya sampai di ibu kota Daerah Tingkat II.

Saluran kepemimpinan informal itu dilakukan melalui interaksi dalam pelbagai kegiatan ketetanggaaan, kekerabatan, keagamaan, dan

hubungan kerja secara permanen. Karena itu satuan jama'ah juga menjadi saluran kepemimpinan informal, misalnya bagi tokoh-tokoh wanita yang aktif dalam "Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor KB" (UPPKA) yang melakukan berbagai kegiatan ekonomi produktif, untuk menambah (meningkatkan) pendapatan keluarga diantara para akseptor KB dan masyarakat pada umumnya. Kegiatan ini khususnya untuk menumbuhkan dinamika kelompok diantara para peserta KB agar memantapkan kesertaannya dalam ber-KB. Namun pada kenyataannya kegiatan itu tidak dapat berjalan sebagaimana diharapkan, karena para akseptor KB yang terlibat di dalam kegiatan itu tampaknya "kurang siap" dan "kurang berkemampuan" dalam mekanisme kerja kelompok di dalam kegiatan usaha bersama sebagai sasaran.

3.3. Kegiatan Pembangunan

3.3.1 Bidang dan Sektor Pembangunan

Sebagaimana telah diuraikan, pembangunan itu merupakan perwujudan interaksi sosial dalam bentuk kerja sama. Secara operasional pembangunan itu merupakan kegiatan kolektif yang dilakukan oleh unsur-unsur masyarakat dalam berbagai satuan sosial yang ada di dalam masyarakat, dilakukan secara dinamik dan berkelanjutan, berhubungan, serta terpadu dengan siklus kegiatan di dalam masyarakat. Secara konkrit pembangunan itu berupa proyek atau peristiwa pembangunan.

Kegiatan pembangunan di kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung, sebagai Unit Daerah Kerja Pembangunan Kecamatan (UDKPK)¹⁵ untuk tahun anggaran 2011/2012 seperti tertuang Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan (RPTK) mencakup bidang-bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan yang terdiri dari bermacam-macam program pembangunan, meliputi 1.284 proyek

¹⁵ Pada awalnya, cara pembangunan yang kini dikenal sebagai UDKP, disebut Daerah Kerja (DK) PMD (UU.85 Tahun 1958). Dalam DK PMD, gagasan PMD mengenai pembangunan integral, azas kekuatan sendiri, dan azas permufakatan bersama, dicobaka. Dalam Pelita I, DK PMD diubah menjadi unit DK PMD (UDK PMD) dengan fungsi utama sebagai percontohan, dan titik beratnya masih pada PMD. Dalam Pelita II, UDK PMD diubah menjadi Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDK P) dengan fungsi utama sebagai sistem akselerasi pencapaian Desa swasembada di bawah koordinasi Camat (UU.5 Tahun 1974). Sebutan PMD tidak digunakan lagi. Dalam Pelita III, nama UDKP tetap digunakan, tetapi fungsinya berubah menjadi sistem pembangunan wilayah (kecamatan) terpadu. (Mubyarto, 1984: 58). Jadi tekanan diletakan pada wilayah kecamatan, bukan pada masing-masing desa. Dalam Pelita IV, UDKP diubah lagi menjadi UDKP kecamatan (UDKPK) dimana perencanaan dan pengendalian pembangunan desa berada di bawah pimpinan Camat (Surat Kemendagri kepada Gubernur seluruh Indonesia, Tanggal 9 september 1983 No. 414.3/2814).

(peristiwa) pembangunan. Kegiatan-kegiatan pembangunan itu merupakan usaha penyediaan berbagai sarana kehidupan masyarakat, baik yang berupa pembangunan fisik maupun yang berupa pengorganisasian masyarakat. Semua itu dimaksudkan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dalam berbagai segi, sebagaimana tercermin dalam program pembangunan pada tabel

Disamping itu ada beberapa kegiatan pembangunan yang tidak dituangkan dalam RPTK, yaitu penyelenggaraan Zakat Fitrah, penyelenggaraan Qurban Hewan, penyantunan Anak Yatim, dan pembinaan Mental Keagamaan yang diselenggarakan oleh 31 pesantren dan 385 Majelis Ta'lim yang tersebar di seluruh desa yang ada di wilayah kecamatan Cikancung.

Tabel 6: Kegiatan Pembangunan di Kecamatan Cikancung Kabupaten DT II Bandung Tahun Anggaran 2011/2012

No.	Program Pembangunan	Banyaknya Peristiwa
1	Intensifikasi Padi, Palawija, dan Sayuran (IPPS)	24
2	Demplot Padi sawah (DPS)	2
3	Penyuluhan Pengetahuan dan Keterampilan Pertanian (PPKP)	4
4	Penyuluhan Pengendalian Hama dan Penyakit (PPHP)	24
5	Sengonisasi Desa (SD)	24
6	Pembangunan Sarana Pengairan (PSP)	4
7	Kursus Tani bagi Pondok Pesantren (KTPP)	10
8	Pembangunan dam Air (PDA)	5
9	Intensifikasi Kolam dan Sawah Perikanan (IKSP)	3
10	Intensifikasi Kolam Desa Pembenihan (IKDP)	7
11	Intensifikasi Produksi Susu Sapi (IPSS)	4
12	Pengembangan Ternak Domba (PTD)	4
13	Demplot Rumput Ternak (DRT)	7
14	Tambahan Lokal Gedung SD	31
15	Rehabilitasi Gedung SD	9
16	Pembangunan Perumahan SD	19
17	Pembangunan Masjid Jami	2
18	Rehabilitasi Gedung Madrasah Ibtidaiyah	416
19	Penyelenggaraan Zakat Fitrah	205
20	Penyelenggaraan Qurban Hewan	416
21	Pembinaan Mental Keagamaan	2
22	Penyantunan Anak Yatim	2
23	Pembangunan Gedung SLTP	1
24	Pembangunan Gedung SLTA	1
25	Pembangunan Jaringan Telepon	1
26	Penetrasi Jalan Pemulihan	7
27	Pengerasan Jalan Desa	1
28	Perluasan Terminal Angkutan Kecamatan	1

30	Pembangunan Jembatan	3
31	Rehabilitasi Pasar Kecamatan	24
32	Pengembangan Koperasi Unit Desa	3
33	Penyelenggaraan Kader kesehatan	2
34	Pembinaan Karang Taruna	1
35	Pembangunan Saluran Air Bersih	11
36	Pembangunan Pipa Air Bersih	1
37	Perbaikan Perumahan dan Lingkungan Desa Terpadu	2
38	Pembangunan Jamban Keluarga	3
39	Pembangunan Sarana Pembuangan Air Limbah	1
40	Rehabilitasi Puskesmas Pembantu	1
41	Pembangunan Listrik Masuk Desa	1
42	Pembangunan Gedung kemantren	24
43	Pembinaan Pertahanan Sipil Desa	4
44	Pembangunan Kantor Desa	22
	Dana Usaha Kesehatan masyarakat dan Dana Kematian	
Jumlah Peristiwa Pembangunan		1.384

Sumber: Kantor Kecamatan Cikancung, 2012

Program-program pembangunan itu, dapat di kelompokkan ke dalam bidang dan sektor seperti terlihat pada tabel 7. Dari tabel itu dapat diketahui bahwa frekuensi pembangunan bidang ekonomi sebanyak 177 peristiwa, bidang sosial budaya sebanyak 1.178 peristiwa, bidang politik sebanyak 5 peristiwa dan bidang pertahanan keamanan sebanyak 24 peristiwa. Hal itu menunjukkan bahwa kegiatan pembangunan di kecamatan itu adalah bidang sosial budaya terutama sektor keagamaan (76,59%) sedangkan pembangunan ekonomi menempati urutan kedelapan (12,79%).

Tabel 7: Kegiatan Pembangunan di Kecamatan Cikancung, Pada masing-masing Bidang dan Sektor Pembangunan Tahun 2011/2012

Bidang	Sektor	Program	Proyek/Peristiwa	
			Frekwensi	%
Ekonomi	Pertanian	IPPS, DPS, PPKP, PPHP, SD, PSP, KTPP, PDA	116	8,38
	Perikanan	IKSP, IKDP	8	0,58
	Perternakan	IPSS, PDG, DRT	15	1,08
	Perhubungan	PJT, PJP, PJD, PPJAK, PJ.	13	0,94
Sosial Budaya	Perdagangan	RPK, PKUD	25	1,81
	Pendidikan	TLGSD, RGSD, PPSD, PGSLTP, PGSLTA	50	3,61

Politik Pertahanan/Ke amanan	Keagamaan	PMJ, RGMI, PJF, PQH, PA Y, PMK.	1.060	76,59
	Kesehatan/KB	PKK/KB, PJK, SPAL, RPP, DUKM, KM.	51	3,68
	Kesejahteraan Sosial	PKT, PPAB, PSAB, PLMD, P2LDT.	17	22
	Pemerintahan	PGGK, PKD.	5	0,36
	Keamanan	PPSD.	24	1,73
Jumlah Proyek/Peristiwa Pembangunan			1.384	100,00

Sumber: Kantor Kecamatan Cikancung, 2012

Pembangunan di bidang ekonomi tampak cukup beragam, baik yang berbentuk pembangunan fisik maupun pengorganisasian masyarakat yang secara langsung berhubungan dengan kegiatan ekonomi, Khususnya dengan usaha-usaha pertanian, perikanan, dan peternakan. Yang cukup menarik di bidang ekonomi ini (khusus di bidang peternakan) adalah pengembangan “Domba Rakyat”. Sebelum ini “Domba Rakyat” sebagai domba ras unggul, khususnya yang jantan, dikenal sebagai “Domba Adu” yang gagah dan mampu bertanding dengan baik dikembangkan dan dipelihara secara tradisional. Pada saat sekarang atas anjuran salah seorang ulama yang cukup terkenal di kecamatan Cikancung, pengembangan “Domba Adu” lebih diarahkan untuk kebutuhan pangsa pasar sebagai domba sayur khususnya untuk kebutuhan qurban pada setiap Hari raya Qurban (Idul Adha). Dengan dorongan itu, para peternak tampak bergairah untuk mengembangkannya, mengingat setiap menjelang Idul Adha harga domba jantan cukup tinggi. Saat ini di kecamatan Cikancung ada 2.219 peternak dengan bibit unggul ada sebanyak 9.098 ekor.

Dengan dilakukannya penetrasi dan pengerasan jalan di 7 desa sepanjang 16.200 KM, telah memperlancar kegiatan perekonomian dan hubungan antar desa dengan desa lainnya, serta antara desa dengan ibu kota kecamatan. Penetrasi dan pengerasan jalan itu hampir seluruhnya dilakukan dan dibiayai masyarakat secara swadaya, sisanya disamping subsidi dari pemerintah, untuk beberapa proyek mendapat bantuan dari pihak swasta dan TNI pada saat melakukan kegiatan “Bakti TNI” dan “TNI Masuk Desa” (TMD).

Sama halnya dengan pembangunan di bidang ekonomi, pembangunan di bidang sosial budaya di kecamatan itu juga cukup beragam, baik yang berbentuk pembangunan fisik maupun pengorganisasian masyarakat. Dalam bidang sosial budaya itu, bahkan dalam pembangunan masyarakat pada umumnya, pembangunan sektor

keagamaan, baik fisik maupun pembiayaannya, menempati posisi yang paling sentral. Perhatian, kesungguhan, dan kesediaan masyarakat untuk melakukan pembangunan keagamaan tampaknya erat hubungannya dengan pemikiran mereka, bahwa kegiatan itu merupakan kewajiban yang memiliki nilai ibadah. Menurut mereka, beramal untuk agama akan mendapat pahala di akhirat nanti. Secara khas pemikiran yang memiliki makna (nilai) eskatologis itu, sering dikemukakan dalam percakapan sehari-hari dengan ungkapan *“itung-itung nyengcelengan, keur sampeureun jaga”*.

Sektor lain yang cukup berhasil dalam pembangunan bidang sosial-budaya, padahal pada tahun-tahun sebelumnya sulit untuk berkembang, adalah sektor kesehatan dan Keluarga Berencana. Jumlah akseptor yang terdaftar pada saat penelitian sebanyak 1.064 orang atau 78,55% dari sebanyak 13.067 Pasangan Usia Subur (PUS) yang ada. Walaupun masih ada 2.803 PUS (21,45%) yang belum terdaftar sebagai peserta keluarga berencana, kecamatan Cikancung pada saat ini menempati urutan ke 13 dari 37 kecamatan yang ada di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bandung. Padahal pada tahun sebelumnya 2010/2011 masih menempati urutan ke 22. Menurut Camat selaku kepala wilayah, meningkatnya minat masyarakat untuk mengikuti program keluarga berencana karena ulama bersikap tidak menentang, bahkan pada langkah-langkah tertentu ikut terlibat dan memberikan kontribusinya untuk keberhasilan keluarga berencana, antara lain terlibat dalam setiap Rakor (Rapat Koordinasi) KB kecamatan dan dalam kegiatan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) secara teratur. Pendapat Camat itu menunjukkan bahwa ulama mempunyai pengaruh yang mendalam di kalangan masyarakat. Karena itu “restu” mereka yang mengacu pada norma-norma agama, mempengaruhi kesetaraan masyarakat dalam program keluarga berencana. Kenyataan itu menunjukkan bahwa masyarakat kecamatan Cikancung masih bercorak “tradisional agamis”, karena itu peran pemikiran ulama di masyarakat sangat berpengaruh.

Pembangunan di bidang politik merupakan usaha untuk memperlancar jalannya pemerintahan, mengkoordinasi pembangunan, dan membina kehidupan masyarakat di segala bidang. Sebagai konsekuensi dari kebijaksanaan itu peranan pemerintah kecamatan yang mewakili tata institusional suatu lembaga (dalam hal ini pemerintah) memegang peranan sentral. Karena itu dengan makin bertambah jumlah penduduk dan makin kompleksnya usaha pembangunan, kecamatan Cikancung telah diputuskan untuk dipecah menjadi dua satuan wilayah administrasi yaitu kecamatan Cikancung dan kecamatan Cijapati. Berkaitan dengan itu, kegiatan pembangunan di bidang politik yang dilakukan (pada saat penelitian dilakukan) antara lain pembangunan gedung Kemanterean Cijapati diatas

tanah carik desa srirahayu seluas 90 M2, atas prakarsa ulama setempat secara swadaya. Sedangkan pelaksanaan pembangunannya dikerjakan oleh “Badan Pelaksana Pembangunan Kemantren Cijapati” yang diketua kepala desa setempat. Gedung kemantren itu berada dipegunungan lingkungan wisata Cijapati, berjarak 14 KM arah selatan ibu kota kecamatan Cikancung. Selain pembangunan gedung kemantren, juga dilakukan pembangunan satu kantor desa baru yaitu kantor desa Cijapati. Di samping alasan keadaan penduduk yang makin bertambah serta makin kompleksnya usaha pembangunan, pemecahan (pemekaran) wilayah kecamatan Cikancung dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan alam dan keseimbangan antara organisasi dengan luas wilayah dan pelayanan.

Pembangunan di bidang keamanan adalah pembinaan pertahanan sipil desa. Kegiatan ini merupakan usaha lanjutan dari usaha penyediaan sarana fisik keamanan, sesuai dengan petunjuk dari “atas”. Pembinaan itu lebih menekankan kepada usaha peningkatan kwaspadan agar keamanan dan kestabilan yang telah tercapai di desa-desa di seluruh wilayah kecamatan Cikancung dapat dipelihara dan dipertahankan.

3.3.2 Jalur-jalur Pembangunan

Prakarsa pembangunan bisa datang dari pemerintah, dari atas ke bawah (*top down*), juga bisa datang dari masyarakat, dari bawah ke atas (*bottom up*). Dengan demikian menurut jalurnya, pembangunan masyarakat desa bisa dikatakan terdiri atas pembangunan jalur atas dan pembangunan jalur bawah. Pada masing-masing jalur itu terdapat dua “model” pembangunan dengan karakteristik yang berbeda (lihat tabel 8).

Kegiatan pembangunan di kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung 2011/2012 menunjukkan bahwa keempat model pembangunan itu dapat dibedakan dari unsur pemrakarsa, pengelola, dan pembiayaannya. Model pertama adalah pembangunan jalur atas yang diprakarsai, dikelola, dan dibiayai pemerintah, terdiri atas: Pembangunan Dam Air (PDA), Pembangunan Jembatan (PJ), Perluasan Terminal Angkutan Kecamatan (PTAK), Pembangunan Jaringan Telpon (PJT), Rehabilitasi Pasar Kecamatan (RPK), Rehabilitasi Gedung SD (RGSD), Pembangunan Perumahan SD (PPSD), Pembangunan Gedung SLTP dan SLTA (PGSLTP dan SLTA), dan Rehabilitasi Gedung Madrasah Ibtidaiyah (RGMI). Model kedua, adalah pembangunan jalur atas yang diprakarsai pemerintah (atas dasar “usulan” masyarakat), dikelola pemerintah, dibiayai pemerintah, ditunjang oleh masyarakat.

Tabel 8: Frekwensi kegiatan pembangunan di Kecamatan Cikancung Menurut Jalur/Model dan Bidang/Sektor Pembangunan Tahun 2011/2012

Jalur/Model Pembangunan	Atas		Bawah		Jumlah
	Model		Model		
	1	2	3	4	
Ekonomi:					
(1) Pertanian	10	28	48	30	116
(2) Perikanan	-	-	8	-	8
(3) Peternakan	-	-	7	8	15
(4) Perhubungan	2	4	7	-	13
(5) Perdagangan	1	-	-	24	25
Sosial Budaya:					
(6) Pendidikan	50	-	-	-	50
(7) Keagamaan	-	2	141	1.017	1.060
(8) Kesehatan/KB	1	2	2	46	51
(9) Kesejahteraan Sosial	1	12	5	-	17
Politik:					
(10) Pemerintahan	-	4	1	-	5
Pertahana Keamanan:					
(11) Keamanan	65	-	-	24	24
Jumlah	65	51	119	1.149	1.384

Sumber: Kantor Kecamatan Cikancung, 2012

Kegiatan pembangunan “model” kedua, pada umumnya merupakan proyek inpres yang “dibantu” masyarakat, terdiri dari: Penyuluhan Pengetahuan dan Keterampilan Pertanian (PPKP), Penyuluhan Pengendalian Hama dan Penyakit (PPHP), Penetrasi Jalan Pemulihan (PJP), Pembangunan Pipa Air Bersih (PPAB), dan Pembangunan Kantor Desa (PKD). “Model” ketiga, adalah pembangunan jalur bawah yang diprakarsai, dikelola, dan dibiayai oleh masyarakat dengan mendapat bantuan dari pemerintah berupa subsidi atau biaya “rangsangan”. Pembangunan “model” tiga itu terdiri atas: Intensifikasi Padi, Palawija dan sayuran (IPPS), Intensifikasi kolam dan Sawah Perikanan (IKSP), Intensifikasi Kolam Desa Pembenihan (IKDP), Intensifikasi Susu Sapi (ISS), Pengerjaan Jalan Desa (PJD), Pembangunan mesjid Jami (PMJ), Pembangunan Sarana Pembuangan Air Limbah (PSPAL), Pembangunan Saluran Air Bersih (PSAB), Pembinaan Karang Taruna (PKT), Perbaikan Perumahan dan Lingkungan Desa Terpadu (P2LDT), dan Pembangunan Kemantren Cijapati (PKC). “Model” keempat adalah pembangunan jalur bawah yang diprakarsai, dikelola, dan dibiayai oleh masyarakat (swadaya murni) terdiri dari: Demplot Padi sawah (DPS), Pengembangan Domba

Rakyat (PDR), Demplot Rumput Ternak (DRT), Pengembangan Koperasi Unit Desa (PKUD), Pengembangan Zakat Fitrah (PZF), Penyelenggaraan Qurban Hewan (PQH), Pembinaan mental Keagamaan (PMK), dan Penyantunan Anak Yatim (PAY). Perincian kegiatan pembangunan pada empat “model” pembangunan itu secara lengkap (lihat tabel 8) menunjukkan bahwa dari 177 proyek pembangunan di bidang ekonomi (12,79% dari seluruh kegiatan pembangunan), 132 proyek (74,58%) merupakan prakarsa masyarakat (jalur bawah), 70 proyek (53,03%) diantaranya mendapat bantuan (subsidi) dari pemerintah. Sisanya sebanyak 45 proyek (25,42%) merupakan program yang diprakarsai oleh pemerintah (jalur atas), terdiri dari proyek pembangunan fisik sebanyak 13 proyek (28,89%) dan 32 proyek (71,11%) berupa pengorganisasian masyarakat (non-fisik).

Pembangunan bidang sosial-budaya menempati proporsi terbesar, meliputi 1.178 proyek (85,12%) dari seluruh kegiatan pembangunan. Hal itu menunjukkan bahwa pembangunan bidang sosial-budaya baik pada jalur atas maupun jalur bawah mendapat perhatian lebih besar dibandingkan dengan bidang lainnya. Dari 1.178 proyek itu, 1.060 proyek (89,98%) merupakan proyek sektor keagamaan, terutama pada jalur bawah tampaknya mendapat perhatian (prioritas) utama dibandingkan sektor lainnya.

Pembangunan di bidang politik dan pertahanan keamanan mendapat proporsi yang rendah, hanya meliputi 29 kegiatan atau 2,9% dari seluruh proyek, terdiri dari 5 (27,24%) proyek fisik dan 24 (80,76%) proyek non fisik berupa pengorganisasian masyarakat. Menurut Camat selaku kepala wilayah, hal ini terjadi mengingat pembangunan di bidang politik dan pertahanan keamanan secara vertikal sepenuhnya merupakan kebijakan dari atas (pusat).

Pengelolaan pembangunan yang mencakup pelbagai bidang pada kedua jalur itu dilakukan oleh beragam satuan pengelola pembangunan, yang sekaligus menjadi penanggungjawab atau pelaksana pembangunan. Satuan pengelola pembangunan itu ada dari pemerintah atau instansi tingkat kabupaten dan pemerintah desa, ada dari Majelis Ulama, pengurus Dewan Keluarga Masjid (DKM), pengurus majlis ta'lim, pimpinan pesantren dan madrasah serta kepanitiaan-kepanitiaan yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan setempat.

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa disamping pemerintah, di kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung, terdapat organisasi-organisasi masyarakat yang menjadi satuan pengelola pembangunan. Yang menarik adalah begitu menonjolnya organisasi-organisasi keagamaan terlibat dalam pelbagai kegiatan pembangunan, walaupun begitu pembangunan sektor keagamaan tampaknya tetap menempati posisi sentral dalam

kegiatan pembangunan. Hal itu merupakan suatu indikator bahwa masyarakat kecamatan Cikancung memiliki animo yang cukup besar terhadap kegiatan pembangunan, khususnya pembangunan sektor keagamaan, dan ini jelas merupakan salah satu ciri dari masyarakat yang “masih” bercorak tradisional-agamis.

3.3.3 Dana Pembangunan

Dana pembangunan yang digunakan untuk setiap proyek pembangunan cukup beragam. Dana pembangunan fisik umumnya relatif cukup besar, sedangkan dana pembangunan non-fisik, yaitu pengorganisasian masyarakat, relatif kecil. Bahkan ada beberapa kegiatan pembangunan non-fisik yang tidak dapat diketahui berapa besar pendanaannya, seperti pembangunan mental keagamaan dan pembinaan pertahanan sipil desa.

Sumber pendanaan pembangunan berasal dari dua sumber, yaitu dari pemerintah dan masyarakat. Dari pemerintah berupa bantuan dari APBN, APBD I, APBD II, dan INPRES, sedangkan dari masyarakat berupa swadaya baik dalam bentuk uang, sumbangan natura berupa tanah atau barang lainnya seperti kayu, batu, semen dan lain-lain, serta bentuk tenaga, hususnya bagi mereka yang tidak mampu menyumbang dalam bentuk uang atau barang.

Pengumpulan dana dari masyarakat untuk kegiatan pembangunan yang dikelola pemerintah setempat dilakukan dengan dua cara, yaitu (1) pemungutan uang tunai sesuai dengan hasil musyawarah bersama pihak-pihak yang berkepentingan secara langsung dengan kegiatan pembangunan; keputusan pemungutan uang tunai itu, dilakukan pada forum koordinasi rapat mingguan kecamatan yang dilaksanakan pada setiap hari senin yang dihadiri kepala Desa atau Kelurahan dan Dinas yang ada di Kecamatan Cikancung; (2) Pengumpulan sumbangan natura dari warga masyarakat setempat berupa tanah, batu, pasir dan lain-lain, sesuai dengan kebutuhan pembangunan yang sedang dilaksanakan.

Pengumpulan dana untuk kegiatan pembangunan yang dilaksanakan masyarakat sendiri lebih beragam jika dibandingkan dengan cara yang ditempuh untuk pembangunan yang dilakukan pemerintah. Sedikitnya ada lima cara, sebagai berikut: Pertama, pemungutan uang yang ditentukan jumlahnya untuk tiap satuan RT atau RW dengan memperhatikan umpi yang kaya dan miskin, dikumpulkan oleh para RT atau RW, atau petugas lain yang ditunjuk untuk itu. Cara yang pertama itu disebut “urunan desa”, besarnya ditentukan dalam musyawarah BPD. Sebagai anggota BPD, ulama terlibat langsung dalam penentuan “urunan desa” ini. Kedua, berupa dana keagamaan yang telah ditentukan bagiannya, seperti dari zakat fitrah dan zakat harta (mal). Ketiga, pemungutan infaq rutin melalui kenc leng

pangaosan di setiap majlis ta'lim yang menyelenggarakan pengajian, kencleng jum'atan disetiap mesjid yang menyelenggarakan sholat jum'at, dan jempitan (beas perelek) di setiap majlis ta'lim kaum wanita, serta gerakan pembinaan keluarga sejahtera. Keempat, diperoleh dari sumbangan "jariah" atau "titipan" dari mereka yang keadaan sosila ekonominya cukup baik. Baik yang tinggal di wilayah kecamatan Cikancung maupun di luar kecamatan Cikancung. Kelima, sumbangan dari warga masyarakat asala kecamatan Cikancung yang tinggal atau mencari nafkah di kota-kota besar dan cukup berhasil seperti di Jakarta atau bahkan di luar Negeri.

Pada cara pengumpulan dana jenis kedua, ketiga, keempat, dan kelima, seperti cara pertama, ulama terlibata langsung, baik sebagai ketua Satgas Amilin Zakat, sebagai penyelenggara pengajian dan jum'atan, sebagai orang yang dipercaya para penyumbang "jariah", maupun sebagai penanggung jawab sumbangan pembangunan dari para donatur warga kecamatan Cikancung yang tinggal atau mencari nafkah di kota-kota besar.

Gambaran rinci mengenai besarnya dana pembangunan pada setiap bidang dan sektor dapat dilihat pada tabel 9.

Tabel 9: Frekwensi Peristiwa, Sumber dan Alokasi dana pada Masing-Masing Bidang/Sektor Pembangunan di Wilayah Kecamatan Cikancung tahun 2011/2012

Dana Bidang/ Sektor Pembangunan	Proyek		Pemerintah		Masyarakat		Ket.
	F	%	Rp. (Dalam Ratusan Ribu)	%	Rp. (Dalam Ratusan Ribu)	%	
Ekonomi:							*) Dana Pembangunan tidak diketahui
(1) Pertanian	116	8,38	250,000	31,9	184,500	35,44	
(2) Perikanan	8	0,58	*)	-	18,500	3,55	
(3) Peternakan	15	1,08	*)	-	17,000	3,27	
(4) Perhubungan	13	0,94	20,800	2,66	64,500	12,39	
(5) Perdagangan/Koprasi	25	1,81	*)	-	8,000	1,54	
Sosial Budaya							
(6) Pendidikan	50	3,61	449,112	57,4	*)	-	
(7) Keagamaan	1.060	76,59	27,500	3,51	176,385	33,88	
(8) Kesehatan/KB	51	3,68	1,400	0,18	12,290	2,48	
(9) Kesejahteraan Sosial	17	1,22	20,800	2,66	19,813	3,81	
Politik							
(10) Pemerintahan	5	0,36	13,000	1,66	19,000	3,65	
Pertahanan Keamanan							
(11) Keamanan	25	1,73	*)	-	*)	-	
Jumlah	1.384	100	782,612	100	520,618	100	

Sumber: Kantor Kecamatan Cikancung, 2012

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Identitas Responden

4.1.1 Usia, Pendidikan, dan Pekerjaan

1) Usia

Usia responden berkisar antara 30 sampai dengan 74 tahun, secara rinci responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel 10 berikut:

Tabel 10: Distribusi responden Menurut Usia

Nomor	Usia	F	%
1	25 - 29	-	-
2	30 - 34	3	6
3	35 - 39	5	10
4	40 - 44	6	12
5	45 - 49	5	10
6	50 - 54	17	34
7	55 - 59	8	16
8	60 - 64	4	8
9	65 - 69	1	2
10	70 - 74	1	2
11	75 +	-	-
Jumlah		50	100

Sumber: Hasil Sensus Lapangan, 2013

Dari latar belakang usia responden dapat diketahui bahwa penyebaran frekwensi responden relatif merata, walaupun responden yang

berusia 50-54 tahun lebih banyak dibandingkan dengan tingkat usia responden di atas maupun di bawahnya. Hasil itu menunjukkan kecenderungan, bahwa mereka memiliki wawasan dan bekal pengalaman yang relatif lebih banyak dalam melakukan interaksi dengan situasi masyarakat dan lingkungannya. Semua itu akan berpengaruh pula terhadap pembentukan “kepribadian” dan “kekuatan sosial”nya sebagai pemimpin. Dalam hal ini, French dan Raven (dalam Hadipranata, 1982) memberikan arti bahwa “kekuatan sosial” sebagai suatu pengaruh kemampuan seseorang untuk mempengaruhi dan mengendalikan orang lain. Sedangkan “kepribadian” menurut Allport (dalam Sumadi, 1982) adalah organisasi dinamik sistem psikofisik dalam individu yang memberikan corak yang khas dalam caranya menyesuaikan diri dengan lingkungan. Faktor “kepribadian” seorang yang senantiasa mempengaruhi dan mengendalikan ini, sesuai dengan situasi, akan menambah keanggunan pemimpin, dan menambah kepercayaan para anggotanya (masyarakatnya).

2) Tingkat Pendidikan

Secara profesional, latar belakang responden hampir semuanya pernah mengikuti pendidikan di sekolah atau madrasah. Hanya seorang responden yang tak pernah mengecap pendidikan pesantren lebih dari 10 tahun. Sebagian besar dari mereka umumnya melanjutkan pendidikan lanjutan di madrasah (Tsanawiyah dan Aliyah), dan Pendidikan Guru Agama (PGA 6 tahun). Tiga orang diantara mereka pernah mengikuti pendidikan agama sampai program sarjana, yang merupakan pendidikan formal tertinggi di kalangan mereka (responden). Mereka menempuh pendidikan formal agama rata-rata 11 tahun, melebihi rata-rata pendidikan pemimpin masyarakat desa lainnya di kecamatan Cikancung. Secara rinci keadaan pendidikan responden dapat dilihat pada tabel 11.

Pendidikan dasar mereka peroleh di desa mereka masing-masing, empat puluh responden di desa-desa wilayah kecamatan Cikancung, dan sembilan responden di desa-desa luar kecamatan Cikancung karena berasal dari luar kecamatan Cikancung. Sedangkan pendidikan menengah (tsanawiyah/SLTP, Aliyah/SLTA, dan PGA 6 tahun) umumnya diperoleh di ibu kota Kabupaten Bandung. Responden yang mengikuti pendidikan tinggi, dua orang lulusan Universitas Islam Negeri Bandung, satu orang lulusan Universitas Islam negeri Yogyakarta, sedangkan satu orang yang tidak tamat juga merupakan atau pernah mengikuti kuliah sampai tahun kedua di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah Cicalengka Kabupaten Bandung.

Tabel 11: Distribusi Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	F	%
1	Ibtidaiyah/SD Tidak Tamat	-	-
2	Ibtidaiyah/SD Tamat	16	32
3	Tsanawiyah/SLTP Tidak Tamat	2	4
4	Tsanawiyah/SLTP Tamat	7	14
5	Aliyah/SLTA Tidak Tamat	5	10
6	Aliyah/SLTA Tamat	2	4
7	PGA 6 Tahun Tidak Tamat	3	6
8	PGA 6 Tahun Tamat	10	20
9	PT Agama Tidak Tamat	1	2
10	PT Agama Tamat	3	6
11	Pesantren	1	2
Jumlah		50	100

Sumber: Hasil Sensus Lapangan, 2013

Hampir seluruh responden pernah menempuh pendidikan pesantren, umumnya di pesantren di wilayah Kecamatan Cikancung. Mereka menempuh pendidikan pesantren rata-rata kurang lebih 6 (enam) tahun, terendah selama dua tahun dan tertinggi selama 10 (sepuluh) tahun. Mereka yang menempuh pendidikan madrasah dan juga pesantren merupakan bagian terbesar (98%) dari seluruh responden.

Latar belakang pendidikan responden seperti itu sudah tentu merupakan modal utama yang mereka miliki untuk berbuat sesuai dengan peranannya dalam pelbagai kegiatan di masyarakat. Bobot pendidikan yang mereka dapatkan akan membentuk “kepribadian” mereka menjadi individu-individu yang senantiasa mampu mengendalikan kelompok sosialnya sesuai dengan situasi, sehingga akan menambah keanggunan dirinya sebagai pemimpin sebab “pengarahannya” akan menjadi lebih relevan dan menambah kepercayaan anggotanya (Levinger, 1972, dalam Hadipranata, 1982). Bobot pendidikan mereka itu, juga telah menjadikan norma-norma sebagai standar kelompok yang dipergunakan sebagai pegangan untuk bertindak dalam pelbagai kegiatan masyarakat (pembangunan), sehingga norma-norma agama itu memasyarakat menjadi “norma sosial” (harapan masyarakat tentang bagaimana anggota masyarakat harus bertindak) dan “nilai-nilai” (keteguhan pendirian tentang bagaimana seseorang harus bertindak dan memeprijuangkan cita-cita atau tujuannya) bagi masyarakat luas (Rokeach, 1973, dalam Hadipranata, 1982).

Yang cukup menarik dari mereka adalah kehausan akan informasi ilmu (agama) dan usaha untuk menjaga agar ilmu tetap segar dan aktual. Keadaan seperti itu tampak pada usaha mereka yang selalu berusaha menambah ilmu dengan menyelenggarakan pengajian khusus bagi lingkungan mereka, dengan mendatangkan ulama-ulama senior (ajengan yang dipandang sebagai “sesepuh” dan “guru” mereka). Ulama yang sering didatangkan antara lain: Ajengan pengasuh pondok pesantren “Sukahurip” dan “Al-falah” Cicalengka Bandung. Dari kecamatan Cikancung yang rutin diundang adalah ajengan pesantren Al-Jawami karena sebageian besar ajengan yang ada di kecamatan Cikancung adalah alumnus pesantren ini. Mereka juga selalu mengikuti pengajian Kamisan yang diselenggarakan lembaga pendidikan “Asyahidiyah” Cicalengka yang selalu menampilkan K.H. Ahmad Syahid sebagai pembicara, yang menurut salah seorang responden merupakan ulama besar dan mempunyai pengaruh serta kharisma yang luas, unggul secara normal maupun sebagai seorang alim yang patut menjadi panutan.

Kegiatan yang dilakukan mereka itu menunjukkan beberapa ciri yang melekat pada diri mereka, antara lain (1) mereka memiliki kesadaran yang begitu tinggi untuk tetap menuntut ilmu sebagai upaya meningkatkan kemahiran mereka dalam memahami ajaran agama yang pernah dipelajari baik di madrasah, pesantren, maupun lembaga pendidikan lainnya. Kesadaran itu didasarkan atas suatu pemikiran, yang menurut mereka dirujuk dari salah satu hadis nabi yang sangat dikenal, bahwa menuntut ilmu itu merupakan kewajiban yang berakhir pada saat ajal tiba (sampai liang lahat). Pemikiran itu, bagi mereka menjadi salah satu dasar dalam usaha melanjutkan tradisi intelektual Islam yang diwariskan secara terus menerus melalui saluran madrasah, pesantren, dan kelompok-kelompok pengajian; (2) mata rantai intelektual antara guru dengan murid tetap terpelihara (Dhofier, 1982). Hal itu didasarkan pada suatu pemikiran, sebagai norma menuntut ilmu yang telah diajarkan oleh ulama terdahulu, bahwa hubungan guru dan murid bagaikan hubungan antara bapak dengan anak. Perasaan hormat dan kepatuhan murid kepada gurunya berlaku seumur hidup. Melupakan ikatan dengan guru dianggap sebagai suatu aib besar, di samping akan menghilangkan *barakah* guru. Karena rasa hormat yang mutlak itu, pengalihan ilmu tidak hanya pada aspek kognisi semata, tetapi meliputi aspek sikap dan prilaku, sehingga kealiman, kesalihan, dan ketulusan merupakan sosok guru yang menjadi panutan; (3) tampak adanya suatu wujud komunitas yang begitu kohesif di kalangan mereka, yang menempatkan pesantren dan madrasah sebagai pusat orientasi kultural mereka. Komunitas itu menciptakan suatu hubungan yang begitu erat dikalangan mereka, baik dalam urusan mereka sendiri, maupun urusan kemasyarakatan yang lebih luas. Kenyataan seperti itu sudah tentu sangat

menguntungkan dan merupakan modal utama bagi berhasilnya tujuan pembangunan. Di samping itu, komunitas ulama menumbuhkan penghargaan yang tinggi di kalangan masyarakat, terhadap ilmu agama. Hal ini antara lain dapat dilihat dari kenyataan di kalangan masyarakat kecamatan Cikancung yang mempunyai kecenderungan pemilihan jenis sekolah yang hampir seimbang antara mereka yang memilih sekolah umum dan agama, sebagaimana telah dikemukakan (lihat Tabel 3 dan Tabel 4).

Dilihat dari tingkat pendidikan yang ditempuh responden, maka dapat diasumsikan bahwa ulama di kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung, cukup mempunyai bekal semangat ilmu dan pengetahuan yang memadai bagi melaksanakan peranannya sebagai pemimpin informal dalam pembangunan masyarakat desa.

3) Pekerjaan

Status pekerjaan responden sebagian besar (60%) adalah petani, kemudian sebagai pegawai negeri sipil (36,%), dan sisanya (4%) berstatus sebagai pedagang. Mereka yang bekerja sebagai petani, umumnya melakukan kegiatan usaha tani padi di sawah, ada juga yang melakukan usaha tani di kebun, khususnya kebun sayur-mayur seperti kentang, ada juga khusus berkebun pohon usar (akar wangi). Di antaranya juga ada yang mengusahakan kolam pembibitan ikan, peternakan domba rakyat dan peternakan susu sapi, sebagai usaha lain disamping sebagai petani. Dua orang diantara responden yang berstatus pedagang merupakan pedagang sayur mayur ke pasar induk Caringin Bandung. Pada kenyataannya, mereka juga merupakan petani sayur yang merangkap sebagai pedagang. Taraf hidup mereka cukup beragam, umumnya berkecukupan (termasuk golongan masyarakat mampu) untuk ukuran pedesaan, bahkan ada diantaranya yang termasuk kelompok orang kaya di desanya.

Mereka yang menjadi pegawai negeri umumnya adalah guru agama. Empat orang diantaranya menduduki jabatan sebagai penilik pendidikan agama, tujuh orang masing-masing sebagai kepala madrasah (ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah), dua orang pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan, masing-masing sebagai kepala dana wakil kepala KUA kecamatan Cikancung. Masa kerja mereka sebagai pegawai negeri sipil paling rendah selama 20 tahun dan yang paling tinggi selama 35 tahun. Mereka pada umumnya melakukan kegiatan usaha tani sebagai pencaharian tambahan. Salah seorang diantaranya diberi kepercayaan sebagai Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Cikancung. Menurut salah seorang tokoh kecamatan Cikancung, dipilihnya yang bersangkutan sebagai ketua, karena kejujurannya, terbuka dan sebagai panutan

masyarakat, dengan demikian diharapkan mampu merekrut anggota lebih banyak lagi dan lancar dalam mengelola kegiatan sehari-hari. Taraf hidup mereka relatif berkecukupan. Rumah mereka umumnya cukup baik dan terawat, sebagian dari mereka memiliki kendaraan bermotor dan bahkan mampu menunaikan ibadah haji. Keadaan mereka yang rata-rata cukup mampu itu, memperkuat posisi mereka dalam melaksanakan perannya sebagai ulama di lingkungan masyarakat pada umumnya.

4.1.2 Ulama Sebagai Pemimpin

Ulama sebagai salah satu unsur pemimpin masyarakat atau pemimpin informal dalam sebutan umum sering juga disebut pemimpin agama atau pemuka agama. Istilah lain disebut pemimpin agama atau pemuka agama. Istilah lain yang juga biasa digunakan ialah pejabat agama. Karena itu ulama disamping diakui sebagai pemimpin simbolik yang mengabdikan sebagai fungsionaris agama (Hirokoshi, 1987: 36), dengan tugas mengajarkan seperangkat keyakinan agama, sistem nilai dan amal nyata kepada pemeluk agama Islam (Hirokoshi, 1987: 149). Juga dikenal sebagai pemimpin administratif bagi mereka yang mengisi pos-pos birokrasi yang berhubungan dengan ikhwal keagamaan.

Munculnya ulama sebagai pemimpin agama, tidak bisa lepas dari mekanisme kepemimpinan yang selalu ada dalam interaksi kelompok sosial. Karena itu bobot kepemimpinan ulama sangat ditentukan oleh situasi serta prilaku-prilaku: (1) bisa mengerahkan kegiatan pengikutnya; (2) memiliki kemampuan yang bisa diikuti; dan (3) cara kerjanya efektif (Gibb, dalam Hadipranata, 1982). Untuk prilaku pertama faktor kepribadian sangat menentukan dalam mengendalikan pengarahan kegiatan anggota masyarakat; prilaku kedua mencerminkan kekuatan sosial seorang pemimpin untuk mempengaruhi dan mengendalikan masyarakatnya, sedangkan untuk prilaku ketiga tercermin pada kemampuan pemimpin dalam merancang dan menjabarkan "program kerjanya" sesuai dengan harapan masyarakatnya.

Semua prilaku itu (sebagai karakteristik pribadi), ditunjang kadar lebih dalam segi pengetahuan agama, dipunyai oleh ulama. Mereka menjadi tempat bertanya mengenai agama dan hidup beragama. Mereka adalah guru agama dengan beragam panggilan dan gelar kehormatan. Di kecamatan Cikancung, seperti juga di daerah Jawa Barat umumnya, mereka biasanya dipanggil *kyai* atau *ajengan*. Mereka biasanya merupakan "pemilik", pemimpin, dan guru pesantren atau madrasah. Panggilan itu juga diberikan kepada para pemimpin dan pengajar agama di kelompok-kelompok pengajian (*majlis ta'lim*). Karena itu, peran mereka lebih menghujam ke dalam sistem sosial dan struktur masyarakat desa secara khas. Tidaklah berlebihan kalau Hirokoshi (1987) menyebut ulama

sebagai pemangku mesjid dan madrasah, sebagai pengajar dan pendidik, serta sebagai ahli dan penguasa hukum Islam.

Panggilan *kyai* atau *ajengan* tidak hanya didasarkan pada pekerjaan pokok atau pekerjaan tambahan mereka sebagai pengajar agama, tetapi berkaitan dengan kepemimpinan mereka dalam pengelolaan dan kegiatan keagamaan. Mereka menempati kedudukan yang sentral, baik pada satuan jemaah mesjid maupun jemaah yang lebih kecil, seperti musholla. Panggilan ulama bukan karena mereka dilahirkan dalam lingkungan keluarga ulama, dan tidak pula diperoleh karena hasil pendidikan. Gelar ini diperoleh atas dasar pengakuan masyarakat, karena kealiman mereka, dan karena pelayanan serta pengaruhnya yang menguasai masyarakat. Pribadinya pandai menyesuaikan diri (*adjusted*), lebih dominan, lebih berorientasi ke luar (*extrovert*), dan memiliki kepekaan yang tinggi (*high sensitifity*) dibandingkan dengan pemimpin yang ada dalam perangkat yang lebih rendah (*krench*, 1992).

Secara umum gambaran itu tercermin dalam kegiatan mereka sehari-hari yang selalu berada di lingkungan masyarakat, baik sebagai pengajar agama, memimpin kegiatan peribadatan, memimpin upacara selamatan, memberi ceramah keagamaan, memberi bimbingan keagamaan dan bahkan organisasi kemasyarakatan lainnya.

Disela-sela kegiatan mereka, baik sebagai pegawai negeri, petani, maupun pedagang, mereka umumnya mengajar agama di pelbagai kelompok pengajian yang diselenggarakan di mesjid, musholla, dan majlis ta'lim yang tersebar di pelbagai pelosok desa tempat tinggal mereka, di desa sekitarnya, bahkan di desa luar kecamatan Cikancung.

Pengajian, seperti telah dikemukakan, dilakuakn secara rutin yang dilaksanakan siang hari setelah shalat zhuhur atau malam hari setelah shalat isya. Lima orang di antara responden merupakan pendiri, pemimpin, dan guru pesantren. Hampir setiap waktu, mereka mengajar membekali santrinya dengan berbagai ilmu agama seperti tafsir al-Qur'an, hadis, tauhid, fiqih, dan akhlak yang umumnya bersumber dari "kitab kuning" (kitab berbahasa arab tanpa syakal dan dicetak biasanya berwarna kuning). Selain itu seperti responden lainnya, mereka juga menyelenggarakan pengajian rutin bagi masyarakat sekitarnya.

Tersebar nya mereka ke pelbagai tempat pengajian secara rutin itu, memperkuat posisi mereka sebagai "guru" dan "panutan" bagi para pengikutnya. Menurut salah seorang responden, yang dilingkungannya cukup berpengaruh, kegiatan itu dilakukan sebagai penunaian kewajiban kolektif (*fard kifayah*) bagi ulama, yang memberikan jalan untuk penunaian kewajiban perseorangan (*fard 'ain*) bagi seluruh warga masyarakat. Selanjutnya dikatakan bahwa, mengajak kepada kebaikan itu (*da'wa ila alkayr*) wajib hukumnya bagi kaum muslimin, seperti wajibnya

menuntut ilmu sejak dari buaian sampai saatnya ajal tiba.

Dari kenyataan itu dapat disimpulkan bahwa kewajiban mengajak kepada kebaikan dan kewajiban menuntut ilmu merupakan rujukan ulama di lingkungan kecamatan Cikancung dalam melakukan peranannya sebagai pengajar agama. Selain itu, dalam konteks kehidupan masyarakat, kegiatan pengajaran agama yang dilakukan melalui saluran madrasah, pesantren, dan majlis ta'lim, merupakan usaha sosialisasi ajaran agama Islam di masyarakat. Hal itu merupakan komponen penting di dalam satuan jamaah yang menjadi basis masyarakat Islam. Dengan perkataan lain madrasah, pesantren, dan majlis ta'lim, yang "diasuh" oleh ulama itu, merupakan pilar-pilar yang berdiri tegak di dalam pembangunan masyarakat Islam di kecamatan itu.

Dalam berbagai upacara peribadatan, ulama di kecamatan Cikancung itu juga tampil sebagai pemimpin, baik di lingkungan jamaah mesjid, musholla ataupun langgar-langgar di sekitarnya, seperti dalam pelaksanaan shalat lima waktu. Mereka secara bergilir menjadi imam dan khatib dalam penunaian shalat jum'at. Namun demikian, tidak setiap ulama (terutama mereka yang masih muda) mendapat kesempatan yang sama dalam memimpin upacara peribadatan, terutama dalam lingkungan mesjid jami', karena cenderung dipegang ulama senior yang dianggap lebih relevan, lebih berbobot dan berkemampuan dalam melaksanakan tugasnya. Demikian pula untuk shalat *tarawih* (shalat malam yang dilakukan hanya pada bulan Ramadhan), dan shalat "idayn" (dua hari raya, yaitu 'idul fitri dan shalat 'idul adha) umumnya cenderung dilakukan ulama yang lebih senior. Data lapangan menunjukkan bahwa ulama yang menjadi imam shalat lima waktu dan atau shalat lainnya menurut kelompok umur adalah 30-39 tahun (37,5%), 40-49 tahun (63,7%), dan 50 tahun keatas (100%).

Ulama juga berperan sebagai pemimpin dalam berbagai upacara selamatan, di lingkungan masyarakat kecamatan Cikancung lebih dikenal dengan istilah *syukuran*, baik yang diselenggarakan dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan jamaah, upacara syukuran itu umumnya diselenggarakan berkenaan dengan peristiwa-peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, muludan, dan rajaban (peringatan maulid dan isra mi'raj nabi Muhammad S.A.W.) dan lainnya. Berperannya ulama dalam berbagai upacara itu lebih memperteguh kedudukan mereka sebagai pelindung dan sumber moral bagi masyarakatnya.

Pada umumnya (78%) ulama (responden) selalu melakukan pembinaan keagamaan dengan ceramah-ceramah keagamaan, yang lazim disebut tabligh dan da'wah. Ceramah itu umumnya berisi penyampaian dan ajakan kepada masyarakat untuk hidup beramal shaleh (melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya, masyarakat (balarea), dan bangsa,

memahami dan mengamalkan ajaran agama sesuai dengan titah-Nya. Kegiatan itu umumnya dilakukan berkenaan dengan peringatan hari-hari besar Islam seperti maulid dan isra mi'raj, pada milad (ulang tahun) majlis ta'lim atau institusi lainnya dan juga pada perayaan perkawinan (walimat al-nikah) serta perayaan khitanan (walimat al-khitan).

Ceramah keagamaan itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan pokok para ulama. Menurut beberapa orang diantara responden, kegiatan itu merupakan kewajiban kolektif (fard kifayah) yang harus ditunaikan. Hal itu antara lain didasarkan pada ajaran yang bersumber dari hadis nabi, yang menyatakan bahwa "sampaikanlah oleh kamu sekalian ajaran dari aku walaupun hanya satu ayat" (*ballighu 'anni wa law ayah*). Undangan ceramah tidak hanya datang dari masyarakat desa dimana mereka berada, namun juga datang dari masyarakat desa lainnya baik desa yang berada di kecamatan Cikancung maupun dari luar kecamatan itu. Kenyataan itu menunjukkan bahwa mereka umumnya mampu menembus "pasar" di luar wilayah desa dan atau kecamatan mereka.

Kegiatan lain yang juga biasa dilakukan ulama, terutama mereka yang dikategorikan ulama senior adalah memberikan bimbingan keagamaan (bimbingan hikmah), yang dilakukan secara sukarela, terutama menyangkut pemecahan masalah kesulitan hidup dan kehidupan, seperti masalah waris, masalah kesulitan rumah tangga, masalah persengketaan atau pertengkaran. Hal ini yang juga dikonsultasikan adalah menyangkut pemahaman dan pengamalan agama.

Hal lain yang tidak lepas dari kesaharian ulama adalah kiprahnya dalam memimpin berbagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, seperti pesantren, madrasah, majlis ta'lim, dewan keluarga mesjid, badan amal zakat, infaq dan sadaqoh, dan lain-lain. Dalam konteks pembangunan masyarakat desa, lembaga atau organisasi keagamaan itu merupakan satuan pengelola pembangunan terutama dalam sektor keagamaan dan pendidikan, yang memperkuat kedudukan ulama sebagai salah satu unsur pemimpin masyarakat desa yang mapan. Dalam organisasi kemasyarakatan, walaupun tampak belum merata, diantara mereka ada yang berkiprah dalam majlis ta'rif (semacam yayasan swadiri yang khusus mengelola "urusan" anak yatim), memimpin Koperasi Unit Desa (KUD), memimpin kontak tani, mengembangkan peternakan dan perikanan, terlibat langsung dalam pembangunan sarana ibadah, komunikasi antar desa (jalan) kantor desa dan kemandren, dan seorang diantaranya berkiprah sebagai tokoh pemimpin pemuda.

4.2 Pemikiran Ulama Mengenai Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Masyarakat Desa

Dalam bagian ini akan dijelaskan bagaimana pemikiran ulama (responden) tentang pembangunan. Penulis menganggap perlu untuk mengetahui hal itu secara lebih mendasar, mengingat pemikiran itu merupakan pedoman atau patokan penilaian dalam melakukan perannya sesuai dengan kedudukan mereka dalam masyarakat. Pemikiran itu juga berhubungan dengan pengalaman serta harapan mereka di dalam pergaulan hidup bersama; karena itu, apa yang diperbuat mereka sehari-hari merupakan gambaran nyata dari pemikirannya yang diyakini “wajib” untuk dilaksanakan baik oleh dirinya maupun masyarakat umumnya.

Ada dua aspek yang utama dalam pembangunan itu, yaitu (1) partisipasi atau dinamisme para pelaku; (2) pedoman nilai, dan pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Aspek pertama, menyangkut potensi dan kondisi manusia dalam menghadapi hidupnya. Dengan kata lain aspek ini bertalian dengan sikap pokok manusia terhadap diri mereka sendiri dan terhadap dunia sekeliling mereka, sebagaimana yang terpancar dari hidup dan kehidupannya. Ini yang oleh Geertz (1981) dinamakan sebagai etos atau semangat. Aspek kedua, pada dasarnya berkaitan dengan kenyataan bahwa manusia diliputi oleh keinginan atau nafsu yang sulit dikuasai tetapi perlu dikendalikan. Karena itu, maka setiap usaha meningkatkan kesejahteraan, kebahagiaan, dan ketentraman hidup masyarakat, memerlukan sistem nilai sosial. Etika dan nilai baik-buruk ini amat sentral dalam menentukan arah tujuan, dan bahkan memberi batas terhadap gerak dalam masyarakat sehingga usaha tersebut tidak terjadi tanpa batas dan tanpa kendali. Ini yang oleh Goulet (1977) dinamakan sebagai etika atau moral pembangunan.

Dua aspek itu, etos kerja dan moral pembangunan di dalam sistem nilai ajaran agama Islam merupakan dua sisi yang saling melengkapi dan saling memberi warna.

Konsep pembangunan dalam agama Islam bersifat menyeluruh dan utuh (ka'ffah). Berbeda dengan konsep-konsep pembangunan lain yang mengarah pada pengertian fisik dan materi, tujuan pembangunan dalam Islam, lebih menyetak ke dalam, menghujam pada pokok persoalan yang hakiki.

“Bagi Islam, pembangunan yang dilakukan oleh manusia hanya mengejar satu tujuan yang utama yaitu kesejahteraan umat”. Demikian kata salah seorang (responden), berumur sekitar setengah abad dan pernah mengenyam pendidikan tinggi, mengawali pembicaraannya tentang pemikiran mereka mengenai pembangunan. Karena itu beliau melanjutkan

pembicaraannya “paling tidak ada empat landasan yang mendasari pemikiran mengenai konsep pembangunan yaitu: (1) *Tauhid*, ajaran ini merupakan landasan dari aturan-aturan tentang hubungan Allah dengan manusia dan manusia dengan sesamanya. (2) *Rubbiyyah*, ajaran ini merupakan ketentuan Allah mengenai alam semesta, pemanfaatan dan pengembangan sumber-sumber di dalamnya untuk kesejahteraan dan kelestarian hidup bersama. (3) *Khilafah*, (fungsi manusia sebagai khalifah di bumi) ajaran ini menetapkan kedudukan dan peranan manusia, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat sebagai pengemban jabatan-jabatan khalifah itu. (4) *Tazkiyah*, (penyucian dan pengembangan), artinya tugas manusia adalah penyucian dan pengembangan dalam segala hubungan dan pergaulannya dengan Allah, sesama masyarakat serta wilayah negaranya. Dengan landasan itu, maka tujuan utama pembangunan mengarah pada kemakmuran dan kebahagiaan dunia dan akhirat secara seimbang. Dinamika pembangunan menurut konsep Islam mengarah kepada kesadaran, bahwa pembangunan akan berhasil bila melibatkan keyakinan dan keikutsertaan seluruh ummat (masyarakat), yang menjadi tujuan dan sekaligus pelaku dalam pembangunan”.

Pendapat *ajengan* itu paling tidak mewakili gambaran ulama di kecamatan Cikancung tentang bagaimana pemikiran mereka tentang pembangunan, dan bagaimana pembangunan itu harus dilakukan, dan bagaimana kedudukan manusia di dalam pembangunan itu. Pemikiran itu menunjukkan bahwa ajaran agama Islam memberikan kondisi spiritual (psychological dynamics) (Muhaimin, 1988) kepada masyarakat untuk melakukan aktifitas keduniawian yang bermakna, dan bahwa agama merupakan sumber aktifitas untuk berlangsungnya transformasi struktural dan memberikan bentuk kepada sistim anggota masyarakat yang berkaitan dengan fenomena pembangunan.

Sesuai dengan wawancara yang telah dilakukan, pemikiran tokoh ulama itu umumnya sejalan dengan pendapat responden lainnya terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan bahwa agama sebagai aspek normatif pada dasarnya merupakan acuan untuk dijadikan patokan penilaian dalam memandang dan melakukan peran dalam pembangunan. Dengan acuan itu, sebagian besar dari mereka menyadari bahwa ulama merupakan kelompok elite di dalam masyarakat, yang berkewajiban untuk mengajak pada kebaikan (*da'wa ila al-khayr*) dan memelihara kerukunan di tengah-tengah masyarakat.

Terhadap pernyataan itu salah seorang di antara mereka menegaskan, “tugas ulama adalah menyampaikan perintah dan larangan Allah”. Sambil mengutip hadis nabi yang menyatakan “sampaikan dari aku walaupun satu ayat” (*balligu'anni wa law ayah*), ia mengatakan bahwa “penyampaian” itu hendaknya disertai “ajakan” pada kebaikan

(*ngajak kana kasaean*) yang harus dilakukan dengan kesabaran. Kewajiban itu harus dilaksanakan sepanjang hayat selama “berkemampuan”. Pemikiran itu menunjukkan bahwa tugas ulama, sebagai kelompok masyarakat yang berilmu, adalah menyampaikan ajaran agama dan mengajak untuk mengamalkannya. Hal itu didukung oleh sangat setuju dan setujunya sebagian besar dari mereka terhadap pernyataan, bahwa agama memerintahkan umatnya untuk melaksanakan ajaran yang berkaitan dengan kewajiban individu kepada Allah, terhadap sesama anggota masyarakat, dan terhadap lingkungan, secara selaras, serasi dan seimbang. Dengan demikian, pembangunan itu pada dasarnya merupakan pengamalan nilai-nilai maupun norma-norma yang bersumber dari ajaran agama (Islam) yang dijabarkan dalam berbagai aktifitas sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat secara menyeluruh dan utuh (*ka'ffah*). Dengan kata lain pembangunan itu merupakan ikhtiar manusia manusia mengadakan perubahan, perbaikan dan peningkatan kualitas kehidupan, dilakukan secara sadar, berencana, terarah dan menyeluruh (*kaffah*). Selanjutnya mayoritas dari responden juga sangat setuju dan setuju akan pernyataan bahwa kewajiban ulama adalah menyebarluaskan dan menterjemahkan nilai-nilai dan norma-norma agama dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan penyiaran, pengajaran, bimbingan dan penyuluhan keagamaan, dan pengabdian.

Memperkokoh pernyataan tersebut, salah seorang responden lainnya berpendapat bahwa: “kewajiban ulama pada prinsipnya mengajak masyarakat untuk berbuat *ma'ruf* dan *mencegah* munkar sebagaimana dalam al-Qur'an. Namun dalam pelaksanaannya diperlukan kerjasama dengan pihak lain terutama mereka yang memiliki kelebihan dalam hal harta dan kewenangan atas kekuasaan”.

Mengenai hubungan antara agama sebagai sumber aktifitas dengan pembangunan masyarakat, dikemukakan ulama senior yang telah disebutkan terdahulu bahwa “agama Islam mencakup berbagai segi kehidupan manusia, yang secara garis besar meliputi bidang-bidang ibadah, *mu'amalah* (kemasyarakatan), *munakahah* (perkawinan), dan *jinayah* (kepidanaan). Penerapannya di dalam kehidupan masyarakat, baru di bidang ibadah, dan munakahah saja”. Selanjutnya ia mengatakan bahwa, “ulama berkewajiban menjelaskan bidang mu'amalah dan jinayah kepada masyarakat, agar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari”. Pemikiran itu menunjukkan bahwa pembangunan merupakan usaha penerapan ajaran agama Islam dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Seperti juga responden lainnya, tokoh senior itu mengatakan bahwa usaha penerapan ajaran Islam di dalam kehidupan masyarakat harus dilaksanakan bersama-sama, karenanya diperlukan kerja sama di antara berbagai unsur yang ada di lingkungan masyarakat. “Kehidupan

masyarakat, bahkan kehidupan umat manusia ditegakkan oleh empat unsur, sebagaimana disebutkan dalam salah satu hadis nabi: yaitu (1) dengan ilmu para ulama; (2) dengan keadilan pemerintah (umara); (3) dengan kedermawanan orang-orang kaya (aghniya); dan (4) dengan do'a orang-orang fakir (fuqara)". Lebih jauh dikemukakan bahwa, "keempat unsur itu saling saling bergantung satu sama lain. Karena itu jangan mengabaikan orang-orang fakir, sebab pada mereka terdapat kekuatan. Dalam bentuk nyata kekuatan mereka adalah pada do'a dan dukungannya. Mereka adalah orang-orang yang mudah diajak".

Pemikiran itu menunjukkan dengan jelas bahwa kelompok masyarakat yang berkewajiban untuk memelopori pembangunan adalah mereka yang memiliki kelebihan. Mereka adalah ulama yang memiliki kelebihan ilmu, pemerintah (umara) yang melebihi kekuasaan, dan orang-orang kaya (aghniya) yang memiliki kelebihan harta, ditunjang oleh kaum kafir (fuqara) dengan dukungannya dalam perbuatan nyata.

Keharusan adanya kerja sama dalam pembangunan oleh responden lainnya, dicontohkan seperti dalam kehidupan sosial keagamaan, seperti pengorganisasian zakat, ulama sebagai orang yang memahami dan menguasai aturan-aturan agama, berkewajiban untuk memprakarsainya, didukung oleh pemerintah. Tetapi dalam usaha peningkatan hasil pertanian, usaha perbaikan saluran air untuk kepentingan pertanian, yang merupakan sumber zakat, merupakan tugas pemerintah yang harus didukung ulama".

Hal itu dikemukakannya sebagai penjelasan tentang perwujudan kerja sama sebagaimana diperintahkan Allah dalam al-Qur'an, surat Al-Maidah, ayat 2¹⁶. Selanjutnya disimpulkan bahwa "jadi semua kegiatan yang memberi manfaat bagi semua lapisan masyarakat seperti kedua kegiatan itu merupakan kewajiban semua orang (sareera), harus dikerjakan secara gotong royong dan bertanggung jawab".

Pemikiran serupa dikemukakan responden lainnya, ketika menjelaskan mengenai usaha mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kejelekan, menurutnya, "mengajak pada kebaikan dan mencegah keburukan merupakan kewajiban setiap orang (fardh 'ayn). Tetapi dalam masalah tertentu yang memerlukan keahlian dan kewenangan kewajiban itu dapat dibagi pada berbagai tugas yang berbeda-beda (fardh kifayah)". Ia contohkan, misalnya dalam penyelesaian kasus pencurian merupakan tugas polisi dan penegak hukum lainnya, bukan tugas ulama.

Dari gambaran tersebut dapat disimpulkan bahwa bagi mereka

¹⁶ ...dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

ajaran Islam telah memberi landasan yang jelas dan tegas bagi etos kerja produktif maupun arah serta tujuan pembangunan yang diinginkan. Dengan kata lain, Prinsip pembangunan dalam Islam sebenarnya merupakan konsep ekonomi-politik yang menyangkut secara total interaksi antara kegiatan ekonomi dengan non-ekonomi, dan juga beraspek interaksi antara dimensi universal dengan dimensi individual dari ajaran Islam (Tjiptoherijanto, 1988: 58). Bagaimana pendapat ulama (responden) itu tentang “pemikiran keagamaan mengenai pembangunan” secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel 12.

Tabel 12: Pendapat responden Tentang Pemikiran Keagamaan Mengenai Pembangunan

No.	Nomor Pernyataan	Urut	SS (%)	S (%)	N (%)	TS (%)	STS (%)	JML (%)
1	28		27 (54)	23 (46)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	50 (100)
2	29		25 (50)	21 (42)	4 (8)	0 (0)	0 (0)	50 (100)
3	30		29 (58)	19 (38)	2 (4)	0 (0)	0 (0)	50 (100)
4	31		18 (36)	29 (58)	3 (6)	0 (0)	0 (0)	50 (100)
5	32		32 (64)	15 (30)	2 (4)	1 (2)	0 (0)	50 (100)
6	33		23 (46)	22 (44)	5 (10)	0 (0)	0 (0)	50 (100)

Terhadap pernyataan yang diajukan tentang tujuan pembangunan, pemikiran ulama pada dasarnya sama, walaupun terdapat perbedaan nuansa. Sebagian besar ulama (responden) sependapat bahwa tujuan utama pembangunan adalah untuk mengembangkan potensi pribadi manusia sehingga mampu meningkatkan amaliah dalam hidupnya untuk kesejahteraan diri, keluarga, dan masyarakat yang diridhai Allah SWT. Karena itu pembangunan masyarakat sebaiknya ditujukan untuk meningkatkan keimanan warga masyarakat, karena peningkatan keimanan akan menumbuhkan kesadaran terhadap berbagai kewajiban kemasyarakatan. Demikian kata mereka.

Menanggapi pernyataan itu, salah seorang ulama (responden) menyatakan bahwa “memang peningkatan iman dan amal keagamaan merupakan hal yang mendasar. Karenanya peningkatan kegiatan majlis ta’lim misalnya, adalah suatu hal yang mutlak, sebab melalui kegiatan itu masyarakat diberi penjelasan tentang tuntunan agama untuk kehidupan sehari-hari”. Ia juga berpendapat bahwa “dengan memasyarakatkan tuntunan agama untuk kehidupan sehari-hari akan timbul tanggung jawab

dan disiplin pada diri dan lingkungannya. Tanggung jawab dan disiplin itu merupakan tiang utama etos kerja, etos pembangunan. Kalau tanggung jawab dan disiplin sudah tumbuh, dengan sendirinya akan mendorong kreativitas dan prakarsa yang merupakan pangkal tumbuhnya etos kerja produktif untuk menciptakan hari esok yang lebih baik”.

Bertolak dari tujuan itu, telah diajukan pula pernyataan mengenai arah pembangunan yang dianggap tepat, penilaian atas dasar ma'ruf dan munkar, bidang yang perlu diprioritaskan, serta gagasan apa yang merekagariskan untuk pembangunan masyarakat. Untuk itu diajukan sebelas pertanyaan.

Mayoritas dari mereka sependapat bahwa sesuai dengan konsep Islam, dinamika pembangunan akan berhasil bila melibatkan keyakinan dan keikutsertaan ummat (masyarakat) yang menjadi tujuan sekaligus pelaku pembangunan. Selain itu arah pembangunan sebaiknya ditujukan untuk meningkatkan kualitas manusia dalam arti memiliki keimanan yang kuat, ilmu yang tinggi, dan khlak yang luhur, karena semua itu akan menciptakan kondisi umum yang mendorong pembangunan. Pembangunan sebagai kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam arti kebutuhan material dan kebutuhan spiritual harus merupakan bagian dari amal ibadah kepada Allah SWT. Bertolak dari pemikiran itu, maka pembangunan masyarakat sebaiknya tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah atau kepuasan batiniah saja, melainkan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara keduanya.

Terhadap penilaian yang seperti itu, umumnya mereka sependapat bahwa menurut ajaran Islam konsep keseimbangan, merupakan hal yang fundamental; komitmen seorang muslim kepada kewajibannya terhadap Allah sama esensialnya dengan komitmen kepada kewajibannya terhadap masyarakat.

Tanggapan lebih jauh terhadap pernyataan yang diajukan itu, seorang diantara mereka yang dikenal juga sebagai seorang pengurus Majelis Ulama Kecamatan dan juga sebagai anggota pengurus Majelis Ulama Kabupaten Bandung, menyatakan:

“Sebagai usaha aktualisasi Islami di dalam masyarakat ada dua macam etos kerja (pembangunan) dan motivasi agama sebagai arah pembangunan yang perlu dipelihara (1) merupakan *built in mecanism* ketaatan dan ketaqwaan beragama; dan (2) menyediakan sarana dan lingkungan agamis masyarakat, serta menjaga homogenitas kehidupan bermasyarakat mereka, yang dapat direalisasikan dalam *policy* yang terpadu, bersifat lokal maupun nasional”.

Lebih jauh ia mengatakan:

“Pada prinsipnya dinamisme potensi pembangunan terletak pada kemampuan jalinan struktural dalam memacu potensi jiwa-

kewiraswastaan sebagai modal dasar yang telah mereka miliki. Dengan demikian maka untuk perkembangan masyarakat yang dinamis, seluruh potensi dan kekuatan jiwa kewiraswastaan yang ada harus secara gradual namun ajeg diarahkan kepada kondisi yang independen, sehingga dapat dicegah terjadinya pencemaran terhadap (sistem) nilai agama yang telah dipunyai masyarakat, sebab kalau tidak dicegah berarti akan merusak motivasi keagamaan mereka dalam kegiatan pembangunan pada umumnya”. Selanjutnya dikatakan, “Apabila pencemaran dimaksud berlangsung misalnya akibat motif politik, maka akan terjadi ketidakstabilan masyarakat. Hal itu akan membawa konsekuensi politik (timbulnya frustrasi) yang mendalam dan berkepanjangan yang bisa berdampak negatif terhadap usaha pembangunan secara keseluruhan”.

Tanggapan lain dikemukakan oleh ajengan lainnya yang dikenal sebagai guru aliyah dan guru ngaji serta salah seorang pengurus majlis Ta’lim. Menurutnya pembangunan sebaiknya diarahkan agar masyarakat, terutama generasi muda, memperoleh peluang untuk mendapatkan pendidikan secara leluasa. “Kunci keberhasilan pembangunan terletak pada manusia terpelajar. Mereka lebih mudah untuk memahami dan diajak membangun. Karena itu kegiatan pendidikan dan pengajaran harus mendapat prioritas”.

Pemikiran itu tampaknya sangat dipengaruhi oleh pengalaman dan kehidupan sehari-hari yang bersangkutan. Tidak heran kalau ia merupakan salah seorang dari 46 responden (92%) yang mengatakan sangat setuju atau setuju terhadap pernyataan bahwa:

Keberhasilan pembangunan masyarakat bertolak dari pembangunan manusianya secara pribadi yang didasari ajaran agama, karena itu pembangunan manusia untuk membangun harus diutamakan atau diprioritaskan. Mengapa ia sangat setuju dengan pernyataan itu? Untuk itu ia mengatakan: “Karena menurut Islam, dalam pembangunan, manusia harus diletakkan pada posisi yang sangat penting. Peranan manusia sangat berpengaruh terhadap berhasilnya pembangunan. Itulah sebabnya pembangunan manusia sebagai Khalifah Allah dimuka bumi yang dapat berfungsi sebagai: umat yang berlaku adil di tengah-tengah ketidakadilan merupakan terminal terminal terakhir dalam perjalanan ini”.

Selain sangat setuju terhadap pernyataan itu, ia juga merupakan salah seorang dari 43 responden (86%) yang sependapat bahwa: Pembangunan manusia lebih diartikan untuk meningkatkan akhlak masyarakat, agar memiliki akhlak yang luhur (*al-akhlak al-karimah*), karena akhlak yang luhur merupakan modal dasar utama bagi keberhasilan pembangunan.

Mengomentari terhadap pernyataan itu, ajengan lain yang juga dikenal sebagai ketua Koperasi Unit Desa (KUD) desa Cikancang

berpendapat:

“Sesuai dengan tujuan pembangunan (menurut Islam) yang mengarah kepada kemakmuran dan kebahagiaan bukan saja di dunia, namun juga di akhirat kelak, kedudukan manusia jelas merupakan pusat segala-galanya. Karena itu, dalam hubungan dengan usaha manusia untuk mengembangkan dan memanfaatkan sumber-sumber alam yang tersedia, harus selalu diingat nilai-nilai syukur dan adil. Karena dengan mensyukuri rahmat Allah, keadialn akan terbina. Sementara sifat *kufir* atau pengingkaran terhadap Allah dan segala rahmat-Nya, yang dapat menumbuhkan sikap ketidakadilan harus dilenyapkan. Landasan tauhid akan meluruskan sifat-sifat yang kurang baik dan kurang menopang usaha-usaha pembangunan tersebut. Itulah sebabnya saya sangat setuju bahwa akhlak yang luhur harus ditumbuh kembangkan di lingkungan masyarakat karena memang merupakan modal dasar utama bagi keberhasilan pembangunan”.

Secara panjang lebar ia juga mengatakan bahwa:

“Islam selalu mengajak umatnya untuk mempunyai keyakinan dan optimisme terhadap masa depan. Keyakinan bahwa hari esok akan lebih baik dari hari ini. Optimisme untuk mencapai keyakinan tersebut”.

Lebih jauh lagi ia mengatakan:

“Tidak sedikit dari ajaran Islam yang mendorong, memberi motivasi, menganjurkan, dan bahkan memerintahkan umatnya untuk berikhtiar, berusaha, berinisiatif, bekerja dan bersikap kreatif. Tidak kurang dari ayat-ayat Al-Qur’an sendiri seperti surat Al-Qashash, ayat 77¹⁷ yang menyuruh umat Islam untuk tekun bekerja demi kebahagiaan dunia, tanpa melupakan persiapan bagi kebahagiaan di akhirat. Juga ayat-ayat yang menyatakan bekerja amat penting untuk kesejahteraan hari esok, agar kelanjutan kehidupan diri dan keluarga terpelihara, seperti surat Al-Hasyr, ayat 18¹⁸

Pemikiran ajengan itu ditimpali oleh ajengan lain yang sehari-hari bekerja sebagi penilik pendidikan agama, dan secara rutin terlibat langsung dalam pembinaan keagamaan masyarakat melalui pengajian-pengajian. Ia mengatakan: “Semua tuntutan untuk rajin bekerja, berdisiplin, kreatif serta serta produktif harus dilandasi oleh keinginan berbuat baik”. Dalam hubungan ini ia mengutip salah satu hadis nabi

¹⁷ “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari (kenikmatan) duni dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi, Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.

¹⁸ “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Muhammad SAW, yang diriwayatkan Muslim yang menjelaskan bahwa: “Orang yang menunjukkan perbuatan baik kepada orang lain, maka ia akan mendapat pahala seperti pahala orang yang mengerjakan perbuatan baik tersebut”.

Dari pemikiran-pemikiran yang diajukan sebagai ajengan (ulama) tersebut cukup jelas betapa kedudukan manusia sebagai “*person* yang berkepribadian” merupakan sasaran utama yang harus dibina terlebih dahulu sebagai modal dasar awal bagi kelangsungan dan keberhasilan pembangunan. Sasaran itu jelas cukup strategis, karena dengan itu berarti akan terbentuk “norma sosial” yang diharapkan, (harapan masyarakat tentang bagaimana seseorang anggota masyarakat harus bertindak) yang pada gilirannya akan membentuk “nilai” (keteguhan pendirian seseorang tentang bagaimana ia harus bertindak dan memperjuangkan cita-cita atau tujuannya) pada setiap individu masyarakat. Dengan terbentuknya “nilai” yang sejalan dengan “norma sosial” yang diharapkan, sudah tentu akan membentuk kelompok masyarakat yang mempunyai kohesi yang tinggi, integritas dan integrasinya baik, serta efisien, yang sudah tentu akan menguntungkan bagi kelangsungan pembangunan.

Kesadaran akan itu semua tampaknya begitu melekat pada setiap insan ulama (ajengan) yang ada di kecamatan Cikancung. Mereka seolah-olah merasakan bahwa masyarakat yang dinamis dan mempunyai nilai serta norma sosial yang berlandaskan agamalah yang mempunyai “nilai interaksi personal” (interpersonal values)¹⁹ yang memadai yang dibutuhkan bagi kelangsungan pembangunan. Mereka juga tampaknya menyadari bahwa efektifitas suatu kelompok masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan ditentukan oleh karakteristik individual tiap anggota masyarakat yang bersangkutan. Dalam hal ini peranan manusia sebagai person berpribadi sangat berpengaruh terhadap berhasilnya pembangunan.

Bertoalk dari pemikiran mereka mengenai pembangunan, kepada mereka diajukan pula persyaratan-persyaratan yang menyangkut bagaimana gagasan mereka khususnya yang berkaitan dengan pembangunan masyarakat. Mereka hampir semuanya (86%) sependapat bahwa: sesuai dengan perintah agama, bahwa segala kegiatan manusia

¹⁹ Masyarakat yang mempunyai kohesi tinggi, integritas dan integrasinya baik serta efisien, memiliki enam nilai interaksi personal: (1) Support; suka memberi bantuan dan bersedia menerima dukungan orang lain; (2) Comformity; suka mematuhi peraturan dan tata tertib serta suka memilih jalan tengah; (3) Recognition: suka mengambil perhatian dan suka menjaga nama diri maupun nama kelompoknya; (4) Independence: suka kebebasan karena kebenaran dan suka membebaskan orang lain karena kemampuannya; (5) Benevolence; suka bekerja dan menolong orang lain yang memerlukannya; (6) Leadership: suka memecahkan persoalan orang lain dengan penuh kemampuan serta kewibawaan. (Lihat, Hadipranata, 1976).

ditujukan ke satu arah yaitu mendapatkan ridha Allah, karena itu gagasan pembangunan yang tepat untuk ditempuh harus berlandaskan pada *tauhid* (keesaan dan kedaulatan Allah), *rububiyah* (ketentuan Allah tentang rizki, rahmat dan segala pemberian-Nya), *khilafah* (fungsi manusia sebagai khalifah di bumi) dan *tazkiyah* (penyucian dan pengembangan). Di samping itu untuk mendapatkan ridha Allah, maka pembangunan masyarakat harus bersifat menyeluruh dan utuh (*kaffah*). Terdapat keseimbangan antara pembinaan aspek ibadah yang bersifat personal dengan aspek keduniawian yang lebih banyak bersifat universal.

Menanggapi pernyataan itu umumnya mereka berpendapat bahwa bertolak dari *taqwa* yang merupakan dasar dari etos kerja dalam Islam, maka *tauhid* merupakan sendi utama pembangunan. Ajaran ini merupakan landasan dari aturan-aturan tentang hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan sesamanya. Tauhid akan menunjukkan batasan-batasan, disamping arah yang harus dituju bagi proses pembangunan yang sedang berlangsung, menurut mereka tanpa sikap tauhid, usaha pembangunan yang dilakukan tidak akan ada artinya. Karena usaha itu akan berakhir pada pemujaan terhadap materi. Karenanya landasan khilafah sangat penting untuk disadari, sehingga masyarakat mengerti akan tanggung jawab yang dipikul dipundaknya, selain hanya menuntut hak dan melaksanakan kewajibannya. Ajaran ini jelas menetapkan kedudukan dan peranan manusia pada tempat yang tertinggi dan terhormat tetapi sangat bertanggung jawab, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Kalau hal itu sudah disadari, maka pemanfaatan alam semesta dan pengembangan sumber-sumber di dalamnya untuk kesejahteraan dan kelestarian hidup bersama bisa dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah tentang hak itu (*rububiyah*). Dengan demikian penyucian dan pengembangan (*tazkiyah*) atau segala hubungannya dengan Allah, hubungan dan pergaulannya dengan sesama manusia, dengan lingkungan alamnya, dan dengan masyarakat serta wilayah negaranya bisa dilakukan dengan penuh kesadaran dan penuh rasa *syukur*. Bagaimana arah pembangunan, penilaian, prioritas serta gagasan apa yang mereka gariskan secara keseluruhan dapat dilihat Tabel 13.

Tabel 13: Pendapat Responden Tentang Tujuan, Arah, prioritas, dan gagasan Mengenai Pembangunan.

No.	Nomor Urut Pernyataan	SS (%)	S (%)	N (%)	TS (%)	STS (%)	JML (%)
1	33	18 (36)	21 (42)	7 (14)	1 (2)	3 (6)	50 (100)
2	34	16 (32)	27 (54)	6 (12)	1 (2)	- (0)	50 (100)

3	35	11 (22)	33 (66)	4 (8)	1 (2)	- (0)	50 (100)
4	36	16 (32)	32 (64)	2 (4)	- (0)	- (0)	50 (100)
5	37	19 (64)	25 (50)	6 (12)	- (-)	- (0)	50 (100)
6	38	23 (46)	23 (46)	4 (8)	- (0)	- (0)	50 (100)
7	39	12 (24)	32 (64)	4 (8)	- (0)	- (0)	50 (100)
8	40	12 (24)	33 (66)	4 (8)	1 (2)	- (0)	50 (100)
9	41	17 (34)	31 (62)	2 (4)	- (0)	- (0)	50 (100)
10	42	18 (36)	28 (56)	2 (4)	2 (4)	- (0)	50 (100)
11	43	20 (40)	23 (46)	5 (10)	2 (4)	- (0)	50 (100)
12	44	18 (36)	28 (56)	2 (4)	2 (4)	- (0)	50 (100)
13	45	23 (46)	20 (40)	7 (14)	- (0)	- (0)	50 (100)
14	46	13 (26)	24 (46)	13 (26)	- (0)	- (0)	50 (100)

Uraian tersebut menunjukkan bahwa pemikiran ulama (ajengan) kecamatan Cikancung mengenai pembangunan masyarakat desa tercermin dalam kegiatan keseharian mereka, yang menjadi ciri pribadi mereka. Pembangunan, menurut mereka, merupakan pengamalan ajaran agama, yang diwujudkan dalam peningkatan iman, ilmu, dan akhlak mulia. Mereka berpendapat bahwa keberhasilan pembangunan masyarakat bertolak dari pembangunan manusianya secara pribadi yang didasari ajaran agama. Mereka yakin bahwa ajaran agama Islam telah memberi landasan yang jelas dan tegas bagi etos kerja produktif maupun arah serta tujuan pembangunan yang diinginkan. Mereka juga memperhitungkan, betapa faktor kelembagaan, teknologi, kependudukan, dan lingkungan fisik berpengaruh dalam mencapai keberhasilan pembangunan.

Apakah pemikiran mereka berpengaruh terhadap pemilihan prioritas bidang pembangunan masyarakat desa?

Dilihat dari frekwensi peristiwa, alokasi biaya, dan keberagaman satuan pengelola, sebagaimana telah diuraikan Pada bab III khususnya tentang kegiatan pembangunan (bagian 3.3) menunjukkan bahwa pembangunan di kecamatan Cikancung diprioritaskan pada sektor sosial budaya, terutama sektor keagamaan, hal itu lebih jelas lagi dalam pembangunan jalur bawah (lihat tabel 8), yang menunjukkan jumlah atau

frekwensi pembangunan bidang keagamaan begitu besar. Dengan kata lain, bahwa pembangunan di desa-desa kecamatan Cikancung lebih diarahkan pada usaha penerapan ajaran Islam dalam kehidupan terutama dimensi ritual, moral, intelektual, dan sosial. Usaha tersebut erat hubungannya dengan peranan ulama di dalam masyarakat, karena sebagian dari mereka terlibat langsung sebagai pemimpin berbagai peristiwa pembangunan.

Bagi ulama pemilihan prioritas pembangunan tersebut merupakan pelaksanaan fungsi mereka sebagai salah satu unsur pemimpin masyarakat, yang berkeajiban mengajak pada kebaikan, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat munkar. Mereka memprakarsai dan mengelola penyediaan sarana keagamaan baik fisik maupun pengorganisasian masyarakat. Dengan demikian mereka bisa mengerahkan kegiatan masyarakatnya. Bagi mereka, organisasi keagamaan merupakan saluran utama. Untuk melakukan kegiatan dan aktualisasi kepemimpinannya. Mereka tanggap terhadap aspirasi masyarakat. Dengan kemampuan berpikir abstrak yang rata-rata cukup baik, mereka tampak lebih arif bijaksana daripada yang dipimpinnya. Selain itu mereka rata-rata memiliki kestabilan emosi, yang sangat diperlukan bagi kepekaan dan ketenangan serta ketekunan bertindak, sehingga mampu bekerja efektif. Dengan demikian, mereka memiliki kemampuan yang bisa diikuti (kekuatan sosial) yang memadai. Karena itu ulama di kecamatan Cikancung cukup berhasil "menawarkan" gagasan dan usaha mereka di dalam masyarakat.

Keberhasilan ulama kecamatan Cikancung dalam "menawarkan" gagasan, memprakarsai, mengelola pembangunan, dan pengorganisasian masyarakat, selain karena hal-hal tersebut di atas, didukung oleh beberapa faktor: pertama, setiap gagasan dan usaha mereka di dasarkan pada ajaran agama yang dipikir sakral; dan memiliki daya ikat yang kuat. Agama ... seperti yang telah dijelaskan ... telah diterima sebagai bagian dari norma-norma sosial dan sistem nilai budaya masyarakat setempat. Pembangunan sarana peribadatan, seperti mesjid dan musholla, memberi peluang kepada masyarakat, baik secara perseorangan maupun kolektif, untuk mengekspresikan keyakinan dan perasaan keagamaan mereka, serta memberi identitas kepada mereka sebagai manusia dan masyarakat beragama. Pembangunan sarana pendidikan agama, seperti madrasah dan pesantren, memberi peluang kepada masyarakat untuk menyatakan apresiasi mereka terhadap dunia pendidikan yang menjadi pilar masyarakat islam di desa mereka masing-masing, dan dapat dijadikan sarana mobilitas sosial bagi kaum remaja. Melalui sarana peribadatan maupun sarana pendidikan, mereka telah mampu memunculkan institusi sosial yang khas yang antara lain berfungsi sebagai sarana integrasi sosial

yang diharapkan.

Kedua, pembangunan keagamaan dipandang sebagai salah satu wujud pengabdian (ibadah) kepada Allah, dengan mengharap pahala dan ridha-Nya. Di antara mereka, terutama yang cukup berperan dalam pembangunan desa, selalu mengajak masyarakat untuk menginfakan harta di jalan Allah. Mereka mengingatkan bahwa harta yang dimiliki hakekatnya adalah titipan dari Allah, berasal dari-Nya dan akan kembali kepada-Nya (min 'i-lah ila 'i-lah). Pemikiran tersebut tercermin dalam wujud keikhlasan yang tak kenal lelah dari mereka untuk menyumbangkan pikiran dan tenaga bagi pembangunan keagamaan khususnya, pembangunan masyarakat pada umumnya.

Ketiga, gagasan ulama itu ditunjang oleh kepemimpinan mereka dan kerja sama yang dijalin dengan berbagai pihak. Mereka memiliki pengaruh yang cukup mendalam di kalangan masyarakatnya, terutama dalam lingkungan jama'ah, yang selalu berkomunikasi tatap muka hampir setiap hari. Hal itu jelas membantu dan memperlancar penyampaian dan penerimaan gagasan pembangunan. Selain itu di kecamatan Cikancung selalu melakukan kerja sama dengan para pemimpin masyarakat lainnya, baik dengan pihak pemerintah maupun pihak swasta (pengusaha dan petani kaya).

Keempat, pengelolaan pembangunan (terutama dalam pengelolaan keuangan) yang dipimpin oleh ulama dilakukan secara terbuka. Misalnya, dalam pembangunan dan pemugaran mesjid ja'mi kota kecamatan Cikancung, perincian mengenai pemasukan dan pengeluaran biaya dihitung pada pertemuan rutin panitia pembangunan tiap menjelang hari Jum'at. Selanjutnya, menjelang Jum'at diumumkan kepada para jama'ah. Cara seperti itu merupakan pengawasan keuangan yang efektif serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada ulama sebagai pengelola pembangunan. Mereka lakukan secara sadar sebagai salah satu usaha sosialisasi sikap dan tindakan sosial di kalangan pengikut (masyarakat) sesuai dengan ajaran agama yang telah diterima sebagai bagian dari norma-norma sosial atau sistem nilai budaya masyarakat.

Kelima, gagasan ulama di kecamatan Cikancung disalurkan melalui satuan-satuan sosial yang mapan, seperti jama'ah mesjid, musholla, dan majlis ta'lim yang memiliki anggota tetap dari berbagai kelompok dan lapisan masyarakat. Melalui saluran ini ulama dapat menyakinkan jamaah (pengikut) tentang gagasan-gagasannya mengenai pembangunan secara efektif. Mereka terjemahkan pragmatisme ilmu pengetahuan ke bahasa kultural yang bisa dipahami semua lapisan masyarakat yang ada.

4.3. Peranan Pemikiran Ulama Dalam pembangunan

Pada bagian 4.2. telah diuraikan bagaimana pemikiran ulama mengenai pembangunan masyarakat desa, yang pada dasarnya tidak lepas dari cerminan kegiatan keseharian mereka dari ciri pribadi mereka sebagai “guru” dan “panutan”. Pembangunan menurut mereka pada prinsipnya merupakan pengamalan ajaran agama, yang diwujudkan dalam peningkatan iman, ilmu, dan akhlak mulia, karena keberhasilan pembangunan masyarakat bertolak dari pembangunan manusianya. Mereka berpendapat ajaran agama Islam telah memberikan landasan yang jelas dan tegas bagi etos kerja produktif maupun arah serta tujuan pembangunan yang diinginkan. Bagaimana semua itu bisa direalisasikan dalam kehidupan masyarakat, sudah tentu tidak bisa lepas dari peranan mereka sebagai pemimpin.

Sebagai warasat al anbiya (pewaris nabi), penyampai ajaran agama dalam kehidupan masyarakat, sebagai pelaku amal ma’ruf nahi munkar, singkatnya sesuai dengan fungsi tugas dalam kedudukannya sebagai salah satu golongan pemimpin masyarakat, disamping “menawarkan” gagasan atau pemikirannya, mereka juga memprakarsai bahkan dipercaya memimpin dan mengelola berbagai peristiwa pembangunan. Sebagai tokoh pemuka masyarakat, pengaruh mereka cukup menonjol serta memiliki saluran kepemimpinan yang jelas dan mapan (lihat bab III bag. 3.2.2), mereka mampu berperan dengan baik, baik sebagai: (1) da’i, dalam arti *bil-lisan* maupun *bil-hal*; (2) Demokratisator, seperti selalu melakukan musyawarah dan kerja sama dengan berbagai pihak dalam memecahkan berbagai permasalahan yang timbul di masyarakat; (3) Modernisator, seperti mengajarkan “tulis-baca” dan sikap terbuka terhadap pengalaman-pengalaman maupun penemuan-penemuan baru, secara luas di masyarakat. Ketiga peran itu merupakan realisasi dari kinerja mereka, berupa iman, amal, dan dakwah yang dilakukan dengan penuh kesabaran.

Sebagaimana telah dikemukakan (lihat bab III bag. 3.3.2.) bahwa sebagian besar (91,4%) kegiatan pembangunan di kecamatan Cikancung adalah pembangunan jalur bawah, dengan satuan-satuan pengelola yang cukup beragam mulai pemerintah desa, pengurus RW, pengurus DKM, pengurus Majelis ta’lim, dan pimpinan pesantren serta madrasah. Kenyataan ini menunjukkan bahwa secara umum kegiatan pembangunan di desa-desa wilayah kecamatan Cikancung dikelola oleh pemimpin pemerintahan, dan pemimpin organisasi keagamaan yang pada umumnya diketuai ulama yang cukup dikenal di masyarakat.

Keterlibatan ulama dalam kegiatan pembangunan yang dikelola oleh pemerintah desa cukup menonjol. Sebagai warga negara biasa dan sebagai tokoh masyarakat, mereka selalu dilibatkan dalam musyawarah bersama tokoh-tokoh tingkat kecamatan, demikian pula dalam pelaksanaannya,

misalnya dalam pembangunan sarana jalan desa yang dilakukan di beberapa desa. Kegiatan ini menarik keterlibatan berbagai kelompok dan lapisan masyarakat, karena kegiatan ini berkenaan dengan kepentingan umum yang lebih luas. Wujud peran serta mereka juga beragam, yaitu berupa tenaga dalam kegiatan gotong royong, dan bentuk material lainnya.

Dalam peristiwa pembangunan itu, ulama terlibat dalam usaha pengerahan tenaga dan biaya sesuai dengan kemampuannya, bahkan “pengorbanan” lahan pertanian milik mereka yang terkena pelebaran jalan. Khusus mengenai kegiatan gotong-royong, dilakukan di lokasi yang berdekatan dengan pemukiman masing-masing. Bagi ulama, keterlibatannya dalam kegiatan itu merupakan panggilan tugas sebagai pemimpin masyarakat, disamping merupakan reputasi kepemimpinan mereka. Di lain pihak, kegiatan ini merupakan “investasi” yang akan membantu peningkatan usaha (ekonomi) masyarakat. Karena itu, perhatian mereka terhadap kegiatan seperti ini begitu penuh, karena menyangkut kepentingan masyarakat banyak yang wajib didukung dengan penuh tanggung jawab dan keihlasan.

Kegiatan lain misalnya, dalam usaha pengembangan “domba rakyat”. Melihat potensi yang cukup besar salah seorang ulama dari desa Srirahayu, menyarankan pengembangan “domba rakyat” secara intensif sebagai domba sayur untuk kebutuhan pangsa pasar. Prakarsa itu disambut dengan penuh harapan, khususnya bagi mereka yang memang hidup sebagai peternak, demikian pula pemerintah yang lebih atas memberikan dukungan bahkan bantuan berupa bibit domba unggul dan tuntunan pemeliharaan dombayang baik melalui dinas Peternakan kabupaten Bandung secara rutin. Bantuan ternak juga diterima dari Badan Koordinasi kegiatan Kesejahteraan Sosial (BK3S), Kementerian sosial. Bantuan diberikan kepada Keluarga Binaan Sosila (KBS) yang ada di desa Ciluluk, Cihanyir, dan Cikancung, masing-masing sebanyak 30 ekor domba. Perlu diketahui BP3S merupakan partner pemerintah dalam “Usaha Kesejahteraan Sosial” (UKS) yang bergerak dalam usaha pengentasan kemiskinan terutama di pedesaan. Bagi peternak dan pemilik domba, kegiatan ini merupakan usaha untuk meningkatkan pendapatan, yang akan menunjang perbaikan sosial ekonomi mereka.

Telah dijelaskan bahwa pembangunan sektor keagamaan menempati posisi sentral, baik dalam frekuensi kegiatan maupun penyediaan dana. Pembangunan sektor ini hampir seluruhnya (85,12%) merupakan hasil swadaya murni masyarakat setempat, dan hampir seluruhnya dikelola oleh organisasi-organisasi keagamaan yang ada. Organisasi-organisasi itu merupakan saluran utama bagi para ulama untuk melakukan kegiatan dan aktualisasi kepemimpinan mereka di dalam satuan-satuan jamaah dan

masyarakat pada umumnya. Karena itu, secara umum, dapat dikatakan bahwa peranan mereka begitu dominan. Dalam berbagai peristiwa pembangunan, umumnya mereka adalah pemrakarsa dan pengelola pembangunan. Seperti pembangunan atau pemugaran mesjid agung kota kecamatan Cikancung, diprakarsai dan dikelola oleh satuan pengelola (panitia pembangunan) yang terdiri dari para ulama, ditambah beberapa orang aparat pemerintahan, mereka antara lain berfungsi sebagai “penyedia” sarana fisik yang dibutuhkan, pencari dana, dan pengerah tenaga sesuai dengan kebutuhan. Dalam waktu kurang dari satu tahun, mesjid jami itu dapat diselesaikan dengan baik.

Peristiwa lain yang cukup menarik, ialah pada tiga kegiatan pembangunan dan perluasan mesjid, masing-masing di desa Mandalasari, Hegarmanah, dan Cikasungka. Pembangunan mesjid itu ketiganya dilengkapi dengan tempat mandi dan cuci umum dilakukan dalam satuan sosial yang relatif kecil dan terbatas, namun dapat diselesaikan dalam waktu relatif singkat. Kerja sama di kalangan masyarakat sebagai anggota jemaah yang diprakarsai unsur ulama, bekerja sama dengan para ketua RW (*umara*) dan para petani kaya (*agniya*) sangat kohesif, karena interaksi di antara mereka dilakukan secara kerap dan intensif. Dalam ketiga kegiatan pembangunan mesjid itu menunjukkan bahwa ulama (antara lain sebagai DKM) melakukan peranan yang sangat penting, dan menjadi penanggung jawab dalam pemanfaatan hasil pembangunan.

Peristiwa lainnya yang menunjukkan bagaimana ulama melakukan kerja sama dan mengorganisasi potensi yang ada di sekitarnya yaitu pada waktu pembentukan Madrasah Tsanawiyah “Al-Hidayah” di pangauban, desa Cikancung. Kegiatan itu merupakan salah satu usaha penyediaan perangkat lunak pendidikan agama tingkat menengah, untuk memperluas kesempatan belajar bagi lulusan pendidikan dasar dan ibtidaiyah. Gagasan pembangunan madrasah itu, menurut salah seorang ulama setempat, telah dilontarkan sekitar awal tahun 2010. Proses pembangunannya baru bisa dilaksanakan pada tahun 2011. Mengingat kebutuhan yang begitu mendesak, pembangunan dilakukan secara “marathon” selama lima sampai enam bulan, yang melibatkan berbagai unsur di lingkungan setempat, yaitu ulama, tokoh-tokoh pendidikan aparat pemerintah desa, dan tokoh masyarakat lainnya. Pembiayaannya diperoleh dari para pemimpin kegiatan, dana zakat, infaq, zariah, sodaqoh, dan sumbangan lainnya baik dari masyarakat setempat maupun dari luar. salah seorang ulama setempat ditunjuk untuk menjadi pemimpin kegiatan itu, dibantu oleh seorang kepala MI dan ketua RT setempat. Untuk selanjutnya, salah seorang ulama lainnya ditunjuk sebagai kepala madrasah, dibantu guru-guru SD dan Ibtidaiyah swasta sebagai guru tidak tetap, dua orang diantaranya berpredikat tokoh agama (*ulama*) lingkungan desa Cikancung.

Dari kegiatan itu tampak begitu dominan peranan ulama di desa itu, mulai dari memprakarsai sampai mengelola pembangunan bahkan memimpin kelangsungan dari Madrasah Tsanawiyah tersebut. Semua itu mereka lakukan, menurut salah seorang diantara mereka, karena pengeralahan pemikiran dan tenaga bagi keberhasilan pembangunan masyarakat merupakan wujud pengabdian (*ibadah*) kepada Allah SWT, yang harus dilakukan dengan penuh keikhlasan.

Contoh lain, dalam pengorganisasian zakat fitrah. Kegiatan ini dilaksanakan tiap tahun, mulai dari pertengahan sampai akhir bulan Ramadhan. Secara resmi kegiatan pengelolaan zakat fitrah dimulai dari tingkat Rukun warga (RW) yang dikelola Badan Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh (BAZIS) tingkat RW, yang dalam pelaksanaannya ketua Rukun warga (selaku ketua BAZIS tingkat RW) selalu bekerja sama dengan DKM setempat, bahkan DKM-lah yang mengelola langsung masalah zakat ini. Dalam kegiatan itu semua ulama (responden) selalu menjadi'amilin (panitia), yang bertugas mengumpulkan benda zakat (beras dan uang) dari para wajib zakat (*muzakki*), dan membagikannya kepada yang berhak menerima (*mustahik*).

Kegiatan pengorganisasian zakat fitrah itu merupakan usaha perbaikan pelaksanaan zakat fitrah yang sebelumnya didasarkan pada ketentuan hukum (material) agama dan ketentuan hukum ((prosedural) pemerintah daerah²⁰. Di dalam kegiatan pengorganisasian zakat fitrah tampaknya mengandung pertentangan tersembunyi di kalangan ulama tertentu. Di satu pihak pelaksanaan pengorganisasian sesuai dengan ketentuan BAZIS mampu menampung zakat fitrah dari hampir seluruh muzakki di dalam satuan-satuan jama'ah mesjid dan memberi peluang pembagiannya secara merata kepada para mustahik. Di pihak lain pengorganisasian pembagian zakat dengan ketentuan BAZIS itu, berarti mengurangi "pendapatan" ulama tertentu, yang secara tradisional menerima zakat fitrah dari para pengikutnya tanpa melalui panitia BAZIS. Pertentangan itu tidak pernah muncul ke permukaan, baik dalam bentuk perdebatan maupun dalam bentuk lainnya. Gejala yang muncul adalah penerimaan zakat fitrah secara diam-diam, yang mendapatkan kritikan dari panitia. Dampak dari keadaan seperti itu, dari benda zakat terkumpul hanya mampu disetorkan ke BAZIS tingkat kabupaten.

²⁰ Sebelum ini pengorganisaian zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ), sesuai dengan Surat keputusan Gubernur Jawa barat nomor 352 tahun 1974. Berdasarkan SK Kementrian Agama RI no. 154 tahun 1993 pengorganisasian zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat, Infaq dan Sodaqoh (BAZIS) dengan pembagian sebagai berikut: 50% untuk mustahik tingkat desa, 8,5% untuk amilin desa, 15% untuk sabilillah desa, 2% untuk amilin kecamatan, 5% untuk sabilillah kecamatan, disetor ke BAZIS kabupaten 21,5%.

Pengorganisasian qurban hewan merupakan kegiatan lain yang diprakarsai dan dikelola ulama. Kegiatan qurban hewan ini umumnya dilaksanakan secara kolektif. Semula kegiatan itu mengalami hambatan karena terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama setempat mengenai kedudukan hukum qurban hewan. Di satu pihak berpendapat bahwa qurban hewan harus dilaksanakan secara individual, dengan kadar pembagian yang telah ditentukan sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah. Di lain pihak berpendapat bahwa qurban hewan itu dilaksanakan untuk pemerataan pembagian kepada yang berhak menerimanya. Tanpa mengurangi kadar pembagian yang telah ditentukan, dan untuk meringankan beban bagi yang melaksanakan qurban. Perbedaan itu tercetus secara terbuka dalam musyawarah untuk menentukan pelaksanaan qurban kolektif itu.

Perbedaan pendapat itu, suatu hal yang sering terjadi di kalangan ulama, mencerminkan perbedaan cara penerapan norma agama, dalam hal ini hukum qurban, di dalam kehidupan masyarakat. Ulama yang mendukung gagasan pelaksanaan qurban hewan secara kolektif lebih mempertimbangkan kemaslahatan umum, yaitu: (1) untuk meringankan beban dan menghindari monopoli pembagian daging qurban di kalangan yang berhak menerimanya. Mereka tampak menerima "inovasi" dari masyarakat kota, terutama dari anggota organisasi sosial keagamaan yang sudah biasa melakukan qurban hewan secara kolektif.

Ulama yang tidak mendukung gagasan qurban hewan secara kolektif memikirkan bahwa qurban hewan secara kolektif itu tidak didasarkan kepada ketentuan hukum yang otentik. Mereka mengkhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan mengada-ada (*bid'ah*), padahal qurban itu merupakan ibadah yang telah ditentukan tata caranya.

Perbedaan pendapat di kalangan ulama itu menggambarkan bahwa dalam proses pengambilan keputusan pengorganisasian qurban hewan, terjadi pertukaran pikiran yang terbuka. Hal itu kadang-kadang membingungkan orang kebanyakan ('awam). Namun pada akhirnya musyawarah memutuskan pelaksanaan qurban hewan bisa dilaksanakan secara kolektif, namun tidak akan menghalangi bagi mereka yang akan melaksanakannya secara individual. Keputusan itu mendapat dukungan dari aparat pemerintah kecamatan dan desa, yang turut memperkarsai musyawarah itu.

Kegiatan pengorganisasian qurban hewan itu ditangani oleh pengurus DKM yang dipimpin oleh sebagian ulama bersama unsur masyarakat lainnya, terutama aparat pemerintahan desa. Dalam pelaksanaannya para ketua RW berperan penting. Sebagaimana dalam pengorganisasian zakat fitrah, karena mereka memiliki daftar mustahik dan jadi pelaksana pembagian daging qurban kepada para mustahik tersebut.

Jumlah qurban hewan yang terdapat pada idul adha tahun 1433 H/2012, dapat dilihat pada tabel 14.

Pembangunan lainnya adalah penyantunan anak yatim yang dikelola oleh ibu-ibu yang tergabung dalam majlis ta'lim. Kegiatan ini belum merata di setiap desa, namun kegiatan ini merupakan satu-satunya kegiatan sosial keagamaan yang melibatkan kaum wanita, bahkan boleh dikatakan didominasi mereka. Kegiatan utamanya antara lain adalah usaha pengumpulan dana berupa beras perelek dan sumbangan uang tunai, yang dikumpulkan dari dan oleh peserta atau anggota majlis ta'lim dimaksud. Dana yang terkumpul dibagikan secara merata kepada anak-anak yatim, setiap menjelang Idul Fitri dan setiap tanggal 10 Muharram (hari kelahiran Nabi Muhammad SAW). Kegiatan ini tampaknya seperti terlepas dari koordinasi dan pengawasan pengurus DKM, meskipun kegiatan itu diidentifikasi sebagai bagian dari kegiatan jemaah mesjid. Hal itu menunjukkan bahwa di dalam satuan jamaah mesjid ada "pembagian tugas" berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 14: Jumlah Hewan Qurban pada Idul Adha Tahun 1433 H/2012 M Wilayah Kecamatan Cikancung

No.	Desa	Jumlah dan Jenis Hewan Qurban		
		Sapi	Kerbau	Kambing
1	Cikancung	4	-	20
2	Mandalasari	9	1	29
3	Hegarmanah	4	-	8
4	Cikasungka	8	-	30
5	Tanjunglaya	5	-	32
6	Cihanyir	4	1	29
7	Ciluluk	6	-	15
8	Mekaraksana	10	-	16
9	Srirahayu	4	-	25
Jumlah		54	2	204

Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung Tahun 2012

Dari kegiatan pembangunan tersebut terdapat beberapa hal spesifik: (1) partisipasi ulama begitu besar, mereka berperan serta dalam proses pengambilan keputusan maupun pelaksanaan pembangunan, khususnya dalam satuan jamaah yang dijadikan saluran kepemimpinan mereka; (2) pembangunan sektor keagamaan merupakan hasil kerja sama berbagai unsur di masyarakat. Kerja sama antara ulama dengan aparat pemerintahan desa cukup menonjol, seperti tampak dalam kegiatan pengorganisasian zakat fitrah dan qurban hewan. Ulama memberikan "legitimasi" terhadap kepemimpinan aparat pemerintahan desa, di dalam satuan jamaah, bila

memiliki loyalitas dalam kegiatan keagamaan. Sedangkan aparat pemerintah desa memberikan “legalisasi” bagi kegiatan yang dikelola ulama; (3) kegiatan pembangunan itu merupakan hasil interaksi dengan pihak ‘atas desa’, yaitu pemerintahan dan non pemerintah. Hal itu tampak seperti dalam kegiatan pengorganisasian zakat fitrah dan qurban hewan, yang menerapkan cara dan pendekatan “baru” yang lazim dilakukan dalam tradisi besar yang bercorak perkotaan.

Keterlibatan ulama dalam pembangunan jalur atas tampak dalam berbagai peristiwa pembangunan. Dalam usaha penyediaan (pembangunan) gedung Kemantren Cijapati misalnya, ulama terlibat secara langsung, walaupun pembangunan itu merupakan tanggung jawab penuh Camat (pemerintah kecamatan). Pada kenyataannya, pembangunan itu dilakukan secara swadaya, dikerjakan oleh Badan Pelaksana Pembangunan yang diketua oleh kepala desa setempat (Desa Srirahayu). Tanggung jawab ulama dalam pembangunan gedung kemantren ini cukup berat, mengingat “diberi” tugas untuk menyediakan tenaga dan dana di luar dana yang disediakan pemerintah. Namun demikian dengan dipelopori ulama senior setempat, akhirnya terkumpul dana, serta pengerahan secara rutin, sehingga bangunan seluas 90m² itu dapat diwujudkan dalam waktu yang relatif singkat.

Peran serta ulama lainnya adalah dalam usaha mensukseskan program “sepuluh jurus pertanian” dari Kementrian Pertanian antara lain dalam “memperkenalkan” bibit unggul, pemupukkan yang tepat waktu, jenis pupuk, sistem pola tanam yang terprogram dengan baik, pemberantasan hama secara terpadu, pemberian zat pengatur tubuh yang tepat, dan yang lainnya. Dalam perannya itu, misalnya, salah seorang tokoh ulama dari desa Mekaraksana yang sehari-hari sebagai pemimpin pesantren, merupakan salah seorang ketua Kelompok Tani “Sayuran dataran Tinggi” (seperti kentang, kubis) bergerak secara aktif dalam mengkoordinasi anggota kelompoknya dan kelompok lainnya dalam usaha penyelenggaraan “Pendidikan dan Praktek Pertanian” untuk memperaktekkan teknologi pertanian, rencana kerja, pengenalan administrasi keuangan, dan yang lainnya yang berkaitan langsung dengan usaha pertanian. Biaya untuk kegiatan itu berasal dari pribadi ulama tersebut (terutama untuk penanaman dan pengolahan), dan biaya kelompok yang dipungut melalui iuran, disesuaikan dengan kebutuhan kelompok (satu kelompok terdiri dari 20 orang petani). Sedangkan bantuan pemerintah berupa “tenaga ahli” dari Dinas Pertanian.

Peristiwa pembangunan lainnya yang perlu dikemukakan disini adalah usaha pembangunan perikanan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan. Di kecamatan Cikancung, kolam ikan cukup luas, berdasarkan data monografi kecamatan ada 95,5 hektar, dan hasil panen pertahun rata-

rata sebanyak 157.500 kg. Ikan yang dikembangkan antara lain jenis ikan mas, nila, nilem, dan lele dumbo. Disamping itu dikembangkan pula proyek percontohan pembibitan ikan mas; antara lain dipusatkan di tiga pesantren yang masing-masing ada di desa Cihanyir, Hegarmanah dan Ciluluk. Usaha itu tampak cukup berhasil, bahkan pada saat sekarang ini, ketiga pesantren itu bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Kementerian Tenaga kerja Wilayah Propinsi Jawa Barat yang ada di kecamatan Cikancung, untuk memanfaatkan kolam-kolam pembibitan yang ada di ketiga pesantren itu sebagai tempat latihan kerja para pemuda yang bergabung dalam “Karang Taruna” yang sedang mengikuti pendidikan dan latihan di Balai Latihan Kerja itu. Kali ini yang bertindak sebagai nara sumber adalah ulama pengasuh pesantren, bukan tenaga ahli dari Dinas Perikanan. Kasus itu menunjukkan bahwa bagi pesantren (ulama) pemilik kolam, kegiatan ini merupakan investasi untuk meningkatkan pendapatan. Karena itu, tampaknya disamping merupakan suatu kewajiban untuk menyebarkan ilmu yang telah didapat, motivasi untuk memperoleh keuntungan cukup menonjol. Dengan kata lain, peranan yang dilakukan mereka juga mempunyai tujuan ekonomi yang bersifat kalkulatif.

Peristiwa lain adalah kegiatan pelebaran dan pembuatan (pembukaan) jalan baru: (1) Pembukaan jalan Bihbul, desa Cikancung sepanjang 1,2 km; (2) pelebaran jalan desa Cikancung juga, dari lebar 2 meter menjadi 4 meter, sepanjang 3,5 km; (3) pelebaran jalan Cikamuning di desa Mandalasari sepanjang 7,5 km; (4) pelebaran dan pengaspalan jalan di Cikalage desa Hegarmanah sepanjang 1,25 km, dan (5) pelebaran jalan di desa Cikasungka sepanjang 1,7 km. Walaupun proyek ini merupakan proyek jalur atas, namun bobot keterlibatan dan “pengorbanan” masyarakat cukup besar dan lengkap, artinya disamping mereka telah merelakan lahan untuk pelebaran jalan (umumnya lahan pertanian) mereka juga terlibat dalam pelaksanaan pembangunan dalam wujud tenaga (pengorganisasian masyarakat). Mereka juga hadir secara fisik dalam waktu-waktu kegiatan sedang berlangsung.

Di kecamatan Cikancung, ulama juga dilibatkan dalam usaha menyukseskan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Bentuk arahan mereka pada acara-acara pengajian berpengaruh positif terhadap pemungutan PBB yang umumnya berjalan lancar dan cukup berhasil, bahkan ada beberapa desa mampu mengumpulkan PBB melampaui target yang telah ditentukan.

Pembangunan lain yang termasuk katagori pembangunan jalur atas adalah pembangunan sektor pendidikan. Pada saat penelitian dilakukan, ada tujuh proyek rehabilitasi gedung SD (Sekolah Dasar). Kegiatan itu, yang lebih terkenal dengan proyek Inpres SD, dikelola sendiri oleh

pemerintah kabupaten melalui badan pengelola yang telah ditentukan. Dalam proyek itu Camat dan pejabat lainnya pada tingkat kecamatan (Kepala Dinas Diknas, Kepala Kantor Kemendiknas, dan petugas lapangan PU) ditunjuk sebagai pengawas pelaksana. Sedangkan kepala desa setempat ditunjuk sebagai penanggung jawab pelaksanaan proyek. Berbeda dengan kegiatan pembangunan lainnya, tampaknya karena peluang untuk berperan serta terbatas, karena itu menimbulkan persepsi di kalangan masyarakat bahwa pembangunan gedung SD merupakan urusan pemerintah. Mereka merasa tidak dituntut untuk berperan serta, karena biaya pembangunan telah disediakan sesuai dengan kebutuhan dan tenaga profesional (dalam hal ini pemborong) dapat didatangkan dari luar. Dalam pembangunan seperti ulama tidak dapat berbuat banyak, mereka tidak bisa langsung melibatkan diri. Yang bisa dilakukan hanya bisa memberikan saran atau pikiran dari jauh, dengan bertolak dari kenyataan hasil pekerjaan pemborong, yang sering kurang memenuhi syarat kualitas sesuai dengan *plafon* yang telah ditentukan. Terhadap model pembangunan seperti itu terkesan adanya kontrol sosial yang sangat longgar. Hal ini membawa pengaruh negatif yang lebih jauh, yaitu: (1) pengelolaan pembangunan tertutup, bahkan di antara aparat pemerintah sendiri; dan (2) menimbulkan sikap masa bodoh di kalangan masyarakat terhadap usaha dan pemeliharaan hasil pembangunan. Kenyataan seperti itu membuktikan bahwa politik pembangunan yang bersifat *top down* atau *governmental* membawa implikasi adanya birokratisme dan otoritarian dalam kebudayaan pembangunan, sehingga menghambat timbulnya partisipasi dan proses demokratisasi²¹.

Kegiatan pembangunan jalur atas yang diusahakan menarik partisipasi masyarakat secara massal adalah program Keluarga Berencana nasional (KBN). Kegiatan operasional KB Nasional merupakan rangkaian kegiatan yang berjalan terus menerus, tidak terputus dan merupakan siklus yang teratur. Dimulai dari perencanaan untuk menetapkan waktu pelaksanaan kegiatan, jenis kegiatan yang akan dilaksanakan, sasaran yang dituju, lokasi dan pelaksana kegiatan, target yang ingin dicapai, serta dukungan baik berupa tenaga, dana maupun sarana. Dari perencanaan inilah maka dilaksanakan kegiatan yang diikuti dengan monitoring, pembinaan dan evaluasi. Hasil evaluasi kegiatan selanjutnya menjadi titik tolak perencanaan berikutnya. Siklus kegiatan inilah yang merupakan mekanisme operasional KB Nasional di kecamatan Cikancung. Pelaku dalam penggarapan program KB Nasional di tingkat kecamatan (desa-desa) itu terdiri dari berbagai unsur sebagai pengelola yang sangat menentukan berjalannya mekanisme operasional program. Unsur-unsur itu

²¹ Kartodirdjo, Kompas, 25 Agustus 1993

terdiri dari unsur pemerintah dan non pemerintah, serta tokoh-tokoh masyarakat. Di antara tokoh-tokoh masyarakat yang terlibat dalam operasional program adalah ulama.

Keberadaan ulama dalam satuan tugas (satgas) KB Nasional, menurut Camat setempat, diharapkan dukungan kesepakatan dan dukungan untuk menggerakkan masyarakat. Keberhasilan dukungan tokoh-tokoh masyarakat, khususnya ulama, merupakan faktor pendukung yang sangat besar terhadap kelancaran mekanisme kegiatan, dan sebaliknya akan menggagalkan atau setidaknya menyebabkan pelaksanaan program tersendat-sendat. Pada awal-awal pengenalan program KB Nasional kepada masyarakat, hanya dua orang ulama yang berperan serta dalam kegiatan penyuluhan KB. Pada saat penelitian dilakukan, sebagian besar ulama, yang berada di wilayah kecamatan Cikancung terlibat dalam satuan tugas KB Nasional di daerah masing-masing. Peran serta mereka terutama dalam memberikan motivasi dan penggerakkan (pengorganisasian) masyarakat. Mereka memberikan penjelasan mengenai manfaat KB. Mereka juga memberikan penjelasan kedudukan hukum KB adalah mubah, asal dilaksanakan dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Ketika akan dilaksanakan (diperkenalkan) pelayanan kontrasepsi dengan cara seterilisasi (baca: vasektomi atau tubektomi), mereka berkeberatan dan menentang, karena cara itu dipandang haram (bertentangan dengan hukum Islam). Pemikiran itu diacu dari fatwa MUI pusat yang dikeluarkan berkenaan dengan musyawarah nasional ulama tentang kependudukan, kesehatan, dan pembangunan²². Keberatan mereka terhadap pelayanan kontrasepsi dengan cara sterilisasi itu dikemukakan dalam temu muka (rapat koordinasi) unsur-unsur pengelola program KB Nasional tingkat kecamatan. Dalam pertemuan itu diambil kesepakatan bahwa pelayanan kontrasepsi dengan cara seterilisasi tidak akan dilakukan, kecuali dalam keadaan darurat.

Dengan terlibatnya ulama secara penuh, memberikan hasil program yang lebih baik. Tingkat pencapaian program dari waktu ke waktu makin tinggi. Kenyataan ini menunjukkan ulama mempunyai pengaruh kuat terhadap kehidupan masyarakat. Dari berbagai contoh dan gambaran kegiatan di atas, dapat diketahui adanya peran spesifik yang dilakukan ulama dalam berbagai kegiatan pembangunan: (1) peranan mereka cukup besar dan beragam, baik berupa pikiran, tenaga, maupun harta; (2) tahapan peran dilihat dari prinsip keterlibatan dalam proses pembangunan

²² Menurut keputusan musyawarah Nasional ulama tentang kependudukan, kesehatan, dan pembangunan (20 Oktober 1983), bahwa melakukan vasektomi dan tubektomi adalah haram, kecuali dalam keadaan terpaksa (darurat), seperti untuk menghindari penularan penyakit dari ibu/bapak terhadap anak yang lahir.

disamping ada yang terlibat secara penuh, juga ada yang dilakukan secara parsial; (3) dilihat dari segi prinsip keterlibatan, cakupan keterlibatan mereka umumnya tidak terbatas dalam kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di sekitar tempat pemukiman (desa) mereka saja, tetapi juga terlibat dalam pembangunan di luar desanya.

Telah dijelaskan bahwa pembangunan masyarakat desa merupakan bagian pembangunan nasional. Pembangunan di kecamatan Cikancung terutama pada saat penelitian dilakukan memiliki ciri-ciri: (1) ia mencakup berbagai segi kehidupan. Kegiatan pembangunan di kecamatan itu secara rinci meliputi sektor pertanian, perikanan, peternakan, perhubungan, keagamaan, pendidikan, kesehatan/KB, kesejahteraan keluarga, dan keamanan; (2) dilihat dari segi frekwensi kegiatan dan biaya, pembangunan sektor keagamaan menempati prioritas pembangunan utama, berbeda dengan prioritas pembangunan secara nasional yang lebih memprioritaskan sektor pertanian; (3) kegiatan pembangunan terbagi pada pembangunan jalur atas dan jalur bawah. Pembangunan jalur atas berskala besar dan lebih diorientasikan pada penerapan program pembangunan dan integrasi nasional, sedangkan pembangunan jalur bawah berskala kecil dan diorientasikan pada usaha pengembangan potensi dan integrasi masyarakat setempat (lokal); (4) dilihat dari segi frekwensi kegiatan, pembiayaan, serta keterlibatan masyarakat, pembangunan jalur bawah lebih besar dari pada pembangunan jalur atas; (5) terdapat beragam satuan pengelola pembangunan sebagai saluran kepemimpinan pembangunan para elit desa. Di antara elit desa yang menyalurkan kepemimpinannya dalam kegiatan pembangunan adalah mereka yang memiliki ilmu agama yaitu ulama; (6) sebagai pemimpin masyarakat, ulama memiliki saluran kepemimpinan yang beragam walaupun umumnya terbatas pada sektor keagamaan. Dengan kata lain, aktualisasi kepemimpinan pembangunan di kalangan ulama boleh dikatakan sempit bergerak dalam satuan-satuan kecil dan otonom, namun menghujam di dalam struktur masyarakat desa. Selain itu interaksi mereka dengan masyarakat desa sebagai partisipan pembangunan dilakukan secara kontinu dan mendalam. Semua itu dimungkinkan karena ulama merupakan potensi pembangunan masyarakat desa yang kuat berakar di dalam masyarakat.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Pembangunan masyarakat desa di kecamatan Cikancung, kabupaten Bandung memiliki tiga ciri yang menonjol, yaitu: (1) mencakup berbagai segi kehidupan, meskipun tidak mencerminkan secara nyata seluruh segi pembangunan; (2) terdapat dua jalur kegiatan pembangunan yaitu jalur bawah dan atas. Pembangunan jalur bawah berskala kecil, berorientasi kepada usaha pengembangan potensi dan integrasi masyarakat. Sedangkan pembangunan jalur atas berskala besar, berorientasi pada penerapan program pembangunan dan integrasi nasional; dan (3) beragam satuan pengelola pembangunan sebagai saluran kepemimpinan pembangunan elit desa.

Ulama memikirkan pembangunan sebagai salah satu kewajiban kolektif *fardh kifayah* yang bermakna harus dilakukan oleh berbagai unsur di dalam masyarakat. Kewajiban itu dilihat sebagai usaha penerapan dan pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat. Dijabarkan dalam berbagai aktifitas kehidupan sehari-hari, dilakukan secara sadar, berencana, dan utuh *kaffah*, dengan tujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kebahagiaan dunia-akhirat secara seimbang. Usaha itu antara lain dilakukan melalui pengembangan potensi pribadi beriman, berilmu, dan berperilaku terpuji yang mampu meningkatkan amaliah dalam hidupnya untuk kesejahteraan diri, dan masyarakat yang diridhai Allah SWT. Pemikiran itu menjadi landasan atau acuan dalam melaksanakan peranannya dalam pembangunan.

Bagi ulama, kecenderungan pemilihan prioritas di dalam pembangunan tidak terlepas dari fungsi mereka sebagai salah satu unsur pemimpin masyarakat yang berkewajiban mengajak pada kebaikan, menyuruh berbuat *ma'ruf* dan mencegah berbuat *munkar*. Karena itu, menurut mereka "pembangunan manusia untuk membangun" adalah prioritas utama. Pembangunan manusia diartikan meningkat masyarakat agar memiliki akhlak yang luhur, beriman, dan berilmu, yang diasumsikan sebagai modal dasar utama bagi keberhasilan pembangunan. Dan Usaha itu dilakukan melalui sektor keagamaan.

Sesuai dengan fungsi dan tugas sebagai pemimpin masyarakat, maka peranan pemikiran ulama terpusat pada usaha edukasi, demokratisasi, dan modernisasi yang merupakan realisasi dari kinerja mereka berupa iman, amal, dan dakwah.

Peranan atau keterlibatan pemikiran ulama setempat dalam kegiatan pembangunan jalur bawah, relatif besar, bersifat lengkap, terutama dalam

pembangunan keagamaan.

Peranan pemikiran mereka dalam kegiatan pembangunan jalur atas relatif kecil dan parsial, walaupun tumbuh ulama yang posisinya berada pada jalur nasional dan malahan global. Keadaan seperti itu disebabkan oleh atau berkaitan dengan aspek kultural dan aspek struktural. Secara kultural pembangunan jalur atas dalam tanggapan mereka adalah diluar pembangunan keagamaan, yang lebih jauh dipandang tugas utama pemerintah. Pada tingkat desa secara struktural menyebabkan mekanisme pembangunan jalur atas menentukan pemerintah desa sebagai “pengelola tunggal”, sehingga kurang memberikan kesempatan kepada ulama untuk berperan serta secara penuh.

5.2. Saran

Dalam konteks pembangunan masyarakat desa sebagai bagian dari pembangunan nasional, ulama merupakan potensi sosial pembangunan yang perlu dilibatkan secara lengkap mulai dari proses pengambilan keputusan sampai pada pelaksanaan pembangunan. Mungkinkah melibatkan mereka secara lengkap dalam kegiatan pembangunan pada berbagai sektor ? Hal itu adalah salah satu tantangan bagi pemrakarsa dan pengelola pembangunan masyarakat, termasuk bagi pemerintah kecamatan dan desa sebagai penyelenggara dan penanggung jawab pembangunan di tingkat bawah.

Sehubungan dengan hal itu, perlu dicari pemecahan masalah : (1) Mencari titik persamaan pandangan atau persepsi mengenai pembangunan masyarakat dan acuan yang digunakan oleh semua pihak. Usaha itu adalah untuk mencari titik temu antara gagasan pembangunan masyarakat desa dengan norma ulama. Atau sebaliknya, perlu dicari rumusan operasional mengenai usaha penerapan ajaran islam di dalam kehidupan masyarakat yang relevan dengan tuntutan berbagai kebutuhan masyarakat desa. Usaha ke arah itu bisa diawali dengan pertukaran pikiran secara terbuka antara pihak-pihak yang berkepentingan, baik melalui saluran pemerintahan desa atau pemerintahan lebih atas, atau melalui lembaga lain yang menjadi saluran kepemimpinan ulama. (2) Keterlibatan ulama dalam proses pengambilan keputusan, sesuai dengan prosedur pembangunan jalur atas merupakan suatu hal yang perlu dipikirkan. Sebab keterlibatan ulama seharusnya berpengaruh terhadap aktualisasi kepemimpinan dalam pembangunan. (3) Diperlukan kepemimpinan pemerintahan desa kuat, yang mampu mengajak dan menggerakkan potensi sosial setempat, terutama para pemimpin informal. Jalinan kepemimpinan informal dan formal yang kuat tersebut harus dipupuk dan dikembangkan dalam memberikan prospek kepemimpinan pembangunan yang partisipatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwikarta, Sudardja 1984. *Isyu-isyu Sosiologi Masyarakat Sedang Membangun*. dalam Mimbar Pendidikan, FPIS, IKIP Bandung.
- Alfian, Melly G. Tan, Selo Sumardjan (ed) 1980. *Kemiskinan Struktural Suatu Bunga Rampai*. Yayasan Ilmu Sosial, Jakarta.
- Ali, Mukti, 1974. *Agama dan Pembangunan di Indonesia*. Biro Hubungan Masyarakat Depag, Jakarta.
- Barata, Nyoman. 1982. *Desa (Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa)*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- _____. 1991. *Pembangunan Desa Berwawasan Lingkungan*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Belling dan Totten. 1985. *Modernisasi Masalah Model Pembangunan*. (terjemahan Mien Joebhaar dan Hasan Basri), Rajawali dan Yayasan Ilmu-ilmu Sosial, Jakarta.
- Berger, PL dan Luckmann, T. 1992. *The Social Contruction of Reality*. Penguin Books, Midlesex, England.
- Bidile, William W. Dan Bidlle, Loureide J. 1968. *Encouraging Community Development*. Rinehart Winston, New York.
- Budiman, Nasir. A. 1979. *Kenangan Peringatan Haul K.H. Ruchiyat. Pesantren Cipasung, Tasikmalaya*. Bryant, C. Dan White, L.G. 1982. *Managing Development in The Third World*. Westview PressBoulder, Colorado.
- Chekki, dan A. (ed). 1979. *Comunity Development*. Vikas Publ. House, New Delhi.
- Christensen, James A; Jerry W. Robinson. 1980. *Comunity Development in Amerika*. The Iowa State Univ. Press, Iowa.
- Cohen, J.M. dan Uphoff N.T. 1977. *Rural Development Partisipation*. Cornell Univ. Press.
- Davis, Keith. 1979. *Human Behavior at Work*. Tata Mc. Graw-Hill Publishing Company Ltd., New Delhi.
- Dhifier, Zamachsajari. 1982. *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pemikiran Hidup Kyai*. LP3ES, Jakarta.

- Dunhan, Arthur. 1960. *Community Development, dalam Kurtz, Ressel H. (ed), Social Work Yearbook. National Ass. Of Social Workers, new York.*
- Eaton, Joseph. W. (ed). 1972. *Institution Building and Rural Development.* Sage Publ, Beverly Hills.
- Esman, M.J. dan Uphoff, N.T. 1982. *Local Organization and Rural Development.* Cornell Univ. Ithaca, New York.
- Etzioni, Amitai. 1986. *The Active Society.* The Free Press, New York.
- Frank, Andre Gunder. 1984. *Sosiologi Pembangunan. (alih bahasa Yayasan Ilmu-ilmu Sosial (YIS), Pustaka Pulsar, Jakarta.*
- Friedman, J. 1981. *The Active Community, dalam R.P. Misra (ed). Rural development: National Policies and Experiences.* Maruzen Asia, Nagoya.
- Geertz Clifford. 1981. *Abangan, Santri, Priyayi, dalam Masyarakat Jawa. (di Indonesiakan oleh Aswab Mahasin), Pustaka Jaya.*
- Goode, William J. 1963. *World Revulation and Family Patterns.* Free Press, New York.
- Goulet, Denis. 1977. *The Gruel Choice, A New Concep in the Theory of Development.* Centre for Study ofe Dvelopment and Social Change, New York.
- Hadipranata, Asip. F. 1976. *Effects of Group Identity and Consumer Choice Behavior,* Rikko University, Tokyo.
- _____, 1982. *Psikologi Sosial,* Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Hagen, E. 1962. *On The Theory of Social Change,* Dorsey Press, Homewood.
- Hofsteede, W.M.F. 1980. *Pendekatan Sosial Kemasyarakatan dalam Pemeliharaan Lingkungan Hidup.* Makalah disampaikan pada Penataran Peserta Kerjasama Sosial Kemasyarakatan, Proyek pembinaan Kerukunan Hidup Beragam, Serang, 23 November 1980.
- Hoogvelt, M.M. Ankie. 1976. *Sosiologi Masyar akat Sedang Berkembang. (alih bahasa Alimandan), Rajawali Press, Jakarta.*

- Horikoshi, Hiroko. 1987. *Kyai dan Perubahan Sosial*. (terjemahan Umar Basalim dan Andi Muarly Sunrawa), P3M, Jakarta.
- Horton, Paul. B. 1987. *Sosiologi*; (alih bahasa Aminudin Ram dan Tita Sobari). Jilid I, edisi ke enam, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Mc. Iver, Robert M. And Charles H. Page. 1949. *Society: and Introductory Analysis*. Rinehart and Company Inc. New York.
- Morris, Richard T. And . 1957. *A General Framework For The Studi of leadership, in Paul F. Lazerfeld and Morris resenberg (ed, The Language of Social Research*. The Free press Publishers, Gelencoe, Illinois.
- Mubyarto, 1984. *Strategi Pembangunan Pedesaan*. Yogyakarta, P3PK-UGM, Yogyakarta.
- _____, Loekman Soetrisno dan Dove Michael. 1984. *Pembangunan Manusia dan Pembangunan Pedesaan. Makalah disampaikan dalam Diskusi nasional VII Penggunaan Tanah Berencana dan Pembangunan*, Jakarta 24-26 Nopember 1984.
- Muahimin, Yahya. 1988. *Etos Kerja dan Moral Pembangunan, dalam Swasono Sri Edi (Penyunting), Sekitar Kemiskinan dan Keadilan*. UI-Press, Jakarta.
- Muhajir, Noeng. 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Reke Sarasin, Yogyakarta.
- Nasution, Zulkarimien. 1988. *Komunikasi Pembangunan*. Rajawali Press, Jakarta.
- Ndraha, Talizuduhu. 1982. *Metodologi Pembangunan Desa*. Bina Aksara, Jakarta.
- _____, 1986. *Pembangunan Masyarakat*. Karunika, Jakarta.
- Nelson, L. Ramsey. 1960. *Comunity Structure and Change*. Mc. Millan, New York.
- Nordholt, Nico Schulte. 1987. *Ojo Dumeah: Kepemimpinan Lokal dalam Pembangunan*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

- Notingham, Elizabeth K. 1987. *Agama dan Masyarakat: Suatu Pengantar Sosiologi Agama (di Indonesiakan Abdul Muis Naharong)*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Palmer, Andrea Wilcox. 1984. *Situraja: Sebuah Desa di Priangan, dalam Koentjaraningrat (ed), Masyarakat Desa di Indonesia*. Lembaga penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Parsont, Talcot. 1985. *Esai-esai Sosiologi*. Aksara Prasada Press, Jakarta.
- Ponsioen, J.A. 1968. *National Development*. Mouton, The Haque, Mountan.
- Prasadja, Buddy. 1986. *Pembangunan Desa dan Masalah kepemimpinannya*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Rahardjo, M. Dawam. 1985. *Masalah Komunikasi di Pedesaan, dalam Peter Hagul (ed), Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat*. Rajawali, Pers. Jakarta.
- Riberu. 1978. *Dasar-dasar Kepemimpinan*. Luceat, Jakarta.
- Rogers, Everett M. Dan F. Floyd Shoemaker. 1987. *Memasyarakatkan Ide-ide Baru (disarikan Abdilllah Hanafi)*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Safari, Imam Asyi'ari tt. *Inovasi dan Pembangunan Masyarakat Desa, dalam Muhammad Rusli Karim, (ed), Seluk Beluk Perubahan Sosial*. Usaha Nasional, Surabaya.
- Salectore. 1981. *Ulama, dalam Sartono Kartodirdjo 9Penyunting), Elit dalam Perspektif Sejarah*. LP3ES. Jakarta.
- Sastropoetro, Santoso. 1986. *Partisipasi, komunikasi, Persuasi, dan Disiplin dalam Pembangunan nasional*. Alumni, Bandung.
- Sasono, Adi. 1988. *Etos Kerja dan Moral Pembangunan, dalam Swasono Sri Edi. (Penyunting), Sekitar kemiskinan dan Keadilan*. UI Press, Jakarta.
- Sayogyo dan Pujiwati Sayogyo (ed), 1988. *Sosiologi Pedesaan*. Jilid 1 Cetakan VIII, gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- _____ (ed). 1989. *Sosiologi Pedesaan*. Jilid 2 Cetakan VIII, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

- Schoorl, J.W. 1988. *Modernitas: Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-negara Sedang membangun, (diindonesiakan R.G. Soekadidjo)*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Shiddiqi, Nourouzzaman. 1984. *Menguak Sejarah Muslim*. PLP2M, Yogyakarta.
- Siagian, P. Sondang. 1974. *Administrasi Pembangunan*. Gunung agung, Jakarta.
- Siegel, Sydney dan N. John Castellan Jr. 1999. *Non Parametric Statistic*. Second Edition. Mc. Graw-Hill Book Company, New York, Siagian, Sondang P. 1974.
- Sastrodihardjo, Soedjito, 1967. *Perubahan Struktur Masyarakat di Jawa*. Suatu Analisa, Fakultas Sosial Politik UGM, Yogyakarta.
- Soejatmoko. 1986. *Development as Learning Process*, Tenth Vikram Sarabhai Memorial Lectures, Ahmedabad.
- Soekanto, Soerjono, 1986. *Beberapa teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*. CV. Rajawali, Jakarta.
- _____, 1986. W.F. Ogburn: *Ketinggalan Kebudayaan*. Rajawali Press, Jakarta.
- Soeparno, R. 1977. *Mengenal Desa*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Subhi, Shaleh. 1970. *Minhal al Waridin* (sebagian amal yang dilakukan sehari-hari), Beirut.
- Suriasumantri, Jujun S. 1984. *Filsafat Ilmu*. Ditjen Dikti Depdikbud, Jakarta.
- Surjabrata, Sumadi, 1982/93. *Kepribadian dan Perkembangan dalam Sumadi Surjabrata (ed), Psikologi Kepribadian*, Ditjen Dikti Depdikbud, Jakarta.
- Susanto, Astrid. 1984. *Sosiologi Pembangunan*. Bina Cipta, Jakarta.
- Suwarsono dan Alvin J. So. 1991. *Perubahan Sosial dan Pembangunan di Indonesia*, LP3ES, Jakarta.
- Thabathaba'i, Muhammad Husein. 1983. *Al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an*, Jilid XVII.

- Ting Chew Peh. 1985. *Konses Asas Sosiologi*. Dewan bahasa dan Pustaka Malaysia, Kuala Lumpur.
- Tjiptoherijanto, Prijono. 1988. *Etos Kerja dan Moral Pembangunan dalam Islam, dalam Swasono Sri Edi (Penyunting), Sekitar Kemiskinan dan Keadilan*. UI. Press, Jakarta.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1980. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. LP3ES, Jakarta.
- _____, dan A.R. Mustopadijaya 1988. *Teori dan Strategi Pembangunan Nasional*. Haji Mas Agung, Jakarta.
- Tjokrowinoto, Moeljarto. 1977. *Peranan Kebudayaan Politik dan Kebudayaan administrasi di dalam Pembangunan Masyarakat*. BPA-UGM, Yogyakarta.
- _____, 1987. *Penyusunan Indikasi Pembangunan Pedesaan*. Makalah, disampaikan dalam Seminar Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan pedesaan, PAU-Studi Sosial Universitas Gama, Yogyakarta. 9-11 maret 1987.
- Tjondronegoro, Sutiono M.P. 1978. *Modernisasi Pedesaan: Pilihan Strategi Menuju Lepas Landas*. Dalam Prisma, No. 3/Tahun ke VII-April 1978.
- _____, 1982. *Gejala Organisasi dan Pembangunan Berencana dalam Masyarakat Desa di Jawa, dalam Koentjaraningrat (Penyunting), Masalah-masalah Pembangunan: Bunga Rampai Antropologi Terapan*. LP3ES, Jakarta.
- Toynbee, Arnold. 1972. *A Study of History*. Oxford University Press and Thames and Hudson Ltd., London.
- United Nations. 1963. *Community Development and National Development*. New York.
- Usman, Syarif. tt. *Strategi Pembangunan Indonesia dan Pembangunan dalam Islam*. Firma, Jakarta.
- Vredembregt, J. 1978. *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*. Gramedia, Jakarta.
- Wahid, Abdurrahman. 1981. *Muslim di Tengah Pergumulan*. LAPENAS, Jakarta.

- Waber, Mark. 1958. *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism*. Charles Scribner's Son's, New York.
- _____, 1989. *Kapitalisme, Birokrasi dan Agama* (alih bahasa Hartono), Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Weiner, Myron. (ed). 1981. *Modernisasi: Dinamika pertumbuhan*. Cetakan ke 3, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Willner, Ann Ruth dan Willner Dorothy. 1986. *Kebangkitan dan Peranan Pemimpin-Pemimpin Kharismatik*. Dalam sartono Kartodirdjo (Penyunting), *Kepemimpinan dalam dimensi Sosial*. LP3ES, Jakarta.
- Wiryanto, Y dan Wehner, G. 1973. *Membangun Masyarakat*. Alumni, Bandung.
- Yakub, H.M. 1985. *Pondok Pesantren dan Pembangunan Masyarakat Desa*. Angkasa, Bandung.
- Zaltman, Gerald and Robert Duncan. 1977. *Strategics for Planned Change*. Jhon Wiley and Sons, New York.
- Ziemek, Manfred. 1986. *Pesantren dalam Perubahan Sosial* (terjemahan Butche B. Soendjojo). P3M, Jakarta.